

# 087 BAGIAN ANGGARAN

# LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022
(AUDITED)

#### **BAGIAN ANGGARAN 087**



#### LAPORAN KEUANGAN

#### **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(AUDITED)

#### **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ANRI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Di samping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Jakarta, 09 Mei 2023 Sekretaris Utama,



**Rini Agustiani** NIP 19660818 199203 2 001

#### DAFTAR TABEL

Tabel I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021	1
Tabel II Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA 2022	1
Tabel III Ringkasan Kenaikan/Penurunan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	
Tabel IV Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	3
Tabel V Ringkasan Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	4
Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran 2022/2021	5
Tabel 2 Neraca 2022/2021	6
Tabel 3 Laporan Operasional 2022/2021	
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas 2022/2021	10
Tabel 5 Susunan Organisasi dan Pejabat Pimpinan Unit Kerja	35
Tabel 6 Struktur Organisasi per Eselon I ANRI	36
Tabel 7 Struktur Organisasi per Satuan Kerja ANRI	38
Tabel 8 Struktur Organisasi per Eselon II Mandiri ANRI	39
Tabel 9 Struktur Organisasi Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan	40
Tabel 10 Pegawai ANRI Menurut Penempatan	41
Tabel 11 Pegawai ANRI Menurut Jabatan	41
Tabel 12 Pegawai ANRI Menurut Jenis Kelamin	41
Tabel 13 Pegawai ANRI Menurut Golongan	41
Tabel 14 Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024	42
Tabel 15 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	44
Tabel 16 Kualitas Piutang	50
Tabel 17 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	53
Tabel 18 Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud	54
Tabel 19 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022	60
Tabel 20 Kenaikan/Penurunan Pendapatan LRA	62
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Pendapatan	62
Tabel 22 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan dari Penjualan	63
Tabel 23 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	64
Tabel 24 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	65
Tabel 25 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya	66
Tabel 26 Rincian realisasi pendapatan Layanan Jasa Kearsipan	66
Tabel 27 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Denda	67
Tabel 28 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Lain-lain	68
Tabel 29 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	68
Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022	70
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021	
Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2022	71
Tabel 33 Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	71
Tabel 34 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PNS	72
Tabel 35 Selisih Belanja LRA dengan LO Gaji dan Tunjangan PNSPNS	72
Tabel 36 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Lembur	74

Tabel 37 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Lembur	74
Tabel 38 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus)	74
Tabel 39 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Tunj. Khusus & Pegawai Transito	
Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022	
Tabel 41 Perbandingan Belanja Barang	
Tabel 42 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Barang Operasional	77
Tabel 43 Perbandingan Belanja Barang Non Operasional TA 2022 dan TA 2021	
Tabel 44 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Barang Non Operasional	78
Tabel 45 Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	79
Tabel 46 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Barang Persediaan	
Tabel 47 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Barang Persediaan	80
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	82
Tabel 49 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Jasa	
Tabel 50 Rincian Jurnal Beban/Belanja Langganan Listrik	83
Tabel 51 Rincian Jurnal Beban/Belanja Langganan Telepon	83
Tabel 52 Rincian Jurnal Beban/Belanja Langganan Air	83
Tabel 53 Rincian Jurnal Beban/Belanja Jasa Lainnya	83
Tabel 54 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Pemeliharaan	84
Tabel 55 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Pemeliharaan	84
Tabel 56 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	86
Tabel 57 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Perjalanan Dalam Negeri	86
Tabel 58 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	87
Tabel 59 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Perjalanan Luar Negeri	88
Tabel 60 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pe	
Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	89
Tabel 62 Perbandingan Belanja Modal TA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	89
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90
Tabel 64 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	90
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan 2021	
Tabel 66 Belanja Akun Penanganan Pandemi COVID-19	92
Tabel 67 Kas di Bendahara Pengeluaran (111611) Periode 31 Desember 2022	101
Tabel 68 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) Periode 31 Desember 2022	101
Tabel 69 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021	101
Tabel 70 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821) Periode 31 Desember 2022	
Tabel 71 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021	105
Tabel 72 Mutasi Persediaan Tahun 2022	
Tabel 73 Hasil Opname Fisik Kurang/Lebih	
Tabel 74 Mutasi Tambah/Kurang Tanah	
Tabel 75 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2022	
Tabel 76 Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin	111
Tabel 77 Rincian Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Tabel 78 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	
Tabel 79 rincian Gedung dan Bangunan ANRI (ekstrakomptabel dan intrakomptabel)	
Tabel 80 Rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Tabel 81 Mutasi Tambah/Kurang KDP	124

Tabel 82 Perbandingan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2022 dai	า 31
Desember 2021	127
Tabel 83 Rincian Penambahan penyusutan Aset Tetap dan Koreksi Nilai	127
Tabel 84 Rincian Perolehan Aset Tak Berwujud	128
Tabel 85 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	134
Tabel 86 Mutasi Perubahan Akumulasi Penyusutan	135
Tabel 87 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga ANRI	135
Tabel 88 Rincian Uang Muka dari KPPN	138
Tabel 89 Rincian nilai DDEL/DKEL seluruh satker	139
Tabel 90 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Akun	141
Tabel 91 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja	141
Tabel 92 Selisih LO dan LRA PNBP	143
Tabel 93 Rincian Beban Pegawai	144
Tabel 94 Selisih LRA dan LO Beban Pegawai	146
Tabel 95 Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Akun	
Tabel 96 Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja	147
Tabel 97 Selisih LO dan LRA Beban/Belanja Persediaan	148
Tabel 98 Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Akun	148
Tabel 99 Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Satuan Kerja	150
Tabel 100 Selisih LO dan LRA Beban/Belanja Barang dan Jasa	150
Tabel 101 Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Akun	151
Tabel 102 Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan KerjaKerja	152
Tabel 103 Selisih LO dan LRA Beban Pemeliharaan	153
Tabel 104 Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Akun	154
Tabel 105 Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Satuan Kerja Kerja	
Tabel 106 Selisih LRA dan LO Beban/Belanja Perjalanan Dinas	
Tabel 107 Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Berdasarkan Aku	
	156
Tabel 108 Selisih LRA dan LO Beban/Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemo	la
	157
Tabel 109 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Akun	158
Tabel 110 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Satuan Kerja	159
Tabel 111 Rincian Surplus dari Kegiatan Operasional	160
Tabel 112 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	169
Tabel 113 Rincian DDEL/DKEL seluruh Satker	170
Tabel 114 Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Tahun 2022 & 2021	170
Tabel 115 Daftar Rekening dipindahbukukan	179

#### DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Isi	vi
Pernyataan Telah Direviu	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	60
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	101
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	141
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	165
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	172

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 yang

terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2022. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan merupakan

penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan

keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh

lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan

pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi

pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa

laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain

yang terkait.

Jakarta, 09 Mei 2023

Inspektur,



Syaifuddin

NIP. 19643112 199303 1 001



#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 (Audited) Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 9 Mei 2023 Kepala ANRI,



Imam Gunarto NIP 19630728 199203 1 001



#### RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 (*Audited*) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran/target dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp18.868.813.156,00 atau mencapai 102,51 persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp18.406.521.000,00. Realisasi Belanja Negara sebesar Rp247.549.140.859,00 atau mencapai 95,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp258.301.947.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021

		TA 2021		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real. thd Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	18.406.521.000	18.868.813.156	102,51%	14.135.188.117
Belanja Negara	258.301.947.000	247.549.140.859	95,84%	234.726.067.648
Surplus/Defisit LRA		(228.680.327.703)		(220.590.879.531)

Tabel II Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA 2022

AKUN	PAGU REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN		REALISASI NETO	ЕТО		
AKUN	PAGO	(Rp)	(%)	BELANJA (Rp)	(Rp)	(%)
51	105.511.248.000	103.718.881.255	98,30	257.691.123	103.461.190.132	98,06
52	122.035.836.000	116.241.750.039	95,25	1.680.853.889	114.560.896.150	93,87
53	30.754.863.000	29.527.314.577	96,01	260.000	29.527.054.577	96,01
JUMLAH	258.301.947.000	249.487.945.871	96,59	1.938.805.012	247.549.140.859	95,84

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.218.317.838.634,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.532.257.217,00; Aset Tetap sebesar Rp1.209.788.710.307,00; Aset Lainnya sebesar Rp5.996.871.110,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.129.487.302,00 dan Rp1.216.188.351.332,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel III Ringkasan Kenaikan/Penurunan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Union	21 December 2022 (Br)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)		
Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (kp)	(Rp)	(%)	
Aset					
Aset Lancar	2.532.257.217	2.381.973.065	150.284.152	6,31	
Aset Tetap	1.209.788.710.307	1.227.936.848.039	-18.148.137.732	(1,48)	
Aset Lainnya	5.996.871.110	6.139.761.170	-142.890.060	(2,33)	
Jumlah Aset	1.218.317.838.634	1.236.458.582.274	-18.140.743.640	(1,47)	
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek	2.129.487.302	1.976.132.042	153.355.260	7,76	
Jumlah Kewajiban	2.129.487.302	1.976.132.042	153.355.260	7,76	
Ekuitas					
Ekuitas	1.216.188.351.332	1.234.482.450.232	-18.294.098.900	(1,48)	
Jumlah Ekuitas	1.216.188.351.332	1.234.482.450.232	-18.294.098.900	(1,48)	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.218.317.838.634	1.236.458.582.274	-18.140.743.640	(1,47)	

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.051.904.844,00 sedangkan Beban Operasional sebesar jumlah adalah Rp265.921.921.480,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp247.870.016.636,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp1.331.882.775,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp249.201.899.411,00.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)		
Oi alaii	Ordiali 31 Desember 2022 (kp) 31 Desember 2021 (kp)		(Rp)	(%)	
Pendapatan Operasional	18.051.904.844	14.058.121.456	3.993.783.388	28,41	
Beban Operasional	265.921.921.480	216.490.778.429	49.431.143.051	22,83	
Surplus/defisit dari operasi	(247.870.016.636)	(202.432.656.973)	(45.437.359.663)	(22,45)	
Kegiatan Non Operasional	(1.331.882.775)	138.082.342	(1.469.965.117)	(1.064,56)	
Pos-pos Luar Biasa	0	0	0	0,00	
Surplus/defisit dari non operasi	(1.331.882.775)	138.082.342	(1.469.965.117)	(1.064,56)	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(249.201.899.411)	(202.294.574.631)	(46.907.324.780)	(23,19)	

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp1.234.482.450.232,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp249.201.899.411,00 kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00, Koreksi yang Menambah Ekuitas sebesar Rp1.343.705.968,00 dengan rincian Koreksi atas Reklasifikasi sebesar Rp0,00; Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp1.353.705.968,00 dan Lain-Lain sebesar (Rp10.000.000,00) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp229.564.094.543,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.216.188.351.332,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V Ringkasan Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
Ordian	of Describer 2022 (Kp)	Describer 2022 (RP) ST Describer 2021 (RP)		(%)	
Ekuitas Awal	1.234.482.450.232	1.217.622.514.276	16.859.935.956	1,38	
Surplus / Defisit-LO	(249.201.899.411)	(202.294.574.631)	(46.907.324.780)	(23,19)	
Dampak kumulatif perbahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	0	0	0	0,00	
Koreksi yang mengurangi Ekuitas	1.343.705.968	(1.436.368.944)	2.780.074.912	(193,55)	
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00	
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0,00	
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	372.127.275	(372.127.275)	(100,00)	
Selisih Revaluasi Aset	0	0	0	0,00	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	1.353.705.968	(1.808.496.219)	3.162.202.187	(174,85)	
Lain-lain	(10.000.000)	0	(10.000.000)	0,00	
Transaksi Antar Entitas	229.564.094.543	220.590.879.531	8.973.215.012	4,07	
Penurunan Ekuitas	(18.294.098.900)	16.859.935.956	(35.154.034.856)	208,51	
Ekuitas Akhir	1.216.188.351.332	1.234.482.450.232	(18.294.098.900)	(1,48)	

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

#### I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran 2022/2021

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	CATATAN	TAHU	TAHUN 2022		TA 2021
AKUN	ONAIAN	CAIAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
	PENDAPATAN					
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18.406.521.000,00	18.868.813.156,00	102,51	14.135.188.117,00
	JUMLAH PENDAPATAN		18.406.521.000,00	18.868.813.156,00	102,51	14.135.188.117,00
	BELANJA	B.2				
	Belanja Operasi					
51	Belanja Pegawai	B.3	105.511.248.000,00	103.461.190.132,00	98,06	98.433.862.267,00
52	Belanja Barang	B.4	122.035.836.000,00	114.560.896.150,00	93,87	78.305.118.644,00
53	Belanja Modal	B.5	30.754.863.000,00	29.527.054.577,00	96,01	57.987.086.737,00
57	Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
	JUMLAH BELANJA		258.301.947.000,00	247.549.140.859,00	95,84	234.726.067.648,00
SURPLUS/DEFISIT LRA		(228.680.327.703,00)		(220.590.879.531,00)		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 9 Mei 2023 Pengguna Anggaran,



Imam Gunarto NIP 19630728 199203 1 001

#### **II. NERACA**

Tabel 2 Neraca 2022/2021

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	ASET			
11	ASET LANCAR		2.532.257.217	2.381.973.065
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	2.001.770.003
1117	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	_	_
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	_	-
1141	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	_	10.000.000
1143	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	_	19.969.700
1152	Piutang Bukan Pajak	C.6	_	5.447.200
1154	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.7		57.17.255
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
1162	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan	C.8	_	(27.236)
1102	Paiak	C.0		(27.200)
1164	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	C.9	-	-
	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti			
	Rugi			
1171	Persediaan	C.10	2.532.257.217	2.346.583.401
1521	Piutang Tagihan Tuntutan	C.11	-	-
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
13	ASET TETAP		1.209.788.710.307	1.227.936.848.039
1311	Tanah	C.12	806.226.080.906	805.561.648.718
1321	Peralatan dan Mesin	C.13	281.121.046.237	265.069.905.094
1331	Gedung dan Bangunan	C.14	369.395.018.369	367.489.805.847
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	62.881.974.526	62.881.974.526
1351	Aset Tetap Lainnya	C.16	27.841.315.574	26.872.634.444
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.17	446.248.000	2.399.298.000
1371	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.18	(217.069.298.823)	(203.155.557.039)
1372	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.18	(79.782.134.263)	(61.619.440.610)
1373	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.18	(41.211.057.119)	(37.502.937.841)
1374	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.18	(60.483.100)	(60.483.100)
15	PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
1521	Piutang Tagihan Tuntutan		_	_
	Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
16	ASET LAINNYA		5.996.871.110	6.139.761.170
1621	Aset Tak Berwujud	C.19	26.934.084.967	22.227.611.637
1623	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.19.a	-	-
1661	Aset Lain-lain	C.20	1.162.593.490	7.174.207.984
1691	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.21	(1.162.593.490)	(7.136.508.179)
1693	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(20.937.213.857)	(16.125.550.272)
	JUMLAH ASET		1.218.317.838.634	1.236.458.582.274

2	KEWAJIBAN			
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.129.487.302	1.976.132.042
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	2.129.487.302	1.976.132.042
2181	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.23	-	-
2182	Hibah Yang Belum Disahkan	C.24	-	-
2195	Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		2.129.487.302	1.976.132.042
3	EKUITAS			
31	EKUITAS		229.564.094.543	220.590.879.531
3131	Due to - Due from	C.27	229.350.065.148	220.590.879.531
3132	Transfer	C.27	214.029.395	-
39	EKUITAS		1.235.826.156.200	1.216.186.145.332
3911	Ekuitas	C.27	1.235.826.156.200	1.216.186.145.332
	Defisit -LO		- 249.201.899.411	- 202.294.574.631
	JUMLAH EKUITAS		1.216.188.351.332	1.234.482.450.232
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		1.218.317.838.634	1.236.458.582.274

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, 9 Mei 2023 Pengguna Anggaran,



Imam Gunarto NIP 19630728 199203 1 001

#### **III. LAPORAN OPERASIONAL**

Tabel 3 Laporan Operasional 2022/2021

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	18.051.904.844,00	14.058.121.456,00
JUMLAH PENDAPATAN		18.051.904.844,00	14.058.121.456,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	103.405.785.971,00	99.733.645.489,00
Beban Persediaan	D.3	5.508.470.190,00	4.759.308.978,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	66.607.786.782,00	49.743.450.432,00
Beban Pemeliharaan	D.5	11.956.165.236,00	10.209.936.810,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	29.780.456.329,00	13.103.236.740,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	9.644.450,00	3.306.994,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	48.653.639.758,00	38.937.865.750,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(27.236,00)	27.236,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		265.921.921.480,00	216.490.778.429,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(247.870.016.636,00)	(202.432.656.973,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1	(1.596.045.989,00)	128.730.888,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.1	478.201.011,00	132.750.888,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.2	2.074.247.000,00	4.020.000,00
Surplus/(Defisit) Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pelepasan Keg. Non Operasional Lainnya	D.11.2	264.163.214,00	9.351.454,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.2.1	264.663.014,00	66.324.189,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.2.2	499.800,00	56.972.735,00

SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.331.882.775,00)	138.082.342,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(249.201.899.411,00)	(202.294.574.631,00)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.13	(249.201.899.411,00)	(202.294.574.631,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, 9 Mei 2023 Pengguna Anggaran,



Imam Gunarto NIP 19630728 199203 1 001

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel **4** Laporan Perubahan Ekuitas 2022/2021

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391111	EKUITAS	E.1	1.234.482.450.232,00	1.217.622.514.276,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(249.201.899.411,00)	(202.294.574.631,00)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0,00	0,00
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	1.343.705.968,00	(1.436.368.944,00)
391114	Revaluasi Aset Tetap	E.4.1	0,00	0,00
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	1.126.830.968,00	(478.596.189,00)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	E.4.3	226.875.000,00	(1.329.900.030,00)
391119	Koreksi Lainnya	E.4.4	(10.000.000,00)	0,00
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	E.4.5	0,00	0,00
391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	E.4.6	0,00	372.127.275,00
31	Transaksi Antar Entitas	E.5	229.564.094.543,00	220.590.879.531,00
	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	E.5.1	(18.868.813.156,00)	234.726.067.648,00
	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.5.1	247.549.140.859,00	(14.135.188.117,00)
	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	E.5.2	214.029.395,00	0,00
	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.5.3	669.737.445,00	0,00
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(18.294.098.900,00)	16.859.935.956,00
	EKUITAS AKHIR	E.7	1.216.188.351.332,00	1.234.482.450.232,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, 9 Mei 2023 Pengguna Anggaran,



Imam Gunarto NIP 19630728 199203 1 001

#### V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Arsip Nasional Republik Indonesia

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Sejarah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Landarchief (1892- 1942)

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarchief. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan Landarchivaris yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun Landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1922 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat Landarchivaris yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Lansarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain:

- 1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah;
- 2. Batas arsip baru adalah 40 tahun;

3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada *Algemeen Landarchief* di Batavia (Jakarta).

#### Kobunsjokan (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, ANRI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah Bunkyokyoku. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.

#### Arsip Negeri (1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa keberadaan dan perkembangan ANRI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (*Landarchief*) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (*Landarchief*) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

#### Landsarchief (1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi *Landsarchief* kembali. Sebagai pimpinan *Landsarchief* adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ke tangan Pemerintah Republik Indonesia.

#### **Arsip Negara (1950-1959)**

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, Landsarchief ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.

#### **Arsip Nasional (1959-1967)**

#### Arsip Nasional di bawah Kementerian PP dan K (1959-1961)

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Negara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K Nomor 69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

#### Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi Arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

#### Arsip Nasional di bawah Menteri Pertama Bidang Khusus (1963-1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 188 tahun 1962, ANRI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

#### Arsip Nasional di bawah Menko Hubra (1964-1966)

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 1961.

### Arsip Nasional di bawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik (1966-1967)

Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.

#### **Arsip Nasional RI (1967- sekarang)**

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjaannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS Nomor A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI;

2. Mengajukan usulan perubahan Perpres Nomor 19/1961 menjadi Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan-usulan tersebut hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh karena itu, Dra. Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, serta atas dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, S.H., cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 19 ayat (1) ANRI adalah lembaga kearsipan nasional yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

#### **VISI ANRI**

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2000-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2020-2024 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2020-2024, yaitu Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah "Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025".

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### **MISI ANRI**

Dalam rangka mencapai Visi ANRI tahun 2020-2024, Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa." dan "Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya", dengan uraian sebagai berikut:

- Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- 2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
- 3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
- Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 5 (lima) misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi ANRI di tahun 2020-2024. ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (policy maker).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil think tank, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai think tank dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (brand image) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas

peran sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational brand image building).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:

- 1. Integritas;
- 2. Profesional;
- 3. Visioner;
- 4. Sinergi; dan
- 5. Akuntabel.

#### **TUJUAN ANRI**

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.

Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi: (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan.

#### SASARAN STRATEGIS ANRI

Arah kebijakan ANRI disusun untuk memberikan dampak nyata terhadap upaya perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dalam menyusun arah kebijakan harus memperhatikan sasaran strategis:

- Meningkatnya kepatuhan lembaga pemerintah dan lembaga publik terhadap kebijakan kearsipan (S1);
- 2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional (S2);
- 3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima (S3); dan
- 4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI (S4).

Keempat sasaran strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

#### STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, disusun strategi sebagai berikut:

- Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1)
   Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan meliputi:
  - Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan melalui strategi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.
    - Dalam hal ini perlu dilakukan deregulasi dan debirokratisasi bidang kearsipan melalui revitalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan yang selaras dengan lingkungan digital. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa NSPK yang ditetapkan dapat diimplementasikan.

Ruang lingkup kebijakan tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kearsipan oleh pemerintah saja namun juga mencakup peran serta

masyarakat di bidang kearsipan. Peran arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa juga harus menjadi objek pengkajian dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kegiatan pengkajian yang sifatnya terapan dan penelitian murni yang dapat dikerjasamakan pelaksanaannya dengan perguruan tinggi.

- b. Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan melalui strategi:
  - 1) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan;
  - 2) Pembinaan Kearsipan pada lingkup pusat; dan
  - 3) Pembinaan Kearsipan pada lingkup daerah.

Peningkatan kapabilitas tidak hanya ditujukan kepada aparatur negara saja melainkan juga kepada masyarakat dan lembaga non pemerintah termasuk di dalamnya pembinaan arsip desa, arsip keluarga, dan arsip komunitas. Fokus pembinaan diarahkan pada kemampuan mengelola arsip secara digital. Sedangkan pada pengembangan SDM Kearsipan, perlu diupayakan pengembangan kompetensi berbasis kepakaran. Spesialisasi tidak bisa dihindari bila para Arsiparis diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi lingkungan kerjanya. Sedangkan terkait dengan pembinaan masyarakat perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kompetensi masyarakat dalam penciptaan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

- c. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan melalui strategi:
  - 1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan fasilitasi kearsipan, di era teknologi yang serba canggih ini, unit pelaksana layanan pendidikan dan pelayanan kearsipan menerapkan program pembelajaran jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan TIK atau aplikasi pengelolaan pembelajaran yang tersedia untuk menunjang proses pembelajaran dengan tidak mengurangi kualitas dan pencapaian tujuan pembelajaran; dan
  - Pelayanan Jasa Kearsipan. Sasaran pelayanan dan fasilitas kearsipan harus diperluas kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Unit pelaksana

pelayanan jasa kearsipan perlu didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar cakupan pelayanan dan fasilitasi kearsipan bisa lebih luas.

d. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan melalui strategi: pengawasan dan akreditasi kearsipan. Fokus pengawasan akan lebih diarahkan pada tindakan/perlakuan secara langsung kepada arsip untuk lebih menjamin tercipta dan tersedianya arsip yang terpercaya dan autentik.

#### 2. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 2 (S2)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional adalah peningkatan ketersediaan arsip melalui strategi:

- a. Akuisisi Arsip Nasional;
- b. Pengolahan Arsip Nasional;
- c. Preservasi Arsip Nasional; dan
- d. Pengelolaan Arsip Tsunami dan Arsip Statis di Daerah.

Tingkat ketersediaan arsip akan sangat dinamis karena pada waktu tertentu akan ada arsip yang baru tercipta dan ada pula arsip yang dimusnahkan sesuai prosedur atau termusnahkan karena bencana atau faktor eksternal lainnya. Untuk itu diperlukan beroperasinya sistem pelaporan terpusat sepanjang waktu atas ketersediaan arsip pada semua jenis dan semua jenjang agar diperoleh kepastian tentang jumlah dan profil arsip pada saat tertentu. Dengan demikian proses penggunaan dan pemanfaatan arsip pada tahap berikutnya dapat dilakukan secara optimal. Semua proses tersebut diharapkan dilakukan secara digital.

Hal lain yang perlu memperoleh perhatian di antaranya:

- 1) Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana;
- 2) Penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019;
- 3) Pembangunan Arsip Kepresidenan;
- 4) Penyelamatan dan pengelolaan arsip bernilai guna berkelanjutan di daerah, diantaranya dilakukan melalui pembangunan depot arsip berkelanjutan;

- 5) Pengembangan platform kearsipan di IKN Baru;
- 6) Pengelolaan arsip kementerian/lembaga yang pindah ke IKN baru, baik untuk arsip di IKN baru maupun lama.

Selain itu juga perlu dilaksanakan kegiatan terkait dengan pelestarian arsip milik masyarakat yang merupakan bagian dari memori kolektif dan jati diri bangsa. Di dunia internasional mulai menguat peran penting komunitas masyarakat dalam pengembangan khazanah arsip peradaban manusia.

#### 3. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 3 yaitu meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima adalah peningkatan pelayanan informasi kearsipan melalui strategi:

- a. Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Autentik;
- b. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- c. Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan; dan
- d. Penguatan strategi dan sistem pelayanan.

Perlu dikembangkan secara inovatif metode dan teknik baru dalam pengolahan arsip menjadi informasi serta pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip. Termasuk di antaranya pelaksanaan *public program* dan *outreach activities* (antara lain pameran, workshop, publikasi dan program pendidikan) dalam rangka pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa yang melibatkan semua komponen bangsa.

Selain itu, pemanfaatan arsip juga perlu didorong secara sungguh-sungguh sebagai bahan ajar oleh lembaga pendidikan. Termasuk upaya mendorong dan memastikan kesetaraan gender dan keberagaman dalam penyediaan layanan berkualitas serta akses informasi kearsipan untuk masyarakat luas tanpa diskriminasi, untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya informasi kearsipan. Dari sisi akses perlu dilakukan perlindungan secara khusus terhadap arsip yang mengandung data strategis negara.

 a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;

- Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;
- Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
- d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
- f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

#### 4. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 4 (S4)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis S4 yaitu terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI adalah Penguatan tata kelola ANRI yang efektif dan efisien melalui strategi:

- 1. Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum;
- 2. Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, Humas dan TU Pimpinan;
- 3. Pelayanan Umum; dan
- 4. Pengawasan Internal.

Penciptaan tata kelola yang efektif dan efisien diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ANRI baik kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM dalam

menyukseskan tahap transformasi digital penyelenggaraan kearsipan nasional.

#### **PROGRAM ANRI**

Keseluruhan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi ANRI harus dijabarkan secara lebih operasional agar dapat dilaksanakan. Rencana strategis tersebut dilaksanakan melalui beberapa program. Program ANRI pada 2020-2024 terdiri atas:

#### 1. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Sasaran program:

a. Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan

Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan" yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.

b. Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan
 Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya

kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan" yang dilaksanakan

melalui kegiatan:

- Pembinaan kearsipan lingkup pusat dengan sasaran kegiatan:
   Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Pusat;
- Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah timur dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Timur;
- Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah barat dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat;
- 4) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya SDM Kearsipan yang Mendapat Sertifikasi dan Penilaian Kinerja.

- c. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan
  - Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan" yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  - Pelayanan Jasa Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Jasa Kearsipan;
  - Pelayanan Pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
- d. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan

Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan" yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan dan akreditasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan instansi yang diawasi dan meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi.

- e. Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional
  - Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional" yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  - Akuisisi arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya khazanah arsip nasional;
  - 2) Pengolahanarsip nasional dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya arsip statis nasional yang diolah;
  - 3) Preservasi arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya jumlah arsip terjaga dan arsip statis nasional yang dipreservasi;
  - Pengelolaan arsip tsunami dan arsip statis di daerah dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya pelayanan arsip tsunami dan arsip statis di daerah.

- f. Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan.
  - Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima" yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  - Pelayanan dan pemanfaatan arsip dengan sasaran kegiatan:
     Meningkatnya Pengguna Layanan Arsip secara Nasional;
  - 2) Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa;
  - Pengelolaan data dan informasi kearsipan dengan sasaran kegiatan:
     Meningkatnya layanan data dan informasi kearsipan.

## 2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program:

Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI

Sasaran program ini terkait dengan semua Sasaran Strategis ANRI yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan organisasi, kepegawaian, dan hukum;
- Pelayanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan;
- c. Pelayanan umum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan umum;
- d. Pengawasan internal dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya pengawasan internal.

#### KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan

kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di kementerian/lembaga unit kearsipan serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun, pembinaan kearsipan masih kurang efektif karena belum lengkapnya peraturan perundangundangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan

- tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Perlindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan.
- 2. Terwujudnya perlindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi perlindungan dan penyelamatan arsip.
- 3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD serta semua pihak terkait.
- 4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

#### KERANGKA KELEMBAGAAN

### a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan tata kerja ANRI telah mengalami tiga kali perubahan dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proporsional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

#### b. Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan

h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan:

- 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
- Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
- 4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
  - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Selanjutnya Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- Pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- c. Pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- d. Pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- e. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perencanaan program dan anggaran serta pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### **ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu:

- Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI. Sekretariat Utama terdiri atas:
  - a. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
  - b. Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum;
  - c. Biro Umum; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas:
  - a. Direktorat Kearsipan Pusat;
  - b. Direktorat Kearsipan Daerah I;
  - c. Direktorat Kearsipan Daerah II;
  - d. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional. Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas:
  - a. Direktorat Akuisisi;
  - b. Direktorat Pengolahan;
  - c. Direktorat Preservasi;
  - d. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- 4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:
  - a. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
  - b. Pusat Data dan Informasi;
  - c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Selain itu terdapat empat unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Inspektorat, Pusat Akreditasi Kearsipan, dan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan dengan tugas sebagai berikut:

- 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan;
- Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan;
- 3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI; dan
- Pusat Akreditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akreditasi kearsipan;
- 5. Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi akuisisi, pengolahan, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis kepresidenan.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

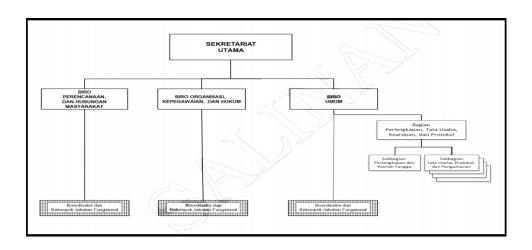
Tabel 5 Susunan Organisasi dan Pejabat Pimpinan Unit Kerja



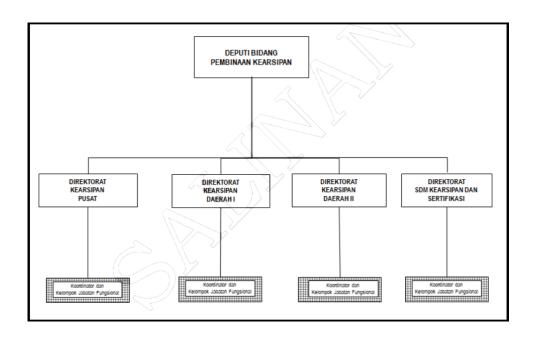
Sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia bahwa struktur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel 6 Struktur Organisasi per Eselon I ANRI

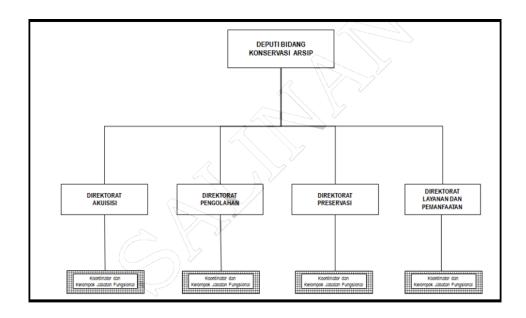
## A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



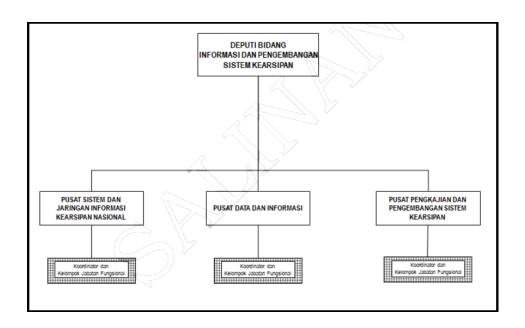
## B. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN



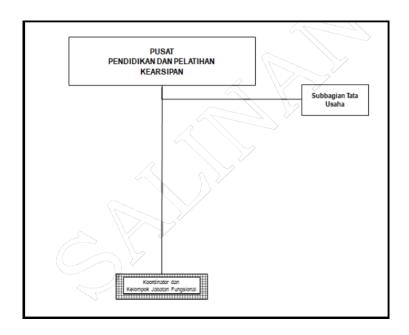
## C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP



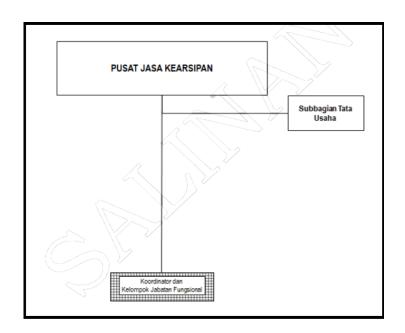
# D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN



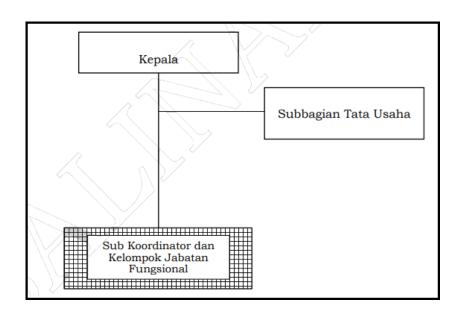
# A. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN



# **B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JASA KEARSIPAN**

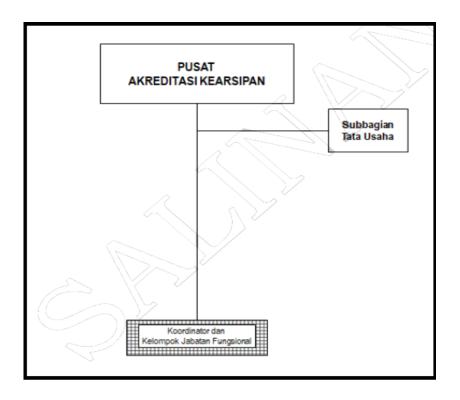


## C. STRUKTUR ORGANISASI BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI ACEH

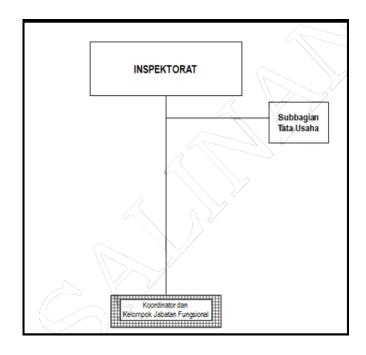


Tabel 8 Struktur Organisasi per Eselon II Mandiri ANRI

## A. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

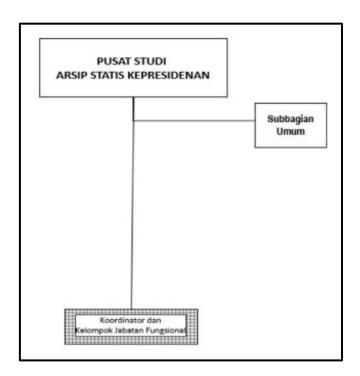


## **B. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT**



Tabel 9 Struktur Organisasi Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan

#### STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STUDI ARSIP STATIS KEPRESIDENAN



Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 633 orang. Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 10 Pegawai ANRI Menurut Penempatan

NO	PENEMPATAN	JUMLAH	%
1	PNS ANRI PUSAT	564	89,10
2	PNS ANRI PUSDIKLAT BOGOR	31	4,90
3	PNS ANRI GAJAH MADA	10	1,58
4	Balai Arsip Statis Tsunami Aceh	28	4,42
_	TOTAL	633	100,00

Tabel 11 Pegawai ANRI Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%	
1	Jabatan Struktural	33	5,21	
2	Jabatan Fungsional Tertentu	543	85,78	
3	Jabatan Fungsional Umum	49	7,74	
4	CPNS 8			
	TOTAL		100,00	

Tabel 12 Pegawai ANRI Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki-laki	293	46,29
2	Perempuan	340	53,71
TOTAL		633	100,00

Tabel 13 Pegawai ANRI Menurut Golongan

NO	Gol	JUMLAH	%
1	DOKTORAL (S3)	6	0,95
2	PASCA SARJANA (S2)	150	23,70
3	SARJANA (S-1)	302	47,71
4	DIPLOMA IV	24	3,79
5	DIPLOMA III	120	18,96
6	DIPLOMA I	6	0,95
7	SLTA	25	3,95
	TOTAL	633	100,00

## **TARGET KINERJA**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	ASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	
Tujuan ANRI:  Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Indeks Pemanfaatan Arsip	60
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	73
Sasaran Strategis 2:  Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	80
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	ВВ
PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
1 DDOCDANA DENIVELENICO A DA ANTIZEA DOLDANI NI ACIZ	DNAI	
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASI	JNAL	
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan	Indeks Kualitas	75 B
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan  Sasaran Program 2: Peningkatan	Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Kapabilitas	
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan  Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan  Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan	Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan Indeks Pelayanan dan	В
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan  Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan  Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan  Sasaran Program 4: Peningkatan akuntabilitas	Indeks Kualitas Kebijakan  Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan  Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan  Indeks Hasil Pengawasan	В
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan  Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan  Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan  Sasaran Program 4: Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan  Sasaran Program 5: Peningkatan ketersediaan arsip	Indeks Kualitas Kebijakan  Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan  Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan  Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan  Indeks Ketersediaan	B B
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan  Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan  Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan  Sasaran Program 4: Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan  Sasaran Program 5: Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional  Sasaran Program 6:	Indeks Kualitas Kebijakan  Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan  Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan  Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan  Indeks Ketersediaan Arsip Indeks Pelayanan	B B BB 80

Sasaran Program:	Kategori Nilai SAKIP	ВВ
Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI		
	Opini atas Laporan	WTP
	Keuangan	
	Indeks Layanan	Α
	Publik	
	Indeks Reformasi	BB
	Birokrasi	
	Indeks Sistem Merit	В
	Indeks SPBE	В

#### KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN, dilakukan penyusunan kerangka pendanaan yang mengacu pada pendekatan penganggaran terpadu (*unified budgeting*), pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan sistem penganggaran berjangka menengah (*medium term expenditure framework*).

Selain dari rupiah murni, ANRI juga berupaya memperoleh dana dari sumber alternatif di antaranya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sedangkan dalam pengelolaan belanja perlu peningkatan kualitas alokasi pendanaan untuk prioritas pembangunan yang dilakukan berdasarkan prinsip money follows program dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS). Selain itu juga dilakukan penguatan pengendalian dan sinergi pendanaan agar pemanfaatan sumber pendanaan dapat dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan. Hal demikian dapat dilakukan melalui berbagai agenda koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

,Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun jumlah Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di lingkup ANRI adalah 4 (empat) satker yang terdiri atas 3 (tiga) satker Kantor Pusat/KP dan 1 (satu) satker Kantor Daerah/KD.

Tabel 15 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

Kode	Kode Es I	Uraian		Jumla Kewer			Jumlah Satker
BA			KP	KD	DK	TP	Satker
087	01	Arsip Nasional RI	3	1	-	-	4
Jumlah		3	1	-	-	4	

## Basis Akuntansi

#### A.3. Basis Akuntansi

ANRI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

# Dasar Pengukuran

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan ANRI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

# Kebijakan Akuntansi

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ANRI adalah sebagai berikut:

# Pendapatan -LRA

## (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berupa penerimaan yang berasal dari:

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang bersifat umum meliputi:
  - 1) Penerimaan Kembali Belanja yang berasal dari pengembalian belanja (pegawai, barang dan modal) dari tahun anggaran yang lalu;
  - 2) Jasa Giro yang berasal dari dari jasa lembaga keuangan (perbankan) pada tahun berjalan;

- 3) Hasil penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak maupun dihapuskan dengan cara dijual melalui lelang;
- 4) Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (TP/TGR) yang berasal dari kewajiban oleh Bendahara maupun pegawai yang ditetapkan berdasarkan SK Penetapan.
- b) Penerimaan dari kegiatan pelayanan ANRI yang bersifat Fungsional pada:
  - 1) Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan pemberian jasa berupa:
    - 1.1. Jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (leaf casting/lining system, encapsulation), rewashing film/microfilm, recleaning video cassette dan alih media;
    - 1.2. Jasa Konsultansi/tenaga Ahli Kearsipan meliputi penataan kearsipan, layanan penataan record centre pusat dan pembuatan pedoman manual kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
    - 1.3. Jasa Penyimpanan arsip meliputi program aplikasi storage Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di Record Centre dan Pelayanan Peminjaman Arsip di Record Arsip.
  - 2) Direktorat Pemanfaatan memberikan layanan jasa berupa:
    - 2.1 Jasa penggandaan dan alih media meliputi fotocopy arsip, fotocopy referensi/Buku, Foto, Print Out mikrofilm ukuran A4, film, scanning arsip, alih media arsip kertas ke mikrofilm, reproduksi rekaman suara;
    - 2.2 Naskah Sumber Arsip dan sumber-sumber Sejarah meliputi penerbitan naskah sumber periode sebelum Republik Indonesia (VOC-Belanda), Penerbitan Naskah Sumber Periode Republik Indonesia (1945-sekarang), bentuk elektronik;
    - 2.3. Jasa Konsultasi/tenaga Ahli Kearsipan berupa penelusuran arsip dan penggandaan arsip.
  - 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang memberikan layanan jasa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan meliputi diklat fungsional arsiparis dan diklat teknis

kearsipan.

4) Biro Umum yang menyediakan layanan berupa jasa sewa ruangan pusdiklat dan jasa sewa gedung Gajah Mada.

## Pendapatan -LO

# (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
   Pendapatan yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari:

#### 2.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan yang diperoleh ANRI berasal dari kelompok PNBP Lainnya antara lain:

- a) Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN (pemanfaatan) dan luran Badan (4251). Tahun Anggaran 2022 ANRI diperoleh pendapatan yang berasal dari:
  - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi pada direktorat pemanfaatan;
  - Pendapatan dari sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)
     yang diperoleh dari persewaan gedung Arsip Gajah Mada yang
     merupakan pendapatan hasil tugas fungsi Biro Umum dan
     persewaan gedung dan kamar Pusdiklat Kearsipan Bogor.
  - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) yang berasal dari pembayaran PNBP di satker Pusdiklat Kearsipan Bogor diantaranya Sewa Kamar Dalam Rangka Diklat.
- b) Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254), pendapatan ini berasal dari Satker Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor

yang menjalankan tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421)
  merupakan jasa tenaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
  tugas dan fungsi masing-masing KL yang diberikan oleh Pusat
  Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan kepada
  pengguna/konsumen.
- c) Pendapatan Jasa Lainnya (4256) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi, ANRI merupakan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L (425692) yang diberikan oleh Pusat Jasa Kearsipan kepada pengguna/konsumen berupa jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (leaf casting/lining system, encapsulation), rewashing film/microfilm, recleaning video cassette dan alih media, jasa penyimpanan arsip meliputi program aplikasi storage Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di Record Centre dan Pelayanan Peminjaman Arsip di Record Arsip dan Direktorat Pemanfaatan dan Layanan Kearsipan berupa Jasa Penggandaan, Fotokopi dan Transkripsi.
- d) Pendapatan Denda (4258) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) merupakan pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yang biasa (umum) ada pada semua Kementerian/Lembaga

### 2.2 Pendapatan Non Operasional

- Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) merupakan pendapatan hasil penjualan lelang Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- b) Pendapatan lain-lain (4259) yang berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911), penerimaan

kembali belanja barang TAYL (425912) dan penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913) merupakan pengembalian atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang telah dilakukan di Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) namun akibat alasan dan kondisi tertentu menyebabkan pengembalian uang ke kas negara baru terjadi di Tahun Anggaran Berjalan (TAB).

## Belanja (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja yakni belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Beban (4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja meliputi:

- a) Beban Operasional yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisihan piutang tak tertagih;
- b) Beban Non Operasional meliputi beban pelepasan aset non lancar dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam CALK.

## Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### **5.1 Aset Lancar**

Aset lancar dapat diklasifikasikan menjadi kas, piutang Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR), dan Persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Piutang	telah	diserahkan	kepada
Panitia U	Irusan P	iutang Negar	a/DJKN

- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- e. Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan perpetual.

  Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode First In First Out

  (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Melalui metode ini saldo Persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) hingga tahun 2020, Kementerian Negara/Lembaga menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 234/PMK.05/2020, dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Direktur SITP Nomor ND-1152/PB.6/2020, penerapan metode penilaian FIFO (*First In First Out*) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga mulai tahun anggaran 2021.

#### Aset Tetap 5.2 Aset Tetap

Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

# Penyusutan Aset Tetap

## **5.3 Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

# Piutang Jangka Panjang

# 5.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### 5.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai aset lainnya sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; dan
- d. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat disajikan sebagai berikut:

Tabel 18 Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, dan Peta Tematik Lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Datar Teliti, dan Citra Satelit Resolusi Sedang, dan Atlas	10

Peta LLN Skala Menengah dan Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta RBI Skala Kecil, Peta LLN Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, dan Data Gayaberat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan dan Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, dan Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

## Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

## Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

## Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penerapan SAP

# (8) Penerapan SAP Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi COVID-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi COVID-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan. Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi COVID-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau *refocusing* anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi COVID-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangundangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi COVID-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan, kecuali tambahan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya.

Informasi Umum Pandemi COVID-19

# A.6. Informasi Umum dan Langkah-Langkah Pemerintah dalam Rangka Menghadapi Pandemi COVID-19

COVID-19 menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia, bermula dari Wuhan, ibukota Provinsi Hubei, China. Wabah COVID-19 memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Kegiatan sterilisasi dilakukan secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum.

Perilaku individu juga mendorong gerakan cuci tangan, *physical distancing*, dan memakai masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan COVID-19 ini.

Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19, yang terbesar adalah terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, sesuai amanat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 2 ayat (2), diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19, yang memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 dan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 43/PMK.05/2020 menyatakan bahwa seluruh belanja dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selama Tahun 2022 ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai

Automatic Adjustment. Automatic Adjustment adalah kebijakan pemerintah untuk mencadangkan anggaran yang ada pada kementerian/lembaga. Kebijakan ini menggantikan kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan tahun lalu. Pagu yang diblokir ini akan dijadikan dana darurat karena keadaan ekonomi dunia masih sulit diprediksi karena beberapa alasan, salah satunya adalah pandemi COVID-19.

Kebijakan *automatic adjustment* ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada pasal 28 ayat 2. Menindaklanjuti aturan tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan dua aturan mengenai *automatic adjustment* ini, yaitu:

- 1. Surat Menteri Keuangan RI No.S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 Hal *Automatic Adjustment* belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.
- Surat Menteri Keuangan RI No.S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 Hal Penambahan Automatic Adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan RI tersebut, ANRI melakukan 2 kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi DIPA ke-01 yang disahkan pada tanggal 13 Desember 2021, terdapat pencadangan anggaran 5% dari RM ANRI sebesar Rp13.379.646.000,00 terdiri dari Rp10.048.012.000,00 dari Program Dukungan Manajemen dan Rp3.331.634.000,00 dari Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.
- 2. Revisi DIPA ke-06 yang disahkan pada tanggal 6 Juni 2022, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp13.609.257.000,00

Pelaksanaan revisi anggaran berupa *automatic adjustment* dilakukan dengan berpedoman pada PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Pencadangan dilakukan dari pos anggaran dengan kriteria sumber dana Rupiah Murni (RM), di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, di luar belanja Anggaran Pendidikan, di luar belanja Perlinsos PB1, Bansos PKH, Bansos Kartu Sembako (Program untuk melindungi masyarakat miskin) dan dapat mencakup Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Modal yang belum

dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Instrumen kebijakan yang ada secara hakikat mendorong ANRI untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan dan/atau belanja-belanja yang tidak menjadi prioritas di masa ini. Anggaran ini dicadangkan dan tidak bisa digunakan hingga ketentuan lebih lanjut.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, Pasal 14 PMK Nomor 43/PMK.05/2020 mengatur bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menggunakan sistem aplikasi pelaporan, dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pasal 15 PMK Nomor 43/PMK.05/2020 menyatakan bahwa entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam CaLK sebagai bagian dari peristiwa luar biasa.

#### **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Pendapatan Rp18.868.813.156,00

#### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.868.813.156,00 atau mencapai 102,51 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.406.521.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022

Kode	Uraian —	31 Desember 2022			
Akun	<u> </u>	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	1.470.700.538,00	-	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	788.100.000,00	832.300.000,00	105,61	
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	8.842.630.000,00	9.018.500.000,00	101,99	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	8.775.791.000,00	7.102.698.117,00	80,94	
4258	Pendapatan Denda	-	125.876.900,00	-	
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	318.737.601,00	-	
	Jumlah	18.406.521.000,00	18.868.813.156,00	102,51	

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 untuk Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum mencapai 105,61 persen dari realisasi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mencapai 101,99 persen dari estimasi. Pendapatan Jasa Lainnya mencapai 80,94 persen dari estimasi. Pendapatan Denda, Pendapatan Lain-Lain, dan Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN tidak tercatat estimasi sehingga belum terukur terhadap realisasi pendapatannya. Selanjutnya Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan terdapat kenaikan sebesar 33,49 persen.

Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. ANRI sebagai salah satu instansi pengelola PNBP memiliki kewenangan untuk

menyelenggarakan pengelolaan PNBP dan mengenai tarif atas pemberian jenis jasa tertentu berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Satuan kerja dan unit kerja ANRI yang bertugas sebagai unit pengelola PNBP memiliki andil cukup besar dalam hal potensi penerimaan negara melalui pemberian layanan jasa kepada masyarakat umum/publik. Unit-unit terkait di antaranya Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi, Pusat Akreditasi Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, dan Pusat Pendikan dan Pelatihan Kearsipan.

Selama tahun anggaran 2022, realisasi PNBP dalam lingkup kerja ANRI secara umum mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021. Kenaikan realisasi tersebut dapat ditinjau lebih jauh pada akun-akun pendapatan yang secara umum berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan di tahun anggaran 2022. Pendapatan yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan klasifikasi pendapatan baik di dalam maupun di luar fungsi dan program institusi. Berikut disajikan gambaran umum pendapatan di masing-masing satuan kerja:



Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan Satuan Kerja TA 2022 dan 2021

Melalui grafik di atas dapat dipetakan komponen akun pendapatan yang berpengaruh cukup signifikan dengan capaian pengelolaan dan penyelenggaraan PNBP masing-masing satuan kerja, di antaranya:

- a. Satker ANRI Jakarta (450448) mengalami peningkatan nilai dalam kode akun pendapatan 425122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin), 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan), dan 425289 (Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya);
- Satker Pusdiklat Kearsipan (418934) mengalami peningkatan nilai dalam kode akun pendapatan 425421 (Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan);
- Satker Pusat Jasa Kearsipan (418929) mengalami penurunan nilai dalam kode akun pendapatan 425692 (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi).

Peningkatan dan/atau penurunan pendapatan yang terjadi selama tahun anggaran 2022 dipengaruhi langsung oleh penetapan target penerimaan pada tahap perencanaan dan juga berbagai faktor lainnya seperti pemulihan ekonomi, penurunan status PPKM, kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, kebutuhan tata kelola perusahaan yang baik dalam bidang kearsipan, dan sebagainya. Adapun rincian pendapatan yang diperoleh satuan kerja ANRI selama tahun anggaran 2022 akan dijelaskan lebih lanjut pada pos-pos pendapatan terkait.

Tabel 20 Kenaikan/Penurunan Pendapatan LRA

No.	Kode Satker Satuan Kerja	Tahun Anggaran		Kenaikan/	% Kenaikan/
		2022	2021	Penurunan (Rp)	(Penurunan)
1.	450448 Arsip Nasional RI Jakarta	2.850.668.956,00	1.441.161.375,00	1.409.507.581,00	97,80%
2.	681464 Balai Arsip Statis dan Tsunami	638.500,00	43.286.442,00	(42.647.942,00)	-98,52%
3.	418929 Pusat Jasa Kearsipan	6.997.467.400,00	7.417.992.800,00	(420.525.400,00)	-5,67%
4.	418934 Pusat Pendidikan Pelatihan dan Kearsipan	9.020.038.300,00	5.232.747.500,00	3.787.290.800,00	72,38%
Nilai Total Pendapatan-LRA		18.868.813.156,00	14.135.188.117,00	4.733.625.039,00	33,49%

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Pendapatan

Unaire	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
<u> </u>	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.470.700.538,00	792.510.888,00	678.189.650,00	85,57
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	832.300.000,00	308.500.000,00	523.800.000,00	169,79
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	9.018.500.000,00	5.221.340.000,00	3.797.160.000,00	72,72

Pendapatan Jasa Lainnya	7.102.698.117,00	7.707.446.860,00	(604.748.743,00)	(7,85)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	0,00	0,00
Pendapatan Denda	125.876.900,00	44.513.380,00	81.363.520,00	182,78
Pendapatan Lain-Lain	318.737.601,00	60.876.989,00	257.860.612,00	423,58
Jumlah	18.868.813.156,00	14.135.188.117,00	4.733.625.039,00	33,49

# B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan luran Badan Usaha

Tabel 22 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan dari Penjualan

Kode	Uraian —	Realisasi Pe	ndapatan	Kenaikan/Penuru	nan
Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Rp)	(%)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	9.540.000,00	3.660.000,00	5.880.000,00	160,66
	ANRI Jakarta	9.540.000,00	3.660.000,00	5.880.000,00	160,66
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	478.201.011,00	42.000.000,00	436.201.011,00	1.038,57
	ANRI Jakarta	478.201.011,00	42.000.000,00	436.201.011,00	1.038,57
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	90.750.888,00	-90.750.888,00	-100,00
	ANRI Jakarta	-	90.750.888,00	-90.750.888,00	-100,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	982.959.527,00	645.300.000,00	337.659.527,00	52,33
	ANRI Jakarta	982.959.527,00	645.300.000,00	337.659.527,00	52,33
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	10.800.000,00	-10.800.000,00	-100,00
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	<u> </u>	10.800.000,00	-10.800.000,00	-100,00
	Jumlah	1.470.700.538,00	792.510.888,00	678.189.650,00	85,57

Realisasi dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya; Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.470.700.538,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp678.189.650,00 atau 85,57 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

 Pendapatan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp9.540.000,00 berasal dari Direktorat Layanan & Pemanfaatan satuan kerja ANRI Jakarta yakni berupa Hasil Penerbitan Naskah Sumber Periode RI (1945 - Sekarang); Hasil Penerbitan Naskah

- Sumber Periode Sebelum RI (VOC Belanda); dan Jasa Penggandaan, Reproduksi, dan Transkripsi. Jenis PNBP ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.880.000,00 atau 160,66 persen;
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp478.201.011,00 berasal dari Biro Umum satuan kerja ANRI Jakarta yakni berupa:

TGL DOK	NTPN	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	
07/07/2022 80	CE76U8EC2L5NVV	Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan	33.288.000,00	
		dinas a.n. S sesuai Surat Menteri Keuangan No.		
		S.55/MK-6/KNL.0705/2022 tgl 30 Juni 2022		
09/08/2022 01	3E961QUHJACRBM	Hasil Bersih Lelang RL 483/29/2022 ANRI 2 Lot	57.829.999,00	
		Laku Pelelang a.n. A.K		
30/08/2022 36	A1461QUHJULGDK	Hasil Bersih Lelang RL 519/29/2022 3 Lot Laku	100.417.000,00	
		ANRI Pelelang a.n. A.K		
31/08/2022 45	6DC7QLU6ONI8IU	Hasil Bersih Lelang RL 520/29/2022 6 Lot Laku	286.666.012,00	
		ANRI Pelelang a.n. A.B		
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			

3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp982.959.527,00 berasal dari Biro Umum satuan kerja ANRI Jakarta yang diperoleh dari pemanfaatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan ANRI berupa sewa Gedung Gajah Mada oleh masyarakat umum dan sewa rumah dinas ANRI oleh pejabat Eselon I ANRI. Jenis PNBP ini mengalami kenaikan sebesar Rp337.659.527,00 atau 52,33 persen.

Pendapatan Sewa Rumah Dinas ANRI selama TA 2022					
Kode Periode	Nomor Dokumen	Deskripsi	Nilai		
2022-12	221391502001890	Potongan SPM 02449A	(643.246,00)		
2022-10	221391502001614	Potongan SPM 01730A	(1.286.492,00)		
2022-11	221391502001754	Potongan SPM 02059A	(1.286.492,00)		
Total Pendapatan Sewa Rumah Dinas ANRI (3.216.230,00)					
Dasar Pemotongan: I	Dasar Pemotongan: KEPKA ANRI No. 343 Tahun 2022 Tgl. 23 Agustus 2022				

#### **B.1.2 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum**

Tabel 23 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Kode	Uraian -	Realisasi Pe	ndapatan	Kenaikan/Penuruna	an
Akun	Ul didii	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Rp)	(%)
425281	Pendapatan Akreditasi	307.000.000,00	245.600.000,00	61.400.000,00	25,00
	ANRI Jakarta	307.000.000,00	245.600.000,00	61.400.000,00	25,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	525.300.000,00	62.900.000,00	462.400.000,00	735,14
	ANRI Jakarta	525.300.000,00	62.900.000,00	462.400.000,00	735,14
	Jumlah	832.300.000,00	308.500.000,00	523.800.000,00	169,79

Realisasi dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp832.300.000,00 atau mencapai 105,61 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp788.100.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp523.800.000,00 atau 169,79 persen. Pendapatan Akreditasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa akreditasi kearsipan kepada badan/lembaga dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya berasal dari pemberian jasa sertifikasi SDM kearsipan kepada badan/lembaga.

#### B.1.3 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Tabel 24 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Kode Uraian		Realisasi Pe	Realisasi Pendapatan		an
Akun	Uldidil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Rp)	(%)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	9.018.500.000,00	5.221.340.000,00	3.797.160.000,00	72,72
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	9.018.500.000,00	5.221.340.000,00	3.797.160.000,00	72,72
	Jumlah	9.018.500.000,00	5.221.340.000,00	3.797.160.000,00	72,72

Realisasi dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.018.500.000,00 atau mencapai 101,99 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp8.842.630.000. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.797.160.000,00 atau 72,72 persen. Rincian realisasi tersebut berupa PNBP atas pelaksanaan diklat teknis dan lainnya pada satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor. Adapun kenaikan pendapatan tersebut disebabkan karena telah dilakukannya penyesuaian metode pembelajaran dan pelatihan kearsipan dari metode tatap muka/klasikal menjadi metode pembelajaran jarak jauh sehingga target penerimaan PNBP dapat terukur, terarah dan tercapai.

#### **B.1.4 Pendapatan Jasa Lainnya**

Tabel 25 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya

Kode	Uraian -	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penuruna	an
Akun	Ul didii	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Rp)	(%)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	7.102.698.117,00	7.707.446.860,00	-604.748.743,00	-7,85
	ANRI Jakarta	330.766.817,00	288.845.060,00	41.921.757,00	14,51
	BAST Aceh	638.500,00	609.000,00	29.500,00	4,84
	Pusat Jasa Kearsipan	6.771.292.800,00	7.417.992.800,00	-646.700.000,00	-8,72
	Jumlah	7.102.698.117,00	7.707.446.860,00	-604.748.743,00	-7,85

Realisasi dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.102.698.117 atau mencapai 80,94 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp8.775.791.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp604.748.743,00) atau -7,85 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp330.766.817,00 berasal dari Direktorat Layanan & Pemanfaatan satuan kerja ANRI Jakarta yang diperoleh dari pemberian layanan jasa penggandaan, reproduksi, dan transkripsi kepada masyarakat;
- Pendapatan sebesar Rp638.500,00 berasal dari satuan kerja BAST yang diperoleh dari layanan peminjaman dan penggandaan arsip pada Seksi Layanan dan Pemanfaatan BAST. Adapun pendapatan tersebut merupakan PNBP Lainnya yakni pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2019;
- 3. Pendapatan sebesar Rp6.771.292.800,00 berasal dari satuan kerja Pusat Jasa Kearsipan. Adapun rincian realisasi pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian realisasi pendapatan Layanan Jasa Kearsipan

URAIAN	NILAI
Jasa Penyimpanan Arsip	4.251.579.800
Jasa Pemeliharaan & Perawatan Arsip	1.330.413.000
Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan	300.000.000
Jasa Pembenahan/Penataan Arsip	889.300.000
Jasa Pembuatan Sistem Aplikasi Kearsipan	0
JUMLAH	6.771.292.800

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp646.700.000,00 yang disebabkan oleh menurunnya frekuensi pengguna jasa kearsipan (jasa penyimpanan arsip, jasa pemeliharaan dan perawatan arsip, jasa pembuatan pedoman kearsipan, dan jasa pembenahan/penataan arsip serta pembuatan sistem aplikasi kearsipan) selama tahun anggaran 2022.

#### **B.1.5 Pendapatan Denda**

Tabel 27 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Denda

Kode	Uraian	Realisasi Penda	patan	Kenaikan/Penurunan	
Akun	Ordidii	2022	2021	(Rp)	(%)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	125.876.900,00	44.513.380,00	81.363.520,00	182,78
	ANRI Jakarta	125.876.900,00	1.835.938,00	124.040.962,00	6.756,27
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	-	-	0,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan	-	-	0,00	0,00
	BAST Aceh	-	42.677.442,00	(42.677.442,00)	(100,00)
	Jumlah	125.876.900,00	44.513.380,00	81.363.520,00	182,78

Realisasi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp125.876.900,00 dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp81.363.520,00 atau 182,78 persen. Adapun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah tersebut berasal dari satuan kerja ANRI Jakarta yang merupakan pembayaran denda keterlambatan atas pengadaan peralatan restorasi arsip TA. 2021 sesuai kontrak Nomor PL.01/473.08/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

#### **B.1.7 Pendapatan Lain-Lain**

Tabel 28 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Lain-lain

Kode	Urajan —	Realisasi Pe	ndapatan	Kenaikan/Penur	n/Penurunan	
Akun	Uraian	2022	2021	(Rp)	(%)	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.768.000,00	9.614.300,00	(4.846.300,00)	(50,41)	
	ANRI Jakarta	4.768.000,00	9.614.300,00	(4.846.300,00)	(50,41)	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	256.059.403,00	37.627.989,00	218.431.414,00	580,50	
	ANRI Jakarta	28.346.503,00	37.020.489,00	(8.673.986,00)	(23,43)	
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	1.538.300,00	607.500,00	930.800,00	153,22	
	Pusat Jasa Kearsipan	226.174.600,00	-	226.174.600,00	0,00	
	BAST Aceh	-	-	0,00	0,00	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	52.462.998,00	-	52.462.998,00	0,00	
	ANRI Jakarta	52.462.998,00	-	52.462.998,00	0,00	
	BAST Aceh	-	-	0,00	0,00	
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	5.447.200,00	13.634.700,00	(8.187.500,00)	(60,05)	
	ANRI Jakarta	5.447.200,00	13.634.700,00	(8.187.500,00)	(60,05)	
	Jumlah	318.737.601,00	60.876.989,00	257.860.612,00	423,58	

Realisasi dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu; Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp318.737.601,00 dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp257.860.612,00 atau 423,58 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pada satuan kerja ANRI Jakarta sebesar Rp4.768.000,00 yang merupakan setoran kembali perorangan atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai di TA 2021;
- 2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp256.059.403,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

KODE SATKER	SATUAN KERJA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
450448	ANRI Jakarta		28.346.503,00
418929	Pusat Jasa Kearsipan		226.174.600,00
418934	Pusdiklat Kearsipan		1.538.300,00
	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		

- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada satuan kerja ANRI Jakarta sebesar Rp52.462.998,00 yang merupakan setoran kembali perorangan atas kelebihan pembayaran Belanja Modal di TA 2021;
- 4. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada satuan kerja ANRI Jakarta sebesar Rp5.447.200,00 merupakan setoran kas negara yang berasal dari PT. Taspen (Persero) atas pemotongan secara rutin/berkala terhadap kelebihan pembayaran Belanja Pegawai (a.n. N dan S.F) yang terjadi di TA 2020.

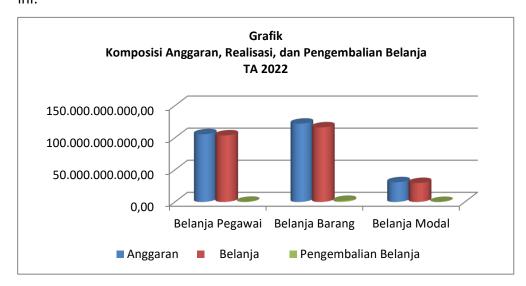
#### **B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja Negara (neto) sebesar Rp247.549.140.859,00 atau mencapai 95,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp258.301.947.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut:

31 Desember 2022 Kode Uraian Akun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi Anggaran (%) 105.511.248.000,00 103.461.190.132,00 51 Belanja Pegawai 98,06 52 Belanja Barang 122.035.836.000,00 114.560.896.150,00 93,87 Belanja Modal 30.754.863.000,00 29.527.054.577,00 96,01 Jumlah 258.301.947.000,00 247.549.140.859,00 95,84

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 5,46 persen dibandingkan pada TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp5.027.327.865,00 atau 5,11 persen;
- Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar
   Rp36.255.777.506,00 atau 46,30 persen;
- c. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp28.460.032.160,00) atau -49,08 persen.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

Uraian -	Realisasi B	Realisasi Belanja Kenaikan/Penuruna		
Of didit	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	103.461.190.132,00	98.433.862.267,00	5.027.327.865,00	5,11
Belanja Barang	114.560.896.150,00	78.305.118.644,00	36.255.777.506,00	46,30
Belanja Modal	29.527.054.577,00	57.987.086.737,00	-28.460.032.160,00	-49,08
Jumlah	247.549.140.859,00	234.726.067.648,00	12.823.073.211,00	5,46

Belanja Pegawai Rp103.461.190.132,00

# **B.3.** Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah Rp103.461.190.132,00 atau sebesar 98,06 persen dari pagu anggaran Rp105.511.248.000,00. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021, Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp5.027.327.865,00 atau 5,11 persen. Anggaran Belanja Pegawai hanya terdapat pada Satker ANRI Jakarta. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 31 Desember 2022 dan perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2022

Kode	Uraian	31 Desember 2022			
Akun	Oraran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	52.334.748.000,00	50.623.494.586,00	96,73	
5122	Belanja Lembur	228.576.000,00	147.469.000,00	64,52	
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.947.924.000,00	52.947.917.669,00	100,00	
Ju	ımlah Belanja Pegawai Bruto	105.511.248.000,00	103.718.881.255,00		
Pengembalian Belanja Pegawai		-	(257.691.123,00)	0,00	
Jumlah Belanja Pegawai Netto		105.511.248.000,00	103.461.190.132,00	98,06	

Tabel 33 Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	Ul didii	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	50.365.803.463,00	50.491.245.030,00	-125.441.567,00	-0,25
5122	Belanja Lembur	147.469.000,00	178.218.000,00	-30.749.000,00	-17,25
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.947.917.669,00	47.764.399.237,00	5.183.518.432,00	10,85
J	umlah Belanja Pegawai Netto	103.461.190.132,00	98.433.862.267,00	5.027.327.865,00	5,11

# **B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.365.803.463,00 atau 96,24 persen dari anggaran sebesar Rp52.334.748.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp125.441.567,00) atau -0,25 persen.

Tabel 34 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PNS

Kode	Destru	Realisasi Be	elanja	Kenaikan/Penurun	an
Akun	Uraian —	2022	2021	(Rp)	(%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30.676.247.980,00	30.797.476.260,00	-121.228.280,00	-0,39
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	434.732,00	438.364,00	-3.632,00	-0,83
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.030.757.910,00	2.050.438.700,00	-19.680.790,00	-0,96
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	513.927.884,00	514.557.732,00	-629.848,00	-0,12
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.824.620.000,00	2.004.520.000,00	-179.900.000,00	-8,97
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.124.320.000,00	4.103.260.000,00	1.021.060.000,00	24,88
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	389.825.720,00	354.010.014,00	35.815.706,00	10,12
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.590.198.360,00	1.617.645.540,00	-27.447.180,00	-1,70
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.768.707.000,00	5.316.367.000,00	-547.660.000,00	-10,30
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.530.080.000,00	3.437.540.000,00	92.540.000,00	2,69
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	174.375.000,00	296.420.000,00	-122.045.000,00	-41,17
	Jumlah Belanja Bruto	50.623.494.586,00	50.492.673.610,00	130.820.976,00	0,26
	Pengembalian Belanja	(257.691.123,00)	(1.428.580,00)	-256.262.543,00	17.938,27
	Jumlah	50.365.803.463,00	50.491.245.030,00	-125.441.567,00	-0,25

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.365.803.463,00 sedangkan Beban Gaji dan Tunjangan PNS (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp50.376.892.053,00 terdapat selisih Rp11.088.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35 Selisih Belanja LRA dengan LO Gaji dan Tunjangan PNS

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA da	ın LO (Rp)
Belanja/E	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	50.623.494.586,00	50.376.892.053,00	246.602.533,00	Ket. Selisih
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30.676.247.980,00	30.676.247.980,00	-	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	434.732,00	430.429,00	4.303,00	(PB): 4.443,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.030.757.910,00	2.030.757.910,00	Ē	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	513.927.884,00	513.927.884,00	-	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.824.620.000,00	1.579.638.320,00	244.981.680,00	(PB)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.124.320.000,00	5.195.765.000,00	(71.445.000,00)	(PB): 555.000,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	389.825.720,00	391.737.720,00	(1.912.000,00)	

511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.590.198.360,00	1.590.198.360,00	-	
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.768.707.000,00	4.705.883.450,00	62.823.550,00	
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.530.080.000,00	3.527.280.000,00	2.800.000,00	(PB)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	174.375.000,00	165.025.000,00	9.350.000,00	(PB)
Pengembalian Belanja		(257.691.123,00)	-	(257.691.123,00)	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	(4.443,00)	-	(4.443,00)	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	(244.981.680,00)	-	(244.981.680,00)	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	(555.000,00)	-	(555.000,00)	
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	(2.800.000,00)	-	(2.800.000,00)	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	(9.350.000,00)	-	(9.350.000,00)	
	Jumlah Belanja/Beban Neto	50.365.803.463,00	50.376.892.053,00	(11.088.590,00)	

\*) PB: Pengembalian Belanja

Sistem aplikasi SAKTI menerapkan prinsip *net value* pada beban atas setiap pengembalian belanja/beban dalam pencatatan berbasis akrual sehingga nilai beban yang tertera dalam laporan neraca percobaan akrual merupakan nilai neto yakni nilai bruto dikurangi dengan pengembalian beban tahun berjalan. Sementara itu, nilai belanja disajikan secara terpisah dengan nilai pengembalian belanja tahun berjalan dalam pencatatan berbasis kas pada laporan neraca percobaan kas.

Perbedaan nilai selisih LRA dan LO diakibatkan oleh pengembalian belanja yang dapat diidentifikasi langsung dengan nilai pengembalian belanja pada kolom "Ket. Selisih". Adapun selisih Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS (neto) lainnya sebesar Rp11.088.590,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian satker ANRI Jakarta dengan nomor dokumen GLP-009, 027, 028, 029, dan 039. Penjelasan lebih lanjut terkait Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dapat dilihat dalam Catatan Penting Lainnya atas LRA.

#### **B.3.2** Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp147.469.000,00 atau 64,52 persen dari anggaran sebesar Rp228.576.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp30.749.000,00) atau -17,25 persen.

Tabel 36 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Lembur

Kode	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
Akun	Ordidil	2022	2021	(Rp)	(%)
512211	Belanja Uang Lembur	147.469.000,00	178.218.000,00	-30.749.000,00	-17,25
	Jumlah Belanja Bruto	147.469.000,00	178.218.000,00	-30.749.000,00	-17,25
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	147.469.000,00	178.218.000,00	-30.749.000,00	-17,25

Tabel 37 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Lembur

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Lembur		147.469.000,00	147.469.000,00	
512211	Belanja Uang Lembur	147.469.000,00	147.469.000,00	-
Pengemba	alian Belanja/Beban		-	-
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-
	Jumlah Belanja/Beban Neto	147.469.000,00	147.469.000,00	-

# **B.3.3** Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.947.917.669,00 atau 100 persen dari anggaran sebesar Rp52.947.924.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp5.183.518.432 atau 10,85 persen. Peningkatan tersebut merupakan salah satu dampak dari diberlakukannya Permen PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang menyebabkan beberapa penyesuaian penghasilan dan/atau kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan bagi pegawai negeri sipil.

Tabel 38 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus)

Kode	Uraian —	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan		
Akun	Uraidfi	2022	2021	(Rp)	(%)	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52.947.917.669,00	47.764.399.237,00	5.183.518.432,00	10,85	
	Jumlah Belanja Bruto	52.947.917.669,00	47.764.399.237,00	5.183.518.432,00	10,85	
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00	
	Jumlah	52.947.917.669,00	47.764.399.237,00	5.183.518.432,00	10,85	

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.947.917.669,00 sedangkan Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp52.881.424.918,00 terdapat selisih Rp66.492.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Tunj. Khusus & Pegawai Transito

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Tunj. Khusus & Pegawai Transito		52.947.917.669,00	52.881.424.918,00	66.492.751,00
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52.947.917.669,00	52.881.424.918,00	66.492.751,00
Pengemb	alian Belanja/Beban			
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	Jumlah Belanja/Beban Neto	52.947.917.669,00	52.881.424.918,00	66.492.751,00

Selisih Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan Khusus & Pegawai Transito sebesar Rp66.492.751,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan oleh adanya jurnal penyesuaian satker ANRI Jakarta periode Desember 2022 dengan nomor dokumen: GLP-007, 008, 037, 038, dan 040. Penjelasan lebih lanjut terkait Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito dapat dilihat dalam Catatan Penting Lainnya atas LRA.

Belanja Barang Rp114.560.896.150,00

#### **B.4** Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah Rp114.560.896.150,00 atau sebesar 93,87 persen dari pagu anggaran Rp122.035.836.000,00. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp36.255.777.506,00 atau 46,30 persen.

Rincian realisasi Belanja Barang TA 2022 dan perbandingan Belanja Barang (neto) per 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022

Kode			31 Desember 2022	
Akun	Uraian -	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
5211	Belanja Barang Operasional	21.510.065.000,00	21.054.121.999,00	97,88
5212	Belanja Barang Non Operasional	14.902.958.000,00	13.864.459.277,00	93,03
5218	Belanja Barang Persediaan	5.785.068.000,00	5.670.147.041,00	98,01
5221	Belanja Jasa	33.602.209.000,00	31.523.013.989,00	93,81
5231	Belanja Pemeliharaan	13.406.004.000,00	12.728.061.679,00	94,94
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.886.504.000,00	30.461.991.937,00	95,53
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	943.028.000,00	939.954.117,00	99,67
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
J	umlah Belanja Barang Bruto	122.035.836.000,00	116.241.750.039,00	95,25
Pengemb	alian Belanja Barang		(1.680.853.889,00)	
5211	Belanja Barang Operasional		1.425.000,00	
5212	Belanja Barang Non Operasional		13.717.500,00	
5221	Belanja Jasa		44.028.664,00	
5231	Belanja Pemeliharaan		2.971.000,00	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri		1.600.009.212,00	
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri		18.702.513,00	
	Jumlah Belanja Barang Neto	122.035.836.000,00	114.560.896.150,00	93,87

Tabel 41 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode	Uraian —	Realisasi Be	elanja	Kenaikan/Penurunan	
Akun	Ordidii	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
5211	Belanja Barang Operasional	21.052.696.999,00	19.762.166.274,00	1.290.530.725,00	6,53
5212	Belanja Barang Non Operasional	13.850.741.777,00	11.529.009.219,00	2.321.732.558,00	20,14
5218	Belanja Barang Persediaan	5.670.147.041,00	4.837.109.371,00	833.037.670,00	17,22
5221	Belanja Jasa	31.478.985.325,00	18.472.689.575,00	13.006.295.750,00	70,41
5231	Belanja Pemeliharaan	12.725.090.679,00	10.600.907.465,00	2.124.183.214,00	20,04
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	28.861.982.725,00	13.103.236.740,00	15.758.745.985,00	120,27
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	921.251.604,00	-	921.251.604,00	0,00
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang Neto	114.560.896.150,00	78.305.118.644,00	36.255.777.506,00	46,30

#### **B.4.1** Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.052.696.999,00 atau 97,87 persen dari anggaran sebesar Rp21.510.065.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.290.530.725,00 atau 6,53 persen. Peningkatan dengan nilai signifikan dalam pos belanja barang operasional terjadi pada aktivitas keperluan perkantoran yang mengindikasikan meningkatnya intensitas pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 42 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Barang Operasional

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto 2022	Realisasi Belanja Neto 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.804.243.264,00	-	17.804.243.264,00	15.199.438.705,00	2.604.804.559,00	17,14
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	874.932.000,00	-	874.932.000,00	877.517.719,00	(2.585.719,00)	(0,29)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159.916.658,00	-	159.916.658,00	146.292.895,00	13.623.763,00	9,31
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	801.220.000,00	1.425.000,00	799.795.000,00	1.047.394.000,00	(247.599.000,00)	(23,64)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.132.692.077,00	-	1.132.692.077,00	669.754.054,00	462.938.023,00	69,12
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan	281.118.000,00	-	281.118.000,00	1.821.768.901,00	(1.540.650.901,00)	(84,57)
	Pandemi Covid-19						
	Jumlah	21.054.121.999,00	1.425.000,00	21.052.696.999,00	19.762.166.274,00	1.290.530.725,00	6,53

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.052.696.999,00 sedangkan Beban Barang Operasional (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp21.068.751.527,00 terdapat selisih (Rp16.054.528,00) yang disebabkan pengembalian belanja barang honor operasional satker dan jurnal penyesuaian beban atas pemanfaatan yang telah dilakukan namun belum dilakukan pembayaran.

ANRI mengalokasikan Belanja Barang Operasional untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp281.515.000,00 dengan penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp281.118.000,00,00 atau sebesar 99,86 persen dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp397.000,00.

No.	No. SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Akun	Keterangan				Nilai (Rp)
1	02142A	221391303038610	21/10/2022	521131	Pengadaan	Covid	Kit	Kegiatan	110.322.000,00
					Penanganan C19 di ANRI sesuai SPK No				
					PL.01/917.06	/2022 Tang	ggal 30/	9/2022	
2	03474A	221391303054717	26/12/2022	521131	Pengadaan	Covid	Kit	Kegiatan	170.796.000,00
	Penanganan C19 di ANRI sesuai SPK No.					ai SPK No.			
	PL.01/1465.06/2022 Tanggal 13/12/2022					/12/2022			
TOTAL NILAI								281.118.000,00	

# **B.4.2** Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.850.741.777,00 atau 92,94 persen dari anggaran sebesar Rp14.902.958.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp2.321.732.558,00 atau 20,14 persen. Peningkatan dengan nilai signifikan dalam pos belanja barang operasional terjadi pada belanja bahan yang umumnya digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (habis pakai). Hal tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas belanja barang operasional

atas pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2022. Selain itu, peningkatan nilai juga terlihat pada belanja honor output kegiatan atas pelaksanaan tugas-tugas tertentu bersifat koordinatif yang mengikutsertakan eselon l/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya.

Tabel 43 Perbandingan Belanja Barang Non Operasional TA 2022 dan TA 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto 2022	Realisasi Belanja Neto 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
521211	Belanja Bahan	8.623.375.560,00	-	8.623.375.560,00	5.803.943.188,00	2.819.432.372,00	48,58
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.419.750.000,00	13.717.500,00	3.406.032.500,00	3.032.820.750,00	373.211.750,00	12,31
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.722.080.602,00	-	1.722.080.602,00	1.911.455.746,00	(189.375.144,00)	(9,91)
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-	123.000.000,00	(123.000.000,00)	(100,00)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	99.253.115,00	-	99.253.115,00	-	99.253.115,00	-
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	657.789.535,00	(657.789.535,00)	(100,00)
	Jumlah	13.864.459.277,00	13.717.500,00	13.850.741.777,00	11.529.009.219,00	2.321.732.558,00	20,14

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.850.741.777,00 sedangkan Beban Barang Non Operasional (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp13.847.047.837,00 sehingga terdapat selisih Rp3.693.940,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Barang Non Operasional

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA da	n LO (Rp)
Belanja/E	Beban Barang Non Operasional	13.864.459.277,00	13.847.047.837,00	17.411.440,00	Ket. Selisih
521211	Belanja Bahan	8.623.375.560,00	8.623.375.560,00	-	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.419.750.000,00	3.406.032.500,00	13.717.500,00	(PB)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.722.080.602,00	1.723.671.862,00	(1.591.260,00)	
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	-	-	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	99.253.115,00	93.967.915,00	5.285.200,00	
Pengembalian Belanja		(13.717.500,00)	-	(13.717.500,00)	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	(13.717.500,00)	-	(13.717.500,00)	
	Jumlah Belanja/Beban Neto	13.850.741.777,00	13.847.047.837,00	3.693.940,00	

\*) PB: Pengembalian Belanja

Selisih Belanja/Beban Barang Non Operasional sebesar Rp3.693.940,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan karena adanya jurnal penyesuaian mengenai selisih kurs dan pengembalian belanja barang honor output kegiatan.

Tabel 45 Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

NO. SPM	NO. SP2D	TANGGAL SP2D	URAIAN BELANJA		NILAI KURS TRANSAKSI	NILAI KURS PELAPORAN	SELISIH NILAI KURS BELANJA
ANRI Jaka	rta (450448)						
01553A	221391102000002	23/08/2022	Iuran Keanggotaan Organisasi International ICA	€ 9.000	Rp 14.881,26	Rp 15.063,60	Rp 1.641.060,00
			Tahun 2022				
01554A	221391101000092	23/08/2022	Iuran Keanggotaan Organisasi Internationa	\$ 330	Rp 14.882,00	Rp 14.822,00	Rp (19.800,00)
			SEAPAVAA Tahun 2022				
01555A	221391101000093	23/08/2022	Iuran Keanggotaan Organisasi Internationa	l \$ 500	Rp 14.882,00	Rp 14.822,00	Rp (30.000,00)
			SARBICA Tahun 2022				
	Pendapatan/Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi R						

Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih (ekuitas).

Perbedaan antara kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan. Kenaikan/penurunan nilai tercatat pos moneter yang disebabkan oleh adanya selisih kurs yang belum direalisasikan tidak diakui/dicatat sebagai pendapatan/belanja melainkan diakui/dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas pada neraca.

Selisih Belanja/Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomtabel sebesar Rp5.285.200,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya koreksi SPM pada satker Pusat Jasa Kearsipan berupa perubahan akun belanja semula menggunakan akun 532111 menjadi 521252 sebesar Rp19.447.200,00, jurnal koreksi manual pada satker BAST atas reklasifikasi persediaan ke dalam aset tetap ekstrakomtabel sebesar (Rp3.506.000,00), dan jurnal koreksi manual pada satker ANRI Jakarta atas reklasifikasi nilai Gedung F ke dalam nilai Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel) sebesar (Rp10.656.000,00).

#### **B.4.3 Belanja Barang Persediaan**

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.670.147.041,00 atau 98,01 persen dari anggaran sebesar Rp5.785.068.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara

keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp833.037.670,00 atau 17,22 persen.

Tabel 46 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Barang Persediaan

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja	Pengembalian	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja	Kenaikan/	%
Kode Akun	Oralan	Bruto	Belanja	Neto 2022	Neto 2021	Penurunan	70
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.439.437.041,00	-	5.439.437.041,00	4.670.661.371,00	768.775.670,00	16,46
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	230.710.000,00	-	230.710.000,00	166.448.000,00	64.262.000,00	38,61
	Jumlah	5.670.147.041,00		5.670.147.041,00	4.837.109.371,00	833.037.670,00	17,22

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.670.147.041,00 sedangkan Beban Persediaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp5.508.470.190,00 terdapat selisih Rp161.676.851,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 47 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Barang Persediaan

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/E	Beban Barang Persediaan	5.670.147.041,00	5.508.470.190,00	161.676.851,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.439.437.041,00	000	5.439.437.041,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	230.710.000,00	000	230.710.000,00
593111	Beban Persediaan konsumsi	000	5.504.515.691,00	(5.504.515.691,00)
593131	Beban Persediaan bahan baku	000	2.515.000,00	(2.515.000,00)
593149	Beban Persediaan Lainnya	000	1.439.499,00	(1.439.499,00)
Pengemb	alian Belanja/Beban	-	-	-
J	umlah Belanja/Beban Neto	5.670.147.041,00	5.508.470.190,00	161.676.851,00

Selisih Belanja/Beban Barang Persediaan sebesar Rp161.676.851,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya perbedaan pengakuan mengenai belanja pada LRA dan beban pada LO. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Barang Persediaan diakui saat terjadinya aktivitas kas keluar sementara dalam Laporan Operasional (LO) Barang Persediaan baru akan diakui sebagai beban saat terjadinya pemakaian atas Barang Persediaan tersebut.

ANRI mengalokasikan Belanja Barang Persediaan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp237.392.000,00 dengan penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp230.710.000,00 atau sebesar 97,19 persen dari alokasi anggaran, dan sisa anggaran sebesar Rp6.682.000,00. Belanja barang persediaan digunakan untuk pengadaan

yang berhubungan dengan penanganan covid-19 di lingkungan ANRI diantaranya vaksinasi booster dan pengadaan alat swab antigen.

#### **B.4.4** Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.478.985.325,00 atau 93,68 persen dari anggaran sebesar Rp33.602.209.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp13.006.295.750,00 atau 70,41 persen. Peningkatan nilai yang signifikan pada belanja jasa terjadi pada halhal sebagai berikut:

- Belanja Jasa Konsultan (522131). Peningkatan kebutuhan jasa konsultasi atas pengadaan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Kearsipan dan Penyusunan Pedoman Big Data Kearsipan Nasional di satker ANRI Jakarta;
- Belanja Sewa (522141). Peningkatan kebutuhan pengadaan Sewa Kendaraan Dinas di satker ANRI Jakarta;
- Belanja Jasa Profesi (522151). Peningkatan kebutuhan menghadirkan narasumber dari kalangan profesi/praktisi/ahli untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan/atau peningkatan kompetensi SDM pegawai;
- Belanja Jasa Lainnya (522191). Peningkatan kebutuhan jasa pihak ketiga atas berbagai pengadaan dengan nilai cukup signifikan, diantaranya: Jasa Alih Media Arsip Kertas, Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional 2022, Fumigasi Gedung E-F-G TA 2022, Identifikasi-Pengumpulan-Pengolahan-Penyajian Data Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Tahun 2022, Audit TIK, dan Sosialisasi Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 di Indonesia pada satker ANRI Jakarta.

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto 2022	Realisasi Belanja Neto 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
522111	Belanja Langganan Listrik	9.055.084.015,00	-	9.055.084.015,00	7.262.665.206,00	1.792.418.809,00	24,68
522112	Belanja Langganan Telepon	40.357.931,00	-	40.357.931,00	40.355.643,00	2.288,00	0,01
522113	Belanja Langganan Air	100.186.470,00	-	100.186.470,00	121.094.630,00	(20.908.160,00)	(17,27)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.177.642,00	-	3.177.642,00	2.942.626,00	235.016,00	7,99
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	22.122.600,00	-	22.122.600,00	55.067.200,00	(32.944.600,00)	(59,83)
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.075.623.800,00	-	1.075.623.800,00	443.179.000,00	632.444.800,00	142,71
522141	Belanja Sewa	4.342.100.632,00	-	4.342.100.632,00	1.919.756.350,00	2.422.344.282,00	126,18
522151	Belanja Jasa Profesi	4.211.800.000,00	20.855.000,00	4.190.945.000,00	3.164.865.000,00	1.026.080.000,00	32,42
522191	Belanja Jasa Lainnya	12.018.629.871,00	-	12.018.629.871,00	4.173.123.101,00	7.845.506.770,00	188,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	653.931.028,00	23.173.664,00	630.757.364,00	1.289.640.819,00	(658.883.455,00)	(51,09)
	Jumlah	31.523.013.989,00	44.028.664,00	31.478.985.325,00	18.472.689.575,00	13.006.295.750,00	70,41

ANRI mengalokasikan Belanja Jasa untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp799.908.000,00 dengan penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp653.931.028,00 dan pengembalian belanja sebesar Rp23.173.664,00 atau sebesar 78,85 persen dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp169.150.636,00. Realisasi anggaran diperuntukan keperluan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan ANRI dan kebutuhan *rapid test/swab antigen/swab PCR/*skrining pegawai dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan keperluan perjalanan dinas.

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.478.985.325,00 sedangkan Beban Jasa (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp31.671.690.218,00 terdapat selisih (Rp192.704.893,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Jasa

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp	
Belanja/B	Beban Jasa	31.523.013.989,00	31.671.690.218,00	(148.676.229,00)	Ket. Selisih
522111	Belanja Langganan Listrik	9.055.084.015,00	9.244.622.825,00	(189.538.810,00)	
522112	Belanja Langganan Telepon	40.357.931,00	40.469.944,00	(112.013,00)	
522113	Belanja Langganan Air	100.186.470,00	103.540.540,00	(3.354.070,00)	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.177.642,00	3.177.642,00	-	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	22.122.600,00	22.122.600,00	-	
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.075.623.800,00	1.075.623.800,00	-	
522141	Belanja Sewa	4.342.100.632,00	4.342.100.632,00	-	
522151	Belanja Jasa Profesi	4.211.800.000,00	4.190.945.000,00	20.855.000,00	(PB)
522191	Belanja Jasa Lainnya	12.018.629.871,00	12.018.329.871,00	300.000,00	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	653.931.028,00	630.757.364,00	23.173.664,00	(PB)
Pengemba	alian Belanja	(44.028.664,00)	-	(44.028.664,00)	
522151	Belanja Jasa Profesi	(20.855.000,00)	-	(20.855.000,00)	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	(23.173.664,00)	-	(23.173.664,00)	
	Jumlah Belanja/Beban Neto	31.478.985.325,00	31.671.690.218,00	(192.704.893,00)	

\*) PB: Pengembalian Belanja

Selisih Belanja/Beban Jasa sebesar (Rp192.704.893,00) antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 50 Rincian Jurnal Beban/Belanja Langganan Listrik

Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)				
Satker	Jumlah			
450448   ANRI Jakarta	175.993.536,00			
681464   Balai Arsip Statis dan Tsunami	16.075.043,00			
418929   Pusat Jasa Kearsipan	(4.622.194,00)			
418934   Pusdiklat Kearsipan	2.092.425,00			
Jumlah Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)	189.538.810,00			

Tabel 51 Rincian Jurnal Beban/Belanja Langganan Telepon

Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)				
Satker	Jumlah			
450448   ANRI Jakarta	120.494,00			
681464   Balai Arsip Statis dan Tsunami	4.610,00			
418929   Pusat Jasa Kearsipan	(20.259,00)			
418934  Pusdiklat Kearsipan	7.168,00			
Jumlah Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)	112.013,00			

Tabel 52 Rincian Jurnal Beban/Belanja Langganan Air

Beban/Belanja Langganan Air (522113)				
Satker	Jumlah			
450448  ANRI Jakarta	3.616.830,00			
681464  Balai Arsip Statis dan Tsunami	25.240,00			
418934   Pusdiklat Kearsipan	(288.000,00)			
Jumlah Beban/Belanja Langganan Air (522113)	3.354.070,00			

Tabel 53 Rincian Jurnal Beban/Belanja Jasa Lainnya

Beban/Belanja Jasa Lainnya (522191)	
Satker	Jumlah
418934   Pusdiklat Kearsipan	(300.000,00)
Jumlah Beban/Belanja Jasa Lainnya (522191)	(300.000,00)

# **B.4.5** Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.725.090.679 atau 94,92 persen dari anggaran sebesar Rp13.406.004.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp2.124.183.214,00 atau 20,04 persen.

Tabel 54 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto 2022	Realisasi Belanja Neto 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.878.956.575,00	980.000,00	5.877.976.575,00	4.526.646.042,00	1.351.330.533,00	29,85
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	482.526.048,00	-	482.526.048,00	333.331.105,00	149.194.943,00	44,76
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	253.081.890,00	-	253.081.890,00	607.396.535,00	(354.314.645,00)	(58,33)
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87.036.377,00	-	87.036.377,00	192.348.860,00	(105.312.483,00)	(54,75)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.742.554.514,00	1.991.000,00	3.740.563.514,00	1.916.867.393,00	1.823.696.121,00	95,14
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486.950.000,00	-	486.950.000,00	942.000.000,00	(455.050.000,00)	(48,31)
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.063.214.155,00	-	1.063.214.155,00	1.850.743.880,00	(787.529.725,00)	(42,55)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	733.742.120,00	-	733.742.120,00	231.573.650,00	502.168.470,00	216,85
	Jumlah	12.728.061.679,00	2.971.000,00	12.725.090.679,00	10.600.907.465,00	2.124.183.214,00	20,04

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.725.090.679,00 sedangkan Beban Pemeliharaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp11.956.165.236,00 terdapat selisih Rp768.925.443,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 55 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/E	Beban Pemeliharaan	12.728.061.679,00	11.956.165.236,00	771.896.443,00 Ket. Selisih
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.878.956.575,00	5.268.217.847,00	610.738.728,00 (PB): 980.000
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	482.526.048,00	000	482.526.048,00
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	253.081.890,00	253.081.890,00	-
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87.036.377,00	87.036.377,00	-
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.742.554.514,00	3.618.544.214,00	124.010.300,00 (PB): 1.991.000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486.950.000,00	000	486.950.000,00
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.063.214.155,00	1.063.214.155,00	-
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	733.742.120,00	733.742.120,00	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	000	932.328.633,00	(932.328.633,00)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	000	-	-
Pengemb	alian Belanja	(2.971.000,00)		(2.971.000,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(980.000,00)	-	(980.000,00)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(1.991.000,00)	-	(1.991.000,00)
	Jumlah Belanja/Beban Neto	12.725.090.679,00	11.956.165.236,00	768.925.443,00
				*) DP: Pangambalian Palania

\*) PB: Pengembalian Belanja

Bagian selisih Belanja/Beban Pemeliharaan sebesar Rp37.147.415,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional merupakan selisih Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp482.526.048,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp486.950.000,00, dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar (Rp932.328.633,00) yang akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Bagian selisih Belanja/Beban Pemeliharaan sebesar Rp731.778.028,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)					
Satker	Nilai (Rp)				
681464   Balai Arsip Statis dan Tsunami	(341.933.200)				
418929   Pusat Jasa Kearsipan	(69.402.528)				
418934   Pusdiklat Kearsipan	(162.348.000)				
450448   ANRI Jakarta	(36.075.000)				
Jumlah	(609.758.728)				
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)					
Satker	Nilai (Rp)				
681464   Balai Arsip Statis dan Tsunami	(122.019.300)				

#### **B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri**

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.861.982.725,00 atau 90,51 persen dari anggaran sebesar Rp31.886.504.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp15.758.745.985,00 atau 120,27 persen. Kegiatan perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dalam rangka kepentingan negara, pelaksanaan tugas kantor, dan pencapaian target/output mengalami peningkatan selama tahun anggaran 2022 menyusul pelonggaran kebijakan pemerintah dalam hal bepergian di masa pandemi *COVID-19*.

Tabel 56 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja	Pengembalian	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja	Kenaikan/	%
Roue Akuii	Oldidii	Bruto	Belanja	Neto 2022	Neto 2021	Penurunan	70
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13.912.831.918	1.244.816.686	12.668.015.232	4.658.357.919	8.009.657.313	171,94
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	729.948.000	2.700.000	727.248.000	533.663.000	193.585.000	36,27
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.284.690.000	56.250.000	8.228.440.000	4.661.961.000	3.566.479.000	76,50
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	-	-	0,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.534.522.019	296.242.526	7.238.279.493	3.249.254.821	3.989.024.672	122,77
	Jumlah	30.461.991.937		28.861.982.725	13.103.236.740	15.758.745.985	120,27

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.861.982.725,00 sedangkan Beban Perjalanan Dalam Negeri (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp28.859.204.725,00 sehingga terdapat selisih Rp2.778.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Perjalanan Dalam Negeri

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA (	Selisih LRA dan LO (Rp)	
Belanja/E	Beban Perjalanan Dalam Negeri	30.461.991.937,00	28.859.204.725,00	1.602.787.212,00	Ket. Selisih	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13.912.831.918,00	12.665.237.232,00	1.247.594.686,00	(PB): 1.244.816.686	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	729.948.000,00	727.248.000,00	2.700.000,00	(PB)	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.284.690.000,00	8.228.440.000,00	56.250.000,00	(PB)	
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	-	-		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.534.522.019,00	7.238.279.493,00	296.242.526,00	(PB)	
Pengemba	alian Belanja	(1.600.009.212,00)	-	(1.600.009.212,00)		
524111	Belanja Perjalanan Biasa	(1.244.816.686,00)	-	(1.244.816.686,00)		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(2.700.000,00)	-	(2.700.000,00)		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(56.250.000,00)	-	(56.250.000,00)		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(296.242.526,00)	-	(296.242.526,00)		
	Jumlah Belanja/Beban Neto	28.861.982.725,00	28.859.204.725,00	2.778.000,00		

\*) PB: Pengembalian Belanja

Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.778.000,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

	Beban/Belanja Perjalanan Biasa (524111)						
Nomor Jurnal	Nilai (Rp)						
BALAI ARSIP STATIS I	BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI (681464)						
23/GLP-681464-	Koreksi manual antar beban (beban perjalanan dinas biasa menjadi beban	(2.778.000)					
143274725	pemeliharaan peralatan dan mesin) berdasarkan hasil pemeriksaan APIP						
	Jumlah	(2.778.000)					

# **B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri**

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp921.251.604,00 atau 97,69 persen dari anggaran sebesar Rp943.028.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp921.251.604,00.

Tabel 58 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

Uraian	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto 2022	Realisasi Belanja Neto 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	584.632.470,00	14.091.347,00	570.541.123,00	-	570.541.123,00	-
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	355.321.647,00	4.611.166,00	350.710.481,00	-	350.710.481,00	-
Jumlah	939.954.117,00		921.251.604,00	-	921.251.604,00	-

No. SPM	Akun	No. SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Nilai
ANRI Jakai	rta				
00758A	524219	221391302019103	09/06/2022	Perjadin LN a.n. Florentinus,dkk (2 org) Kunjungan ke SRADV di Vietnam Tgl. 8-11 Juni 2022	64.692.928,00
00759A	524211	221391302019102	09/06/2022	Perjadin LN a.n. Imam Gunarto,dkk (2 org) Kunjungan ke SRADV di Vietnam Tgl. 8-11 Juni 2022	73.471.728,00
00761A	524219	221391302019101	09/06/2022	Perjadin LN a.n. Kandar,dkk (2 org) Kunjungan ke SRADV di Vietnam Tgl. 8-11 Juni 2022	71.544.128,00
01944A	524211	221391302043159	03/10/2022	Perjadin Luar Negeri a.n. Imam G,dkk (4 org) Penandatanganan MOC dan Pembahasan Program Kerja Sama di <mark>Saudi Arabia</mark>	292.039.972,00
01946A	524219	221391302043160	03/10/2022	Perjadin Luar Negeri a.n. Dipo W,dkk (2 org) Penandatanganan MOC dan Pembahasan Program Kerja Sama di Saudi Arabia	117.017.728,00
02359A	524211	221391302053723	11/11/2022	Perjadin LN Menghadiri Undangan Kegiatan THE 9TH MOWCAP General Meeting dan Tugas Komite Nasional MOW di Korea Selatan a.n. Imam G,dkk (4 org)	219.120.770,00
02368A	524219	221391302053698	11/11/2022	Perjadin LN Menghadiri Undangan Kegiatan THE 9TH MOWCAP General Meeting dan Tugas Komite Nasional MOW di Korea Selatan a.n. Annarizky Putri	43.206.016,00
02840A	524219	221391302062606	08/12/2022	Perjadin a.n. Victorino M,dkk (7 org) Seminar Internasional Penominasian Arsip Pendirian ASEAN menjadi MOW	40.140.000,00
03433A	524219	221391302070395	20/12/2022	Perjadin Rini Agustiani,dkk (10 org) Seminar Internasional Penominasian Arsip Pendirian ASEAN menjadi MOW	18.720.847,00
				TOTAL	939.954.117,00

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp921.251.604,00 sedangkan Beban Perjalanan Luar Negeri (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp921.251.604,00 tidak terdapat selisih Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 59 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Perjalanan Luar Negeri

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dar	ı LO (Rp)
Belanja/E	Beban Perjalanan Luar Negeri	939.954.117,00	921.251.604,00	18.702.513,00	Ket. Selisih
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	584.632.470,00	570.541.123,00	14.091.347,00	(PB)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	355.321.647,00	350.710.481,00	4.611.166,00	(PB)
Pengemb	alian Belanja	(18.702.513,00)	-	(18.702.513,00)	
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(14.091.347,00)	-	(14.091.347,00)	
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(4.611.166,00)	-	(4.611.166,00)	
	Jumlah Belanja/Beban Neto	921.251.604,00	921.251.604,00	-	

\*) PB: Pengembalian Belanja

#### B.4.8 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp9.644.450,00. Penjelasan mengenai Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Tabel 60 Selisih LRA dan LO Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)	
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		-	9.644.450,00	-	
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	-	-	
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	000	9.644.450,00	(9.644.450,00)	
	Jumlah		9.644.450,00	(9.644.450,00) (100	0,00)

# **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah Rp29.527.054.577,00 atau sebesar 96,01 persen dari pagu anggaran Rp30.754.863.000,00. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp28.460.032.160,00) atau -49,08 persen.

Rincian realisasi Belanja Modal TA 31 Desember 2022 dan perbandingan Belanja Modal (neto) 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Kode	Uraian —	31 Desember 2022				
Akun		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)		
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.619.394.000,00	20.252.401.310,00	98,22		
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.017.234.000,00	2.706.409.937,00	89,70		
5361	Belanja Modal Lainnya	7.118.235.000,00	6.568.503.330,00	92,28		
	Jumlah Belanja Modal Bruto	30.754.863.000,00	29.527.314.577,00			
Pengemb	alian Belanja Modal	-	(260.000,00)			
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	260.000,00			
	Jumlah Belanja Modal Netto	30.754.863.000,00	29.527.054.577,00	96,01		

Tabel 62 Perbandingan Belanja Modal TA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode	Uraian -	Realisasi E	Kenaikan/Penurunan		
Akun	Grafair	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.252.401.310,00	49.596.467.323,00	(29.344.066.013,00)	(59,17)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.706.149.937,00	2.944.904.876,00	(238.754.939,00)	(8,11)
5361	Belanja Modal Lainnya	6.568.503.330,00	5.445.714.538,00	1.122.788.792,00	20,62
١	lumlah Belanja Modal Netto	29.527.054.577,00	57.987.086.737,00	(28.460.032.160,00)	(49,08)

#### **B.5.1** Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.252.401.310,00 atau 98,22 persen dari anggaran sebesar Rp20.619.394.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp29.344.066.013,00) atau -59,17 persen.

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode	Urajan —	Realisasi I	Belanja	Kenaikan/Penurunan	
Akun	Oralan	2022	2021	(Rp)	(%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.252.401.310,00	49.596.467.323,00	-29.344.066.013,00	-59,17
	ANRI Jakarta (KP)	17.928.545.800,00	40.913.038.683,00	-22.984.492.883,00	-56,18
	BAST Aceh (KD)	751.627.000,00	7.970.002.860,00	-7.218.375.860,00	-90,57
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	277.945.440,00	320.899.324,00	-42.953.884,00	-13,39
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	1.294.283.070,00	392.526.456,00	901.756.614,00	229,73
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00	-	0,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-	-	0,00	0,00
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	-	0,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	-	-	0,00	0,00
	BAST Aceh (KD)	-	-	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	20.252.401.310,00	49.596.467.323,00	-29.344.066.013,00	-59,17
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	20.252.401.310,00	49.596.467.323,00	-29.344.066.013,00	-59,17

# **B.5.2** Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.706.149.937,00 atau 89,69 persen dari anggaran sebesar Rp3.017.234.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp238.754.939,00) atau -8,11 persen.

Tabel 64 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan

Kode	Uraian -	Realisasi E	Selanja	Kenaikan/Penurunan		
Akun	Uldidil	2022	2021	(Rp)	(%)	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	-	0,00	0,00	
	ANRI Jakarta (KP)	-	-	0,00	0,00	
	BAST Aceh (KD)	-	-	0,00	0,00	
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	-	0,00	0,00	
	ANRI Jakarta (KP)	-	-	0,00	0,00	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.706.409.937,00	3.056.466.876,00	(350.056.939,00)	(11,45)	
	ANRI Jakarta (KP)	2.278.300.858,00	3.056.466.876,00	(778.166.018,00)	(25,46)	
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	428.109.079,00	-	428.109.079,00	0,00	
	Jumlah Belanja Bruto	2.706.409.937,00	3.056.466.876,00	(350.056.939,00)	(11,45)	
Pengemba	ilian Belanja	(260.000,00)	(111.562.000,00)	111.302.000,00	(99,77)	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	260.000,00	111.562.000,00	(111.302.000,00)	(99,77)	
	ANRI Jakarta (KP)	260.000,00	111.562.000,00	(111.302.000,00)	(99,77)	
	Jumlah	2.706.149.937,00	2.944.904.876,00	(238.754.939,00)	(8,11)	

#### **B.5.3** Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.568.503.330,00 atau 92,28 persen dari anggaran sebesar Rp7.118.235.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.122.788.792,00 atau 20,62 persen.

Tabel 65 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian —	Realisasi	Belanja	Kenaikan/Penurunan		
Akun	Uldidii	2022	2021	(Rp)	(%)	
536111	Belanja Modal Lainnya	3.026.617.650,00	4.466.406.538,00	-1.439.788.888,00	-32,24	
	ANRI Jakarta (KP)	2.983.267.650,00	4.466.406.538,00	-1.483.138.888,00	-33,21	
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	43.350.000,00	-	43.350.000,00	0,00	
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	-	0,00	0,00	
	ANRI Jakarta (KP)	-	-	0,00	0,00	
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	3.541.885.680,00	979.308.000,00	2.562.577.680,00	261,67	
	ANRI Jakarta (KP)	3.541.885.680,00	979.308.000,00	2.562.577.680,00	261,67	
	Jumlah Belanja Bruto	6.568.503.330,00	5.445.714.538,00	1.122.788.792,00	20,62	
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00	
	Jumlah	6.568.503.330,00	5.445.714.538,00	1.122.788.792,00	20,62	

Belanja Bantuan Sosial Rp0,00

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Pada ANRI tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial.

#### **Catatan Penting Lainnya atas LRA**

# I. Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

Tabel 66 Belanja Akun Penanganan Pandemi COVID-19

V00=		ARSIP NASIONAL RI					
KODE AKUN	URAIAN AKUN KHUSUS COVID-19	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(3) - (4)		
52	Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	1.318.815.000	1.142.585.364	86,64%	176.229.636		
521131	Belanja Barang Operasional	281.515.000	281.118.000	99,86%	397.000		
521241	Belanja Barang Non Operasional	-	-	0,00%	-		
521841	Belanja Barang Persediaan	237.392.000	230.710.000	97,19%	6.682.000		
522192	Belanja Jasa	799.908.000	653.931.028	70.050/	169.150.636		
	Pengembalian Belanja Jasa		(23.173.664)	78,85%	169.150.636		
524115	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	0,00%	-		
53	Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19	-	•	0,00%	-		
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%	-		
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%	-		
536118	Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00%	-		
	TOTAL BELANJA (52 + 53)	1.318.815.000	1.142.585.364	86,64%	176.229.636		

Pada TA 2022, ANRI mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.318.815.000,00 untuk **Belanja Barang – Penanganan Pandemi COVID-19** dengan realisasi anggaran (neto) sebesar Rp1.142.585.364,00 atau 86,64% persen dari pagu anggaran.

# II. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang dimaksud adalah gaji induk. Gaji induk merupakan gaji yang dibayarkan (dimuka) secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

#### a. Gaji pokok

Gaji pokok merupakan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Bagan akun standar mengatur penggunaan akun pembayaran gaji pokok dengan kode 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS).

b. Tunjangan yang melekat pada gaji
 Pegawai negeri sipil diberikan tunjangan yang melekat pada gaji pokok

terdiri dari:

- Tunjangan keluarga, yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang telah berkeluarga berupa Tunjangan Suami/Istri (kode akun 511121) dan Tunjangan Anak (kode akun 511122);
- Tunjangan jabatan/struktural, yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural berupa Tunjangan Struktural PNS (kode akun 511123);
- Tunjangan fungsional, yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional berupa Tunjangan Fungsional PNS (kode akun 511124);
- Tunjangan pajak penghasilan, yakni tunjangan pajak pegawai yang ditanggung oleh negara yang dihitung berdasarkan jumlah gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji berupa Tunjangan PPh PNS (kode akun 511125);
- Tunjangan pangan, yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku berupa Tunjangan Beras PNS (kode akun 511126);
- Tunjangan risiko bahaya atas pekerjaan, yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut tanggungjawab yang tinggi, namun senantiasa dihadapkan dengan dampak risiko bahaya kesehatan atas dirinya berupa Tunjangan Kompensasi Kerja PNS (kode akun 511134);
- Tunjangan umum, yakni tunjangan bagi pegawai yang tidak menerima tunjangan jabatan/struktural atau tunjangan fungsional tertentu berupa Tunjangan Umum PNS (kode akun 511151).

#### RINCIAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN MELEKAT PEGAWAI ANRI TA 2022

Kode Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	31.375.595.000,00	30.676.247.980,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.035.668.000,00	2.030.757.910,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	515.475.000,00	513.927.884,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.870.919.000,00	1.824.620.000,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.487.777.000,00	5.124.320.000,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS *)	417.631.000,00	389.825.720,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.595.220.000,00	1.590.198.360,00
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.634.680.000,00	3.530.080.000,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	174.931.000,00	174.375.000,00
Jumlah B	elanja	47.107.896.000,00	45.854.352.854,00

<sup>\*)</sup> Nilai belanja tunjangan PPh PNS sebesar Rp389.825.720,00 merupakan potongan PPh 21 pegawai yang ditanggung oleh negara atas gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok PNS.

#### III. Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja

Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil setelah bulan/periode kerja berjalan berakhir dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu dalam pembayarannya. Bagan akun standar mengatur penggunaan akun pembayaran tunjangan kinerja dengan kode 512411 (Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)).

	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI ANRI TA 2022						
Kode Akun	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Neto	Potongan PPh 21	Penerimaan Neto Pegawai ANRI		
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	52.947.924.000,00	52.947.917.669,00	4.483.857.163,00	48.464.060.506,00		
Jumlah Belanja 52.947.924.000,00 52.947.917.669,00 4.483.857.163,00 48.464.060.506,00							

#### **IV. Prioritas Nasional Tahun 2022**

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup output meliputi output strategis dan non output strategis. Output strategis merupakan output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah sesuai Rencana Kerja Pemerintah dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Non output strategis

merupakan output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga yang tidak termasuk kategori output strategis.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional IV dan Prioritas Nasional VII dari tujuh Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Sampai dengan 31 Desember 2022, ANRI mengelola 90 output (level RO) dengan enam output Prioritas Nasional (level RO). Keenam output Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

Output Prioritas Nasional ANRI Tahun 2022

No	Kode	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Prior	ritas Nasional	IV: Revolusi Mental dan	Pembangunan Kebu	dayaan					
1	3624.UAA.001	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah	480.000.000	461.150.500	96,07	10.000	Arsip	8.432	84%
2	3620.UAA.001	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diselamatkan	1.500.000.000	1.463.541.150	97,57	10.000	Dokumen	8.432	84%
3	3623.UAA.001	Arsip penanganan pandemi covid-19 di Indonesia yang didokumentasi dan dipublikasi	1.550.000.000	1.285.070.350	82,91	4	Dokumen	4	100%
	J	umlah	3.530.000.000	3.209.762.000	90,93%				
Prior	ritas Nasional	VII: Memperkuat Stabili	tas Polhukhankam d	an Transformasi F	Pelayana	n Publik			
1	6660.QDB.001	Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1.019.085.000	997.602.934	97,89	53	Lembaga	53	100%
2	6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2.850.250.000	2.582.133.656	90,59	85	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	85	100%
3	6660.UBA.001	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	3.294.420.000	3.216.058.500	97,62	80	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	80	100%
	J	umlah	7.163.755.000	6.795.795.090	94,86%				
	То	tal Nilai	10.693.755.000	10.005.557.090	93,56%				

Output Prioritas Nasional ANRI berada dalam Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit Eselon II terkait diantaranya:

# a. Pembinaan Kearsipan Nasional – 6660

Kegiatan Pembinaan Kearsipan Nasional berada di bawah ruang lingkup kerja Direktorat Kearsipan Pusat dengan uraian Output Strategis (level RO) berupa *Instansi Pemerintah yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)* (KRO/RO: QDB.001) dan target kinerja sebanyak 53 Lembaga. Sampai dengan 31 Desember 2022, capaian instansi Pemerintah yang telah menerapkan aplikasi SRIKANDI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Kementerian Negara/Lembaga	No.	Kementerian Negara/Lembaga
1	Kementerian Dalam Negeri	28	Kementerian Perhubungan
2	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	29	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Badan Kepegawaian Nasional	30	Ombudsman RI
4	Badan Pengawas Obat dan Makanan	31	Tentara Nasional Indonesia (TNI)
5	Lembaga Administrasi Negara	32	Komisi Informasi Pusat (KIP)
6	Komisi Yudisial	33	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	34	Kementerian Pertahanan RI
8	Majelis Permusyawaratan Rakyat	35	Radio Republik Indonesia (RRI)
9	Kementerian Pertanian	36	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Badan Keamanan Laut	37	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
			Pemerintahan
11	Kementerian Pemuda dan Olahraga	38	Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional
12	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
13	Kementerian Perindustrian	40	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
14	Badan Informasi Geospasial	41	Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)
15	Kementerian Desa PDTT	42	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
16	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	43	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			(KOMINFO)
17	Dewan Perwakilan Daerah	44	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	Badan Pusat Statistik (BPS)	45	Badan Narkotika Nasional (BNN)
19	Kementerian BUMN	46	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20	Kementerian PAN dan RB-RI	47	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP
			TAPERA)
21	Kementerian Agama RI	48	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
			Perlindungan Anak
	Kementerian Luar Negeri	49	Kementerian Perdagangan
23	Komisi Pemilihan Umum	50	Televisi Republik Indonesia
24	Kemenko Perekonomian	51	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
25	Dewan Perwakilan Rakyat RI	52	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
26	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	53	Badan Zakat Nasional (BAZNAS)
27	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan		
	(PPATK)		

#### b. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah - 6660

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah berada di bawah ruang lingkup kerja Direktorat Kearsipan Daerah I dengan uraian Output

Strategis (level RO) berupa *Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)* (KRO/RO: UBA.001) dan target kinerja sebanyak 80 Daerah (Prov/Kab/Kota).

#### c. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah – 6660

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah berada di bawah ruang lingkup kerja Direktorat Kearsipan Daerah II dengan uraian Output Strategis (level RO) berupa *Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)* (KRO/RO: UBA.002) dan target kinerja sebanyak 85 Daerah (Prov/Kab/Kota). Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat Kearsipan Daerah II melakukan langkah-langkah selama pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

- Bimbingan teknis penerapan aplikasi Srikandi secara online 27 29 Juni 2022;
- Bimbingan Teknis Pengisian Konfigurasi di 34 lokasi dengan target 85 kabupaten/kota (Februari-Desember 2022);
- Sosialisasi/Rapat Koordinasi Implementasi E-Arsip Terintegrasi (12 13 Juli 2022 di Batam);
- Workshop Implementasi E-Arsip Terintegrasi (18 Juli 2022 di Jakarta);
- FGD Sharing Knowledge Penerapan Aplikasi SRIKANDI (16 Agustus 2022 daring);
- Konsinyering penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan
   Aplikasi SRIKANDI (18 19 Agustus 2022 di Bogor);
- FGD Penyusunan Instrumen SKKAD (13 Desember 2022).

Sampai dengan 31 Desember 2022, capaian instansi Pemerintah Daerah wilayah barat yang telah menerapkan aplikasi SRIKANDI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	No.	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Provinsi Aceh	44	Kota Depok
2	Provinsi Sumatera Utara	45	Kota Cimahi
3	Kota Medan	46	Kabupaten Bandung

4	Kabupaten Langkat	47	Kabupaten Sukabumi
5	Kabupaten Serdang Bedagai	48	Kota Sukabumi
6	Kota Tebingtinggi	49	Kabupaten Purwakarta
7	Kabupaten Karo	50	Kabupaten Subang
8	Kabupaten Dairi	51	Kabupaten Sumedang
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	52	Kota Cirebon
10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	53	Kabupaten Cirebon
11	Kabupaten Padang Lawas Utara	54	Kabupaten Majalengka
12	Kota Padang	55	Kabupaten Ciamis
13	Kabupaten Padang Pariaman	56	Kabupaten Tasikmalaya
14	Kabupaten Agam	57	Kota Tasikmalaya
15	Kota Bukittinggi	58	Provinsi Banten
16	Kabupaten Pasaman Barat	59	Kota Cilegon
17	Kabupaten Tanah Datar	60	Kabupaten Tangerang
18	Kota Solok	61	Provinsi DKI Jakarta
19	Kabupaten Solok	62	Kabupaten Cilacap
20	Kota Sawahlunto	63	Kabupaten Banyumas
21	Kabupaten Dharmasraya	64	Kabupaten Purbalingga
22	Kota Dumai	65	Kabupaten Temanggung
23	Kabupaten Rokan Hulu	66	Kabupaten Semarang
24	Kabupaten Kampar	67	Kota Semarang
25	Kabupaten Pelalawan	68	Kabupaten Semarang
26	Kabupaten Kepulauan Meranti	69	Kabupaten Purworejo
27	Provinsi Kepulauan Riau	70	Kota Magelang
28	Kabupaten Bintan	71	Kabupaten Boyolali
29	Kota Batam	72	Kabupaten Gunung Kidul
30	Provinsi Jambi	73	Kabupaten Jepara
31	Provinsi Bengkulu	74	Kabupaten Demak
32	Kabupaten Bengkulu Utara	75	Kabupaten Kudus
33	Kabupaten Rejang Lebong	76	Kabupaten Blora
34	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77	Kabupaten Sidoarjo
35	Kota Pangkalpinang	78	Kabupaten Sragen
36	Kabupaten Bangka	79	Kabupaten Bantul
37	Kabupaten Bangka Selatan	80	Kota Pasuruan

38	Kota Palembang	81	Kota Batu
39	Kabupaten Muara Enim	82	Kabupaten Probolinggo
40	Kabupaten Ogan Komering Ulu	83	Kota Probolinggo
41	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	84	Kabupaten Lamongan
42	Kota Lubluklinggau	85	Kabupaten Tulungagung
43	Provinsi Lampung		

## d. Pengolahan Arsip Nasional – 3624

Kegiatan Pengolahan Arsip Nasional berada di bawah ruang lingkup kerja Direktorat Pengolahan dengan uraian Output Strategis (level RO) berupa *Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah* (KRO/RO: UAA.01) dan target kinerja sebanyak 10.000 Arsip.

Arsip penanganan pandemi COVID-19 yang diolah adalah arsip hasil akuisisi dari pencipta arsip yang dilaksanakan oleh Direktorat Akuisisi sejak 2020-2022 serta hasil Wawancara Sejarah Lisan (WSL) beberapa tokoh terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengolahan arsip penanganan pandemi COVID-19 meliputi:

- Proses verifikasi dan sinkronisasi/kesesuaian antara fisik arsip dengan informasi arsip pada Daftar Arsip Statis COVID-19 yang merupakan hasil/output dari Direktorat Akuisisi;
- Penyusunan skema pembagian informasi pada Guide Arsip berdasarkan pada klasifikasi informasi yang tertuang pada SE Menpan RB No.62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Pembuatan daftar arsip beserta sinopsis dari hasil rekaman wawancara sejarah lisan.

Capaian output hasil pengolahan adalah jumlah arsip yang diolah dalam kurun waktu satu bulan selama satu tahun. Capaian output prioritas nasional (PN) Direktorat Pengolahan selama satu tahun adalah sebanyak 8.432 arsip dari target 10.000 arsip (84,32%). Tidak tercapainya target disebabkan arsip hasil akuisisi tidak mencapai jumlah 10.000 arsip.

### e. Akuisisi Arsip Nasional – 3620

Kegiatan Akuisisi Arsip Nasional berada di bawah ruang lingkup kerja Direktorat Akuisisi dengan uraian Output Strategis (level RO) berupa *Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diselamatkan* (KRO/RO: UAA.01) dan target kinerja sebanyak 10.000 Dokumen.

Capaian output hasil akuisisi adalah jumlah dokumen yang diterima dalam kurun waktu satu bulan selama satu tahun. Capaian output prioritas nasional (PN) Direktorat Akuisisi selama satu tahun adalah sebanyak 8.432 dokumen dari target 10.000 dokumen (84,32%). Tidak tercapainya target disebabkan arsip yang diterima tidak mencapai jumlah 10.000 dokumen.

## f. Layanan dan Pemanfaatan Arsip – 3623

Kegiatan Layanan dan Pemanfaatan Arsip berada di bawah ruang lingkup kerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan dengan uraian Output Strategis (level RO) berupa *Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Didokumentasi dan Dipublikasi* (KRO/RO: UAA.01) dan target kinerja sebanyak empat Dokumen.

	RING	CIAN PROGRAM	//KEGIATAN/RI	NCIAN OUTPU	T PRIORITAS N	ASIONAL TAHUN 2022
		DIPA A	VAL 2022	REVISI	IPA 2022	
Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output	Volume dan Satuan	Pagu	Volume dan Satuan	Pagu	KETERANGAN
087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		10.900.000.000		10.693.755.000	Alokasi Anggaran RO Prioritas Nasional berkurang Rp.206.245.000,- dikarenakan adanya Automatic Adjustment (Alokasi yang dikurangi dari swa antigen)
3620	Akuisisi Arsip Nasional		1.500.000.000		1.500.000.000	
UAA.001	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diselamatkan	10.000 Dokumen	1.500.000.000	10.000 Dokumen	1.500.000.000	PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pp 2 - Meningkatan Penajawa nda Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyr dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Durial KP 1 - Revitalisasi and Aktualisasi Nila Budaya dan Kengrifa Lokal ProPN 3 - Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfastan Manuskirip dan Arsip Sabasai Sumber Nila Budaya. Saisarh, dan Memir Okielif Banosa.
3623	Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip		1.600.000.000		1.550.000.000	
UAA.001	Arsip penanganan pandemi covid-19 di Indonesia yang didokumentasi dan dipublikasi	4 Dokumen	1.600.000.000	4 Dokumen	1.550.000.000	PN 4 - Revolusi Mental dan Pembanguran Kebudayaan Pp 2 - Meningkatan Penajawa fian Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakye dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Duria KP 1 - Revtalisas dian Attualisas Nila Budaya dan Kerarifa Lokal ProPN 3 - Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Maruskrip dan Arsip Sebasai Sumber Nila Budaya, Seland, dan Memir Okidelif Bangsa
3624	Pengolahan Arsip Nasional		500.000.000		480.000.000	
	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah	10.000 Arsip	500.000.000	10.000 Arsip	480.000.000	PN 4 - Revolusi Mental dan Permbangunan Kebudayaan PP 2 - Mehingkatkan Pemajaun dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karatker dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakya dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia KP 1 - Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal POPN 2 - Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Museum dan Arsip
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		7.300.000.000		7.163.755.000	
	Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	53 Lembaga	1.050.000.000			PN.TMemperkuar Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publi PP 4 - Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola KP 3 - Penetaana kelembagaan dan proses bisnis ProPN 2 - Penerapan SPBE terintegrasi
	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.300.000.000	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.294.420.000	PN7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publi PP 4 - Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola KP 3 - Penataan kelembagaan dan proses bisnis ProPN 2 - Penerapan SPBE terintegrasi
UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	85 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.950.000.000	85 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.850.250.000	PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publi PP 4 - Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola KP 3 - Penatan kelembagaan dan proses bisnis ProPN 2 - Penerapan SPBE terintegrasi

#### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

## C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 67 Kas di Bendahara Pengeluaran (111611) Periode 31 Desember 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	Jumlah (Rp)
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	ı
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-
	JUMLAH	-

Tabel 68 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) Periode 31 Desember 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	Jumlah (Rp)
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	-
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-
	JUMLAH	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021

KODE SATKER	NAMA SATKER	2022 (Rp)	2021 (Rp)
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)		
087.01.681464	BAST Aceh (KD)		
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)		-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)		•
	JUMLAH		

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

#### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

## C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, yaitu LS Bendahara Pengeluaran yang belum didistribusikan kepada para pihak ketiga. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 70 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821) Periode 31 Desember 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	Jumlah (Rp)
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	•
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-
	JUMLAH	

Belanja Dibayar di Muka Rp0,00

### C.4 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.000.000,00. Belanja dibayar di muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Pada pemeriksaan LKKL ANRI TA 2021 terdapat jurnal koreksi BPK-RI atas reklasifikasi aset Bahan untuk Pemeliharaan berupa *voucher* Bahan Bakar Khusus (BBK) pada satuan kerja Pusdiklat Kearsipan yang semula dicatat dengan menggunakan akun Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan menjadi Belanja Barang Dibayar di Muka (*Prepaid Expense*) senilai Rp10.000.000,00. Di tahun 2022 ini, saldo tersebut telah habis digunakan.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

## C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp19.969.700,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

## **C.6 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp5.447.200,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak mencatat piutang yang berasal dari PNBP, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBP dan Piutang Lainnya.

Berdasarkan Rekapitulasi Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Piutang Nomor: 00001/SKTL/450448/2022 atas No. Piutang: 00001/AR/450448/2022 sebesar Rp5.447.200,00 telah dilakukan pelunasan pada tanggal 9 November 2022 melalui mekanisme *overbooking* tiap bulan oleh PT. Taspen (Persero).

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00

# C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,00

## C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masingmasing sebesar Rp0,00 dan (Rp27.236,00). Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Kualitas piutang dalam Kartu Penyisihan Piutang Tak Tertagih Nomor 12-00001 diklasifikasikan ke dalam kategori lancar dengan persentase penyisihan piutang tak tertagih sebesar 0,5 persen dari total saldo Piutang Bukan Pajak – Piutang Lainnya sebagaimana ketentuan PMK Nomor 201 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang TP/TGR Rp0,00

## C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan Rp2.532.257.217,00

#### C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian Persediaan FIFO mulai tahun 2021. Sesuai SAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian Persediaan. Dalam metode FIFO, Persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai Persediaan yang pertama kali keluar.

Dengan demikian, nilai Persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan masuk Persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis transaksi Persediaan keluar yang antara lain mencakup pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, penyerahan kepada masyarakat/pemda, penggunaan barang pemeliharaan, pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, penyerahan dari belanja bantuan sosial, barang rusak/usang, penghapusan lainnya, reklasifikasi keluar, koreksi keluar, serta penyesuaian hasil *stock opname* fisik dalam hal kuantitas berdasarkan *stock opname* fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan.

Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.532.257.217,00 dan Rp2.346.583.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Pm)	2021 (Pm)	Kenaikan/Penur	unan
Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Barang Konsumsi (117111)	1.897.800.409,00	1.738.870.803,00	158.929.606,00	9,14
ANRI Jakarta (KP)	1.421.247.094,00	1.334.112.588,00	87.134.506,00	6,53
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	95.275.915,00	43.093.415,00	52.182.500,00	121,09
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	138.164.000,00	137.444.000,00	720.000,00	0,52
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	243.113.400,00	224.220.800,00	18.892.600,00	8,43
Barang untuk Pemeliharaan (117113)	171.045.750,00	133.221.335,00	37.824.415,00	28,39
ANRI Jakarta (KP)	119.066.950,00	81.467.135,00	37.599.815,00	46,15
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	7.455.300,00	7.829.700,00	(374.400,00)	(4,78)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	3.368.000,00	-	3.368.000,00	-
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	41.155.500,00	43.924.500,00	(2.769.000,00)	(6,30)
Barang Persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan ke Masyarakat (117128)	461.289.919,00	470.934.369,00	(9.644.450,00)	(2,05)
ANRI Jakarta (KP)	461.289.919,00	470.934.369,00	(9.644.450,00)	(2,05)
Bahan Baku (117131)	-	-	-	-
ANRI Jakarta (KP)	-	-	-	-
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	-	-	-	-
Persediaan Lainnya (117199)	2.121.139,00	3.556.894,00	(1.435.755,00)	(40,37)
ANRI Jakarta (KP)	2.121.139,00	3.556.894,00	(1.435.755,00)	(40,37)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	-	-	-	-
Jumlah Persediaan	2.532.257.217,00	2.346.583.401,00	185.673.816,00	7,91

### **Catatan:**

 Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan buku-buku koleksi layanan arsip di Satker ANRI Jakarta sebesar Rp461.289.919,00.

Tabel 72 Mutasi Persediaan Tahun 2022

					Mut	asi				
				Pema	kaian					
No No	Persediaan	Persediaan Sald	Saldo Awal (Rp)	Pembelian (Rp)	Pemakaian Habis Pakai (Rp)	Penyerahan Dijual kepada Masyarakat (Rp)	Opname Fisik (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Koreksi Kurang	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.738.870.803,00	5.632.109.541,00	(5.500.868.321,00)		352.630,00	27.535.756,00	(200.000,00)	1.897.800.409,00	
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	1.334.112.588,00	4.849.161.041,00	(4.792.877.521,00)		9.230,00	31.041.756,00	(200.000,00)	1.421.247.094,00	
681464	BAST Aceh	43.093.415,00	240.049.000,00	(184.146.500,00)		(214.000,00)	(3.506.000,00)		95.275.915,00	
418934	Pusdiklat Kearsipan	137.444.000,00	247.780.000,00	(247.060.000,00)			-	-	138.164.000,00	
418929	Pusat Jasa Kearsipan	224.220.800,00	295.119.500,00	(276.784.300,00)		557.400,00	-	-	243.113.400,00	
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	133.221.335,00	970.153.048,00	(932.328.633,00)			-		171.045.750,00	
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	81.467.135,00	833.254.048,00	(795.654.233,00)			-		119.066.950,00	
681464	BAST Aceh	7.829.700,00	20.178.000,00	(20.552.400,00)			-	-	7.455.300,00	
418934	Pusdiklat Kearsipan	43.924.500,00	86.723.000,00	(89.492.000,00)		-	-	-	41.155.500,00	
418929	Pusat Jasa Kearsipan	-	29.998.000,00	(26.630.000,00)		-	-	-	3.368.000,00	
117114	Suku Cadang		6.680.000,00	-		-	(6.680.000,00)		-	
450448	Arsip Nasional RI Jakarta		6.680.000,00	-			(6.680.000,00)	-		
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges		4.000.000,00	(4.000.000,00)					-	
681464	BAST Aceh	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)			-	-	-	
117128	Barang persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	470.934.369,00		-	(9.151.285,00)	(493.165,00)	•		461.289.919,00	
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	470.934.369,00	=	-	(9.151.285,00)	(493.165,00)	-	-	461.289.919,00	
117131	Bahan Baku		2.515.000,00	(2.515.000,00)			-			
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	•	-	-		-	-	-		
681464	BAST Aceh	-	2.515.000,00	(2.515.000,00)				-		
117199	Persediaan Lainnya	3.556.894,00	24.365.500,00	(1.439.499,00)			(24.361.756,00)		2.121.139,00	
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	3.556.894,00	24.365.500,00	(1.439.499,00)			(24.361.756,00)	-	2.121.139,00	
681464	BAST Aceh	÷	-	-				-	-	
	Jumlah	2.346.583.401,00	6.639.823.089,00	(6.441.151.453,00)	(9.151.285,00)	(140.535,00)	(3.506.000,00)	(200.000,00)	2.532.257.217,00	

Rincian tabel mutasi persediaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembelian sebesar Rp6.639.823.089,00 berasal dari Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp5.439.437.041,00, Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp230.710.000,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp482.526.048,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp486.950.000,00, dan terdapat koreksi kurang pada Arsip Nasional RI Jakarta Senilai Rp200.000,00 yang disebabkan oleh pembatalan SPBy dalam modul pembayaran atas BAST UP No. Dokumen: 00050 Tgl.29/11/2022 berupa pembelian meterai.
- b. Pemakaian Persediaan Habis Pakai dengan rincian sebagai berikut :
  - Beban Persediaan sebesar Rp5.508.470.190,00 yang terdiri atas pemakaian Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp5.501.220.951,00 \*), pemakaian Persediaan Bahan Baku sebesar Rp2.515.000,00, dan pemakaian Persediaan Lainnya sebesar Rp1.439.499,00;

- Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.151.285,00;
- Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp932.328.633,00.
- \*) Nilai sudah termasuk hasil opname fisik kurang/lebih sebesar Rp352.630,00 dan reklasifikasi beban barang Pita Cukai, Materai dan Leges menjadi Barang Konsumsi sebesar Rp4.000.000,00.
- c. Perhitungan kurang/lebih hasil opname fisik persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Hasil Opname Fisik Kurang/Lebih

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
	117111 BARANG KO	NSUMSI	
450448  - ANI	RI JAKARTA		
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	-2	-460.000
000004	Coveral Hazmat Suit Reusable	-2	-460.000
1010314001	Obat Cair	-2	-30.25
000018	OBH 100 ml	-2	-30.25
1010314002	Obat Padat (Koreksi BPK-RI)	-244	-610.000
000027	Caflam 25 mg	-244	-610.000
1010314999	Obat Lainnya	1	31.00
000030	Hansaplast Strip	1	31.000
	Obat Padat (Koreksi BPK-RI)	244	1.078.480
1010314002	Obat I adat (Korcksi Di K-Ki)		
	Cataflam 25 mg	244	1.078.48
000072	,	-3	9.230
000072 kumen sumb	Cataflam 25 mg  JUMLAH	-3	9.230
000072 kumen sumb	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU	-3	9.230
000072 kumen sumb 418929  - PUS 1010301014	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARS IPAN	-3 I/XII/2022 dan BA.46/BU/X	9.23( II/2022 Tgl. 31/12/2022
000072 kumen sumb 418929  - PUS 1010301014 000007	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARSIPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)	-3 I/XII/2022 dan BA.46/BU/X	9,23( II/2022 Tgl. 31/12/2022 161.40
000072 kumen sumb 418929  - PUS 1010301014 000007	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARSIPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)  PP Nomor 53 Tahun 2019  Bahan Cetak Lainnya (Koreksi BPK-RI)	-3 J/XII/2022 dan BA.46/BU/X 3 3	9,230 II/2022 Tgl. 31/12/2022 161.40 161.40 396.00
000072 kumen sumb 118929  - PUS 1010301014 000007 1010303999	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARSIPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)  PP Nomor 53 Tahun 2019  Bahan Cetak Lainnya (Koreksi BPK-RI)	-3 J/XII/2022 dan BA.46/BU/X  3 3 12	9,230 II/2022 Tgl. 31/12/2022 161.40 161.40 396.00
000072  kumen sumb  418929  - PUS  1010301014  000007  1010303999  000001	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARSIPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)  PP Nomor 53 Tahun 2019  Bahan Cetak Lainnya (Koreksi BPK-RI)  Brosur	-3  J/XII/2022 dan BA.46/BU/X  3  3  12  12	9,230 II/2022 Tgl. 31/12/2022 161.40 161.40 396.00
000072  kumen sumb  118929  - PUS  1010301014  000007  1010303999  000001  kumen sumb	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARS IPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)  PP Nomor 53 Tahun 2019  Bahan Cetak Lainnya (Koreksi BPK-RI)  Brosur  JUMLAH	-3  J/XII/2022 dan BA.46/BU/X  3  3  12  12	9,230 II/2022 Tgl. 31/12/2022 161,40 161,40 396,00 396,00
000072  kumen sumb  118929  - PUS  1010301014  000007  1010303999  000001  kumen sumb	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARSIPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)  PP Nomor 53 Tahun 2019  Bahan Cetak Lainnya (Koreksi BPK-RI)  Brosur  JUMLAH  er: BA.02/PJK/XII/2022 Tgl. 31/12/2022	-3  J/XII/2022 dan BA.46/BU/X  3  3  12  12	9,23( II/2022 Tgl. 31/12/2022 161,40
000072  kumen sumb  418929  - PUS  1010301014  000007  1010303999  000001  kumen sumb  581464  - BAI  1010301010	Cataflam 25 mg  JUMLAH  er: BA.07.B/BU/V/2022 Tgl. 30 Juni 2022; BA.43/BU  AT JASA KEARSIPAN  Barang Cetakan (Koreksi BPK-RI)  PP Nomor 53 Tahun 2019  Bahan Cetak Lainnya (Koreksi BPK-RI)  Brosur  JUMLAH  er: BA.02/PJK/XII/2022 Tgl. 31/12/2022  AI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI	-3 //XII/2022 dan BA.46/BU/X  3 3 12 12 15	9,230 II/2022 Tgl. 31/12/2022 161,400 161,400 396,000 396,000 557,400

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH				
11712	117128 BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT						
450448  - ANE	450448  - ANRI JAKARTA						
1010501008	Barang Persediaan (Koreksi BPK-RI)	-11	-493.165				
000019	Bahasa Melayu sebagai Bahasa Persatuan	5	144.500				
000031	Kembalinya Irian Barat	-6	-189.000				
000054	Pengungsian penduduk di Jawa tahun 1945-1949	-5	-165.000				
000065	Surat-surat perjanjian antara kesultanan Riau dengan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1874-1909	-5	-283.665				
	JUMLAH	-11	(493.165)				
Dokumen sumb	er: BA.46/BU/XII/2022 Tgl. 31/12/2022						

- d. Berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Barang Persediaan Nomor: BA.02.A/BU/II/2022 Tanggal 2 Februari 2022, BA.08A/BU/VII/2022 Tanggal 4 Juli 2022, dan BA.44/BU/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 terdapat Reklasifikasi Masuk dikarenakan kesalahan catat kodefikasi barang persediaan pada saat pendetailan BAST pada Aplikasi SAKTI berupa:
  - Reklasifikasi Keluar senilai Rp42.562.756,00 yang terdiri atas Barang Konsumsi dengan nilai total Rp9.331.000,00, Suku Cadang dengan nilai total Rp6.680.000,00, Persediaan Lainnya dengan nilai total Rp24.361.756,00, Obat Padat Rp610.000,00, Tinta/Toner Printer Rp1.580.000,00; dan
  - 2. **Reklasifikasi Masuk** atas Barang Konsumsi dengan nilai total Rp42.562.756,00.
- e. Berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi No: PL.02.04/37/2022 tanggal 30 November 2022, terdapat Reklasifikasi ke Aset pada Satker Balai Arsip Statis dan Tsunami dengan rincian:
  - 1. Alat Listrik Lainnya berupa Setrika (1 buah) senilai Rp921.000,00;
  - Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya berupa Sprayer Atomizer
     Gun Wireless-300 (1 buah) senilai Rp685.000,00;
  - Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Kipas Angin 24"
     (2 buah) senilai Rp1.900.000,00.

Atas reklasifikasi ini dilakukan reklasifikasi keluar dari aplikasi SAKTI modul persediaan dan dicatat reklasifikasi masuk pada aplikasi SAKTI modul aset.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

# C.11 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tanah Rp806.226.080.906,00

#### C.12 Tanah

Tanah yang dimiliki ANRI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp806.226.080.906,00 dan Rp805.561.648.718,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Mutasi Tambah/Kurang Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	46.644 m²	Rp	805.561.648.718
Mutasi tambah:	417 m²	Rp	669.737.445
Hibah Masuk		Rp	669.737.445
Transfer Masuk		Rp	-
Mutasi kurang:	103 m²	Rp	5.305.257
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		Rp	5.305.257
Transfer Keluar		Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	46.958 m <sup>2</sup>	Rp	806.226.080.906

Pada tahun anggaran 2022 terdapat **mutasi tambah** Tanah berupa hibah masuk sebesar Rp669.737.445,00 yang berasal dari Pemprov Aceh dengan Nomor Register Hibah 2T57EBFA tanggal penandatangan perjanjian 30/11/2021 dan nomor perjanjian/hibah 52/PKS/2021 (lihat Catatan Penting Lainnya atas Neraca). Terdapat **mutasi kurang** tanah berupa:

Koreksi kuantitas satuan yakni koreksi perubahan kuantitas senilai 103
 m² yang berasal dari koreksi terkait perbedaan kuantitas antara SIMAK

- BMN dengan *e*-Rekon LK. Hal ini disebabkan oleh tidak terkoreksinya data K3 pada aplikasi *e*-Rekon LK. Hal ini sesuai dengan BA Koreksi Kuantitas Tanah dan Jalan No.BA-07A/BU/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- Berdasarkan hasil temuan BPK No.72B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 terkait pekerjaan urugan tanah dan pemadatan di Ciwastra Kota Bandung tahun 2021 dengan SPM No. 1906 tanggal 02 Desember 2021 BAST No. PL.03.00/801.07/2021 tanggal 28 November 2021 senilai Rp198.032.000,00 ditemukan terdapat kekurangan volume senilai Rp5.305.257,00 dengan penyedia CV Nakasa Prima. Atas hal tersebut, penyedia telah menyetorkan ke kas negara senilai Rp5.305.257,00 atas kekurangan volume tersebut melalui NTPN D60F08N3E11RL88R tanggal 20 Mei 2022. Berdasarkan hal tersebut dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp5.305.257,00 untuk NUP 3 dengan kodefikasi 2010104001.

Saldo tanah pada 31 Desember 2022 seluas 46.958 m² atau senilai Rp806.226.080.906,00 yang terdiri dari:

Tabel 75 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2022

NO.	Keterangan	Luas (m²)	Nilai (Rp)
1	Tanah di jalan Gajah Mada	9.340	418.163.400.000
2	Tanah di Jalan Ampera Raya	18.245	303.848.960.000
3	Tanah di Pusdiklat Kearsipan ANRI di Bogor	3.659	51.316.776.250
4	Tanah rumah negara golongan II di Ragunan	979	14.806.072.000
5	Tanah jalan khusus komplek rumah negara	793	12.310.597.000
6	Tanah di BAST di Banda Aceh	4.000	2.160.900.000
7	Tanah Hibah (Pemerintah Kota Bandung)	1.400	532.926.743
8	Tanah Hibah (Pemerintah Provinsi Riau)	8.125	2.416.711.468
9	Tanah Hibah (Pemerintah Provinsi Aceh)	417	669.737.445
	Total	46.958	806.226.080.906

Peralatan dan Mesin Rp281.121.046.237,00

### C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masingmasing sebesar Rp281.121.046.237,00 dan Rp265.069.905.094,00. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		19.161 Unit	Rp	265.069.905.094,00
Mutasi tambah:		1.427 unit	Rp	24.081.069.487,00
Saldo Awal (Terkoreksi)	Rp	2.479.028.100,00		
Pembelian	Rp	14.706.333.418,00		
Reklasifikasi Masuk	Rp	740.527.000,00		
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	5.545.217.892,00		
Perolehan Lainnya (Terkoreksi)	Rp	346.289.151,00		
Transfer Masuk (Terkoreksi)	Rp	213.576.074,00		
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	50.097.852,00		
Mutasi kurang:		688 unit	Rp	(8.029.928.344,00)
Transfer Keluar	Rp	(19.355.600,00)		
Reklasifikasi Keluar	Rp	(740.527.000,00)		
Koreksi Pencatatan	Rp	(53.499.600,00)		
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(7.216.542.094,00)		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(4.050,00)		
Saldo per 31 Desember 2022		19.900 unit	Rp	281.121.046.237,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022			Rp	(217.069.298.823,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022			Rp	64.051.747.414,00

Terdapat **mutasi tambah** Peralatan dan Mesin sebanyak 1.427 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp24.081.069.487,00 berasal dari:

 Saldo Awal sebanyak 71 unit atau sebesar Rp2.479.028.100,00 terdiri atas:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
132111	Peralatan dan Mesin	71	2.479.028.100
ANRI Jakarta		1	1.953.050.000
3.08.01.17.012	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Film)	1	1.953.050.000

Keterangan: Sebanyak 1 unit atau sebesar Rp1.953.050.000,00 merupakan pembelian scanner LIPSNER SMITH CF9400HFE pada tahun 2021. Mekanisme pembayaran barang tersebut dilakukan menggunakan termin sehingga dicatat ke dalam KDP dan atas barang tersebut telah dilakukan pembayaran secara penuh pada tahun 2021 sedangkan pekerjaan barang baru dapat terselesaikan pada bulan Februari 2022 dengan BAST No. PL.01/473.17/2021 tanggal 08/02/2022. Atas dasar penyelesaian pekerjaan barang tersebut, dilakukan Penyelesaian KDP dan selanjutnya diakui sebagai saldo awal pos Peralatan dan Mesin.

Balai Arsip Statis	dan Tsunami Aceh (Koreksi BPK-RI)	70	525.978.100
3.01.03.05.010	Pompa Air	1	14.744.100
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	34	185.752.300
3.05.02.06.002	Televisi	10	54.504.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	48.506.800
3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1	46.252.200
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	0	0
3.07.02.01.011	Fire Extinghuizer	19	37.838.500
3.10.01.02.001	P.C Unit	1	17.303.000
3.15.04.04.008	Fire Alarm System	1	70.785.000
3.17.01.19.004	Jet Pump	2	50.292.200

Keterangan: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Listing Data BMN dan Daftar Barang Ruangan (DBR) milik UAKPB Balai Arsip Statis dan Tsunami, serta hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berada pada gedung Balai Arsip Statis dan Tsunami di Bakoy menunjukkan terdapat 70 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin (intrakomtabel) yang belum diberikan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN serta belum terdata pada DBR dan data BMN milik UAKPB Balai Arsip Statis dan Tsunami. Atas hal tersebut, dilakukan koreksi reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin dalam laporan keuangan (audited).

• **Pembelian** Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebanyak 1.130 unit atau sebesar Rp14.706.333.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Rincian Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Satuan Kerja	Satuan Keria Kode Kode Urajan Aset		Intrakomptabel		
NO.	Satuan Kerja	Satker	Bidang	Ordidii Aset	Kuantitas	Nilai
1	ANRI Jakarta	450448	132111	Peralatan dan Mesin	851	12.383.327.908,00
2	Balai Arsip Statis dan Tsunami	681464	132111	Peralatan dan Mesin	27	751.627.000,00
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	418934	132111	Peralatan dan Mesin	190	1.293.433.070,00
4	Pusat Jasa Kearsipan	418929	132111	Peralatan dan Mesin	62	277.945.440,00
		1130	14.706.333.418,00			

### **Catatan:**

Perbedaan nilai pembelian Peralatan dan Mesin antara Neraca sebesar Rp14.706.333.418,00 dan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.252.401.310,00 memiliki selisih nilai sebesar Rp5.546.067.892,00. Adapun hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Adanya ketidaksesuaian penggunaan akun belanja di Satker Pusdiklat Kearsipan, yaitu belanja yang seharusnya memakai akun 52 (Belanja Barang) tetapi pada SPM menggunakan akun belanja 53 (Belanja Modal). Belanja tersebut tercatat dengan No. SPM 317 berupa pembelian 1 buah Tripod dengan harga Rp850.000,00 (barang ekstrakomptabel), yang dibeli menggunakan akun 532111-Belanja modal peralatan dan mesin (seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel);
- b. Adanya penyelesaian pembangunan dengan KDP pada Satker ANRI Jakarta senilai Rp5.545.217.892,00 yang merupakan pembelian barang dengan pembayaran berupa pemberian uang muka pada 4 kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Vasiatan	Pembayaran (Rp)			
No	Nama Kegiatan	Uang Muka	Pelunasan	Total	
1	Pengadaan Peralatan Restorasi	655.342.200	1.529.131.800	2.184.474.000	
2	Pengadaan Pengujian Arsip	577.955.633	1.348.563.142	1.926.518.775	
3	Pengadaan Smart Rack dan Switch Port	94.072.500	282.217.500	376.290.000	
4	Pengadaan sarana penyimpanan arsip	264.483.779	793.451.338	1.057.935.117	
	Total				

Sementara rincian Pembelian Peralatan dan Mesin – Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPTABEL		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	
132111	Total Peralatan dan Mesin		1130	14.706.333.418	
450448	ANRI Jakarta	Unit	851	12.383.327.908	
418934	Pusdiklat Kearsipan	Unit	190	1.293.433.070	
418929	Pusat Jasa Kearsipan	Unit	62	277.945.440	
681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	Unit	27	751.627.000	

- Reklasifikasi Masuk sebanyak 26 unit atau senilai Rp740.527.000,00 berasal dari:
  - a. ANRI Jakarta sebanyak 16 unit atau senilai Rp698.733.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Semula			Menjadi				
140	Nama Barang	Kodefikasi	NUP	Nama Barang	Kodefikasi	NUP	No. BAST	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3020101999	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3020102003	93	PL.01/46.07/2022 tanggal 11/02/2022	BA Reklas No.05A/BU/II/2022 tanggal 11/02/2022
2	Camera Conference	3050206002	6	Video Conference	3060102132	_	tanggal 14/12/2022	BA Reklas No.36/BU/XII/2022 tanggal 14/12/2022
3	External/ Portable Hardisk	3100203017	1-12	Hard disk	3100201012	131-142	PL.01/900.07/2022 tanggal 02/11/2022	BA Reklas No.26.B/BU/XI/2022 tanggal 02/11/2022.
4	Alat Penghancur Kertas	3050105015		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	692-693	tanggal 16/12/2022	BA Reklas No.37/BU/XII/2022 tanggal 16/12/2022

No	Nama Barang	Merk	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	Mini Bus (Penumpang 14	Toyota fortuner 2.4 vrz	1	568.300.000	568.300.000	
	Orang Kebawah)	4x2 a/t gr				
2	Video Conference	Tenveo tevo nv20u	1	16.829.000	16.829.000	
3	Hard disk	Dell emc hardisk 13 gen rack 600gb	12	8.175.000	98.100.000	
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson ecotank l6290a4	2	7.752.000	15.504.000	
	Total					

b. Pusdiklat Kearsipan sebanyak 10 unit atau senilai Rp41.794.000,00 berupa reklasifikasi masuk peralatan dan mesin Mixer Sound System yang disebabkan terjadinya kesalahan pencatatan kode barang Mixer yang seharusnya menggunakan kode barang Mixer Sound System. Reklasifikasi masuk didasarkan Berita Acara Reklasifikasi pada Aset Tetap Nomor PL.02.04/1/2022 tanggal 28 Desember 2022.

• **Transfer Masuk** sebanyak 2 unit atau senilai Rp213.576.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
132:	Peralatan dan Mesin	17	213.576.074
ANRI Jakarta		1	19.355.600
3.10.01.02.0	003 Note Book	1	19.355.600

<u>Keterangan:</u> Sebanyak 1 unit atau sebesar Rp19.355.600,00 merupakan transfer masuk yang berasal dari Satker Pusdiklat Kearsipan dengan BAST No.PL.02.01/446/2022 tanggal 15 November 2022 berupa *Note Book* NUP 1154 Merk Lenovo Thinkpad L390 Yoga.

Balai Arsip Statis	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (Koreksi BPK-RI)			
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	2	77.390.976	
3.05.02.06.002	Televisi	1	7.968.135	
3.05.02.06.056	Karpet	1	3.731.265	
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2.988.009	
3.06.02.10.015	Perangkat akses internet	1	3.537.792	
3.10.01.02.009	Tablet PC	5	19920060	
3.10.01.99.999	Komputer Unit Lainnya	4	63.744.192	
3.10.02.04.001	Server	1	14.940.045	
1	and the second s			

Keterangan: Sebanyak 16 unit atau senilai Rp194.2204.474,00 merupakan transfer masuk yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 5706/4.2/PLK.03.07/XII.2022 Tanggal 01 Desember 2022.

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp5.545.217.892,00 pada satker ANRI Jakarta sebagaimana yang telah dijelaskan pada mutasi pembelian huruf b.
- Perolehan Lainnya senilai Rp346.289.151,00 yang berasal dari satuan kerja:
  - a. ANRI Jakarta yakni berupa terdapatnya item peralatan dan mesin senilai Rp196.289.401,00 dalam pengadaan renovasi ruang kerja arsip media baru (533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) di Gedung F dengan NUP 8 sehingga dilakukan koreksi nilai ke dalam pos Peralatan dan Mesin berdasarkan BA No. BA.41/BU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
  - b. Balai Arsip Statis dan Tsunami yakni berupa Perolehan Lainnya senilai Rp134.415.350,00 yang awalnya merupakan belanja pemeliharaan akun (523121 – Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) dengan rincian item pekerjaan di dalamnya terdapat item peralatan dan mesin sebanyak 38 unit sehingga dilakukan koreksi

- nilai ke dalam pos Peralatan dan Mesin berdasarkan BA No.PL.02.04/46/2022 tanggal 30 Desember 2022.
- c. Pusat Jasa Kearsipan yakni berupa Perolehan Lainnya senilai Rp15.584.400,00 merupakan koreksi BPK-RI sehubungan atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) dengan rincian item pekerjaan di dalamnya terdapat pembuatan enam meja kerja yang tidak menempel pada Gedung dan Bangunan sehingga dilakukan koreksi ke dalam pos Peralatan dan Mesin dengan pembentukan NUP baru.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp50.097.852,00 berasal dari Pengadaan renovasi ruang kerja arsip media baru (533121) di Gedung F dengan NUP 8 senilai Rp753.951.000,00 yang didalamnya terdapat pengembangan peralatan dan mesin. Hal ini sesuai dengan BA No. BA.41/BU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kodefikasi	Vol	Harga Satuan	NUP	Jumlah
	Pengembangan Peralatan dan Mesin				50.097.852	
1	Manual Film Rewinder	3060102079	6	2.442.000	12,13,15,16,17,19	14.652.000
2	Manual Film Rewinder	3060102079	3	7.992.000	10,11,14	23.976.000
3	Meja Kerja Kayu	3050201002	4	2.867.463	241-244	11.469.852

Terdapat **mutasi kurang** Peralatan dan Mesin sebanyak 688 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp8.029.928.344,00 berasal dari:

- Transfer Keluar sebanyak 1 unit atau sebesar Rp19.355.600,00 merupakan transfer NoteBook dari Satker Pusdiklat Kearsipan kepada Satker ANRI Jakarta dengan BAST No.PL.02.01/446/2022 tanggal 15 November 2022.
- Reklasifikasi Keluar sebanyak 26 unit atau senilai Rp740.527.000,00
  berasal dari satuan kerja ANRI Jakarta sebanyak 16 unit atau senilai
  Rp698.733.000,00 dan Pusdiklat Kearsipan sebanyak 10 unit atau
  senilai Rp41.794.000,00 dengan rincian sebagaimana yang telah
  diuraikan dalam mutasi Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin.

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada satker Balai Arsip Statis dan Tsunami senilai Rp4.050,00 yang merupakan kesalahan pencatatan pada aplikasi SAKTI terhadap CCTV dengan Nup 33-41 masing-masing senilai Rp450,00. Oleh karena itu dilakukan pengurangan nilai berdasarkan Berita Acara Koreksi Nilai Berkurang dengan No.PL.02.04/50/2022 tanggal 30 Desember 2022.
- Koreksi Pencatatan senilai Rp53.499.600,00 yang merupakan koreksi satker ANRI Jakarta atas pencatatan Kursi Besi/Metal dengan kode 3.05.02.01.003 sebanyak 21 unit berdasarkan Berita Acara Koreksi Nomor BA.42/BU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022. Koreksi ini berasal dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip Kepresidenan pada tahun 2019.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp7.216.542.094,00 berasal dari satuan kerja:
  - a. ANRI Jakarta sebanyak 474 unit atau senilai Rp6.166.179.931,00 yang merupakan koreksi perubahan kondisi BMN menjadi barang rusak berat berdasarkan berita acara Nomor: BA-24/BU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, BA-28/BU/XI/2022 tanggal 11 November 2022, BA-34/BU/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;
  - b. Pusdiklat Kearsipan sebanyak 150 unit atau senilai Rp671.885.823,00 yang sudah dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah tersebut dan telah diusulkan penghapusannya berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PL.02.03/4488/2022 tanggal 22 November 2022;
  - Balai Arsip Statis dan Tsunami sebanyak 16 unit atau senilai
     Rp378.476.340,00 yang merupakan koreksi perubahan kondisi
     BMN menjadi barang rusak berat berdasarkan Berita Acara

Penetapan Barang Rusak Berat dan Penghentian Status Penggunaan No:PL.02.04/44/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Gedung dan Bangunan Rp369.395.018.369,00

## **C.14 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp369.395.018.369,00 dan Rp367.489.805.847,00. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	54 Unit	Rp	367.489.805.847,00
Mutasi tambah:	0 Unit	Rp	3.360.092.960,00
Koreksi Susulan (Terkoreksi)		Rp	252.241.128,00
Pengembangan Nilai Aset Langsung		Rp	318.984.912,00
Pengembangan Nilai Aset dengan KDP		Rp	2.374.415.025,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		Rp	414.451.895,00
Mutasi kurang:	0 Unit	Rp	1.454.880.438,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (Terkoreksi)		Rp	1.454.880.438,00
Saldo per 31 Desember 2022	54 Unit	Rp	369.395.018.369,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022		Rp	(79.782.134.263,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022		Rp	289.612.884.106,00

Terdapat mutasi tambah senilai Rp3.360.092.960,00 yang terdiri dari:

• Koreksi Susulan senilai Rp252.241.128,00 berasal dari:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI				
133111	Gedung dan Bangunan	0	252.241.128				
ANRI Jakarta (Kor	0	36.075.000					
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	36.075.000				
Keterangan: Kore	ksi susulan berasal dari kapitalisasi nilai Gedung terkait pekerjaan se	ekat ruang ra	pat di Gedung C				
Lantai 3 NUP 10	senilai Rp.36.075.000 dengan akun 523111 dengan Kontrak No.PL.	.03.00/549.05	5/2022 SPM No.				
1327. Hal ini	sesuai dengan BA.43/BU/XII/2022 tanggal 31 Desember 202	22 dan bei	dasarkan NKF-				
013/087/PB.6/202	3 tanggal 11April 2023.						
Pusat Pendidikan	dan Pelatihan Kearsipan (Koreksi BPK-RI)	0	162.348.000				
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	162.348.000				
Keterangan: Kore	ksi susulan berasal dari kapitalisasi dua pekerjaan pemeliharaan g	edung dan b	angunan NUP 7				
(Gedung Asrama	2). Pekerjaan I: Pekerjaan Restorasi Ruang Makan di Gedung A	srama 2 Lar	ntai 1 Pusdiklat				
Kearsipan dengan	nilai Rp129.195.000,00 dan Pekerjaan II: Pekerjaan Pemasangan	Kanopi di Ge	edung Asrama 2				
	ın dengan nilai Rp33.153.000,00. Koreksi susulan dilakukan berda		a Acara Koreksi				
Susulan Nomor PL	02.08/47/2022 Tgl. 31 /12/2022 dan PL.02.08/48/2022 Tgl. 31/12/20	22.					
Pusat Jasa Kearsip	oan (Koreksi BPK-RI)	0	53.818.128				
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	53.818.128				
Keterangan: Koreksi susulan berasal dari belanja pemeliharaan dengan akun 523111 sesuai Faktur No : 022/Fak-							
Akaw/VII/2022 tgl 28 Juli 2022 berupa pekerjaan pemasangan partisi ruang alih media lantai 5 gedung pusat jasa							
kearsipan.							

- Pengembangan Nilai Aset Langsung senilai Rp318.984.912,00 yang terdapat pada satuan kerja:
  - a. ANRI Jakarta senilai Rp270.360.258,00 dengan rincian:

No	Nama Barang	Nama Gedung	Kodefikasi	No. BAST	NUP	Nilai (Rp)		
1	Bangunan dan Gedung Permanen	Gedung C Lt.2	4010101001	PL.03.00/969.07/2022 tanggal 31/10/2022	10	180.419.400		
2	Bangunan dan Gedung Permanen	Gedung Gajah mada	4010101001	PL.01/1217.08/2022 tanggal 18/11/2022	1	89.940.858		
	TOTAL							

Pengembangan pada Gedung C lt. 2 berupa renovasi panggung dan pemasangan *backdrop*, sedangkan pengembangan pada Gedung Gajah Mada merupakan perbaikan nama pusat studi tahun 2022.

- b. Pusdiklat Kearsipan senilai Rp48.624.654,00 berupa satu bangunan Gedung Pendidikan permanen.
- Pengembangan Nilai Aset dengan KDP senilai Rp2.374.415.025,00 yang terdapat pada satuan kerja:
  - a. ANRI Jakarta senilai Rp1.869.415.600,00 dengan rincian:

No.	Nama	Kegiatan	Kodefikasi	Nilai			
1	Fire Suppression Gedung O Lantai 2	4010101001	1.115.464.600				
2	Renovasi Interior Gedung F Lantai 1	4010101001	753.951.000				
	TOTAL						

- b. Pusdiklat Kearsipan senilai Rp504.999.425,00 berupa dua bangunan Gedung Pendidikan permanen.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp414.451.895,00 yang terdapat pada satuan kerja:
  - a. ANRI Jakarta senilai Rp66.509.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

N	o Nama Barang	Nama Gedung	Kodefikasi	No. BA Koreksi	NUP	Nilai (Rp)			
1	Bangunan dan Gedung Permanen	Gedung Arsip Kepresidenan	4010101001	BA.42/BU/XII/2022	23	53.499.600			
2	Bangunan dan Gedung Permanen	Gedung O	4010101001	BA.40/BU/XII/2022	11	13.010.000			
TOTAL									

 Balai Arsip Statis dan Tsunami senilai Rp347.942.295,00 yang merupakan koreksi atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang keadaan sesungguhnya merupakan pengembangan Gedung Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh NUP 2 dengan rincian:

- Talang Beton senilai Rp45.992.295,00
- Dinding Lantai 3 dan 4 senilai Rp162.817.600,00
- Backdrop HPL senilai Rp139.132.400,00.

Terdapat mutasi kurang senilai Rp1.454.880.438,00 yang terdiri dari:

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang yang berasal dari Satker ANRI Jakarta senilai Rp302.716.443,00 yakni:
  - a. Renovasi interior Gedung F Lantai 1 NUP 8 yang mana didalamnya terdapat item peralatan dan mesin senilai Rp257.043.253,00. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Koreksi No. BA.41/BU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
  - b. Tindak lanjut atas LHP BPK-RI No.72B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 terkait kurang volume untuk lima pekerjaan yang terjadi di tahun 2021 senilai Rp45.413.190,00 dan sudah dilakukan penyetoran dengan Nomor NTPN sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kodefikasi	NUP	No. NTPN	Tanggal NTPN	Nilai Koreksi				
Ase	Aset Intrakomtabel									
1	Gedung Pos Jaga Permanen	4010113001	4	7ECEC6U8EBT1MTK3	19/05/2022	2.658.694				
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	11	FE9590N9VHSJ8GA6	02/06/2022	18.057.790				
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	11	1383E55DEMRCL83D	30/06/2022	24.692.948				
4	Gedung Pos Jaga Permanen	4010113001	4	CEF7F55DENDE7LNR	29/12/2022	3.758				
	Total 1	Nilai Aset Int	rakoı	nptabel		45.413.190				
Aset Ekstrakomtabel										
1	Pagar Permanen	4040104001	4	B8E8355DEMOA18KT	20/05/2022	1.191.863				

c. Pengembalian belanja modal senilai Rp260.000,00 berasal dari kegiatan pengelolaan kegiatan pengadaan fire suppresion ruang penyimpanan depot elektronik dengan Nomor SPM 03303A tanggal 16 Desember 2022 senilai Rp13.010.000,00. Kegiatan pengadaan tersebut menggunakan akun pengembangan nilai Gedung dengan kodefikasi 4010101001 NUP 11 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kodefikasi	NUP	No. NTPN	Tanggal NTPN	Nilai Koreksi			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	11	C97EA1GAAUD7D7TR	30/12/2022	260.000			
Total Nilai									

 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang yang berasal dari satker Balai Arsip Statis dan Tsunami senilai Rp1.152.163.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI					
133111	0	1.152.163.995						
Balai Arsip Statis	dan Tsunami	0	1.152.163.995					
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	15.622.695					
Keterangan: Kore	eksi dilakukan atas kelebihan penginputan kapitalisasi pekerjaan	pemeliharaa	an Gedung dan					
Bangunan akun 5	23111 pada Gedung NUP 2 senilai Rp45.992.295,00, yang seharusr	nya dicatat R	p30.369.600,00.					
Koreksi dilakukan	berdasarkan Berita Acara Koreksi Nilai Berkurang Nomor PL.02.04/51	/2022 Tgl. 30,	/12/2022.					
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Koreksi BPK-RI)	0	1.136.541.300					
Keterangan: Rekl	asifikasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peral	atan dan Mes	in dan Software					
(belum memiliki NUP) pada satker BAST.								

Berikut adalah rincian nilai Gedung dan Bangunan ANRI sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 79 rincian Gedung dan Bangunan ANRI (ekstrakomptabel dan intrakomptabel)

No.	Kode Barang	NUP	Nama Gedung dan Alamat Bangunan		Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
			INTRAK	OMPTABEL		
1	4010101001	1	Gedung Utama Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.568.586.858
2	4010101001	2	Gedung Depo Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.125.166.000
3	4010101001	3	Gedung E	JL. Ampera Raya	Jakarta	11.804.508.000
4	4010101001	4	Gedung A	JL. Ampera Raya	Jakarta	11.848.912.514
5	4010101001	5	Gedung B	JL. Ampera Raya	Jakarta	6.512.921.000
6	4010101001	6	Gedung D	JL. Ampera Raya	Jakarta	5.195.532.000
7	4010101001	7	Gedung J	JL. Ampera Raya	Jakarta	380.780.000
8	4010101001	8	Gedung F	JL. Ampera Raya	Jakarta	23.633.623.747
9	4010101001	9	Gedung G	JL. Ampera Raya	Jakarta	45.146.799.000
10	4010101001	10	Gedung C	JL. Ampera Raya	Jakarta	48.164.620.400
11	4010101001	11	Gedung O	JL. Ampera Raya	Jakarta	41.401.079.959
12	4010101001	12	Gedung I	JL. Ampera Raya	Jakarta	2.135.848.770
13	4010101001	13	Selasar Penghubung Gd. O dan Gd. F	JL. Ampera Raya	Jakarta	48.360.000
14	4010101001	14	Selasar Penghubung	JL. Ampera Raya	Jakarta	140.244.000
15	4010101001	15	Gedung Inventaris	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.453.711.000
16	4010101001	17	Gedung P	JL. Ampera Raya	Jakarta	24.597.024.600
17	4010101001	18	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	256.549.000
18	4010101001	19	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	249.637.000
19	4010101001	20	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.314.664.000
20	4010101001	1	Gedung Buncit KPK	JL.Warung Buncit Raya	Jakarta	24.790.882.128
21	4010108001	1	Gedung H	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.562.853.000
22	4010101001	26	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	54.313.800
23	4010101001	27	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	46.915.000
24	4010104999	2	Gardu Induk (Revaluasi)	JL. Ampera Raya	Jakarta	71.551.000

			1				
25	4010113001	4	Pos Jaga Utara (Revaluasi)	JL. Ampera Raya	Jakarta	257.828.048	
26	4010113001	5	Pos Jaga Selatan(Revaluasi)	JL. Ampera Raya	Jakarta	92.511.000	
27	4010205001	1	Asrama Permanen	JL. Adi Sucipto	Riau	59.800.000	
28	4010113001	1	Pos Jaga	JL. Ampera Raya	Jakarta	97.412.000	
29	4010113001	2	Pos Jaga Rumah Negara JL. Ampera Raya		Jakarta	133.095.900	
30	4010114001	1	Gedung Parkir/pool permanen	JL. Ampera Raya	Jakarta	418.613.000	
31	4040101009	1	Gapura Kanan	JL. Ampera Raya	Jakarta	215.704.000	
32	4040101009	2	Gapura Kiri	JL. Ampera Raya	Jakarta	212.978.000	
33	4010202001	1	Rumah Dinas Kepala ANRI	JL. Ampera Raya	Jakarta	704.919.000	
34	4010202001	2	Rumah Dinas Deputi Pembinaan	JL. Ampera Raya	Jakarta	504.868.000	
35	4010202001	3	Rumah Dinas Deputi Konservasi	JL. Ampera Raya	Jakarta	484.553.500	
36	4010101001	23	Gedung Arsip Kepresidenan	Jl. Gajah Mada	Jakarta	36.620.460.473	
37	4040104001	1	Pagar (koreksi Reval)	Jl. Gajah Mada	Jakarta	758.629.000	
38	4010101001	1	Bangunan Gedung Kantor	JL.T.Nyak Arief, No.122	Banda Aceh	9.192.984.000	
39	4010101001	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Inspeksi Kr. Aceh	Aceh Besar	50.065.392.213	
40	4040104002	1	Pagar Semi Permanen	Jl. Inspeksi Kr. Aceh	Aceh	1.016.926.000	
41	4010110001	1	Gedung Kelas Utama Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	527.113.000	
42	4010110001	2	Gedung Laboratorium Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	558.589.000	
43	4010110001	3	Kantor Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	425.822.000	
44	4010110001	4	Asrama 1 Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	1.723.654.079	
45	4010110001	5	Ground Reservoar Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	103.658.000	
46	4010110001	6	WC Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	45.249.000	
47	4010110001	7	Asrama 2 Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	1.878.384.000	
48	4010110001	8	Wisma Janus Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	516.188.000	
49	4010110001	9	Pos Jaga	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	6.955.000	
50	4010110001	10	Pos Jaga	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	96.398.000	
51	4010110001	11	Hydrant Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	17.108.000	
52	4010110001	12	Gedung Kantor Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	2.772.878.000	
53	4040104001	1	Pagar Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	331.924.000	
54	4010113001	6	Gedung Pos Jaga Permanen (Belakang)	JL. Ampera Raya	Jakarta	49.341.380	
			Total			369.395.018.369	
			EKSTRAH	COMPTABEL			
1	4010101001	24	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	23.667.400	
2	4010101001	25	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	23.659.500	
3	4010106010	1	Poliklinik Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	6.293.000	
4	4010108001	2	Mushola Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	5.585.000	
5	4010104999	1	Bangunan Genset Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	2.714.000	
6	4010113003	1	Bangunan Pos Jaga Darurat	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.202.000	
7	4040104001	4	Pagar Permanen	Jl. Derwati	Jawa Barat	17.774.137	
	Total						
	Total (Intrakomptabel & Ekstrakomptabel)						

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp62.881.974.526,00

## C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		4.064 Unit	Rp	62.881.974.526
Mutasi tambah:		0 Unit	Rp	-
Transfer Masuk (Jalan)	Rp	-		
Transfer Masuk (Jaringan)	Rp	-		
Mutasi kurang:		0 Unit	Rp	-
Transfer Keluar (Jalan)	Rp	-		
Transfer Keluar (Jaringan)	Rp	-		
Saldo per 31 Desember 2022		4.064 Unit	Rp	62.881.974.526
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022			Rp	(41.211.057.119)
Nilai Buku per 31 Desember 2022			Rp	21.670.917.407

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp62.881.974.526,00 dan Rp62.881.974.526,00. Tidak terdapat mutasi tambah nilai maupun mutasi kurang nilai atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2022.

Namun terdapat **mutasi kurang satuan** berupa **Koreksi Perubahan Kuantitas (m²)** senilai 20 m² pada Jalan Khusus Kompleks (5.01.01.09.002) yang merupakan koreksi terkait perbedaan kuantitas antara SIMAK BMN dengan *e*-Rekon LK. Koreksi perubahan kuantitas ini terjadi karena tidak terkoreksinya data K3 pada aplikasi *e*-Rekon LK. Hal ini sesuai dengan BA Koreksi Kuantitas Jalan dan Jembatan No.BA-07A/BU/VI/2022 tanggal 30 September 2022. Berikut disajikan rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022:

Tabel 80 Rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akun	Aset Tetap	Total (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
134111	Jalan dan Jembatan	4.014	52.918.334.000	35.408.079.465	17.510.254.535
134112	Irigasi	4	158.137.000	31.883.038	126.253.962
134113	Jaringan	46	9.805.503.526	5.771.094.616	4.034.408.910
	Total	4.064	62.881.974.526	41.211.057.119	21,670,917,407

## Aset Tetap Lainnya Rp27.841.315.574,00

## **C.16 Aset Tetap Lainnya**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021			2.853 Unit	Rp	26.872.634.444
Mutasi tambah:			864 Unit	Rp	968.681.130
Pembelian	164	Rp	926.985.050		
Transfer Masuk (Koreksi BPK-RI)	700	Rp	41.696.080		
Mutasi kurang:			0 Unit	Rp	•
-	0	Rp	-		
Saldo per 31 Desember 2022			3.717 Unit	Rp	27.841.315.574
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022				Rp	(60.483.100)
Nilai Buku per 31 Desember 2022				Rp	27.780.832.474

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp27.841.315.574,00 dan Rp26.872.634.444,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 864 unit atau senilai Rp968.681.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
135121	Aset Tetap Lainnya	864	968.681.130
ANRI Jakarta		164	926.985.050
6.01.01.01.002	Referensi	117	113.494.000
6.01.01.02.002	Majalah	1	10.000.000
6.01.02.01.002	Video	15	478.227.050
6.01.02.01.006	Piringan Hitam	1	11.000.000
6.02.01.02.002	Sulaman / Tempelan	9	13.500.000
6.02.02.02.001	Maket/Miniatur/Replika	8	190.840.000
6.02.02.02.002	Foto Dokumen	1	15.019.000
6.02.02.02.004	Mata Uang/ Numismatik	3	29.970.000
6.06.01.06.009	Replika	5	42.735.000
6.06.01.99.999	Barang koleksi non budaya lainnya	4	22.200.000
Keterangan: Pemb	elian aset tetap lainnya berasal dari belanja APBN tahun 2022 Arsip Nas	ional Republil	Indonesia

Dalar Arsip Statis dan Tsunami (Koreksi Di K-M)	700	41.050.000
6.01.01.01.001 Monografi	700	41.696.080
Keterangan: Sebanyak 700 unit atau senilai Rp41.696.000,00 merupakan transfer	masuk yang	g berasal dari
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor	: 5706/4.2/PLk	C.03.07/XII.2022
Tanggal 01 Desember 2022.		

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp446.248.000,00

## C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp446.248.000,00 dan Rp2.399.298.000,00 dengan rincian mutasi sebagai

### berikut:

Tabel 81 Mutasi Tambah/Kurang KDP

Saldo Nilai Perole	Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 2 Un					
Mutasi tambah:	Mutasi tambah: 143 Unit					
7.01.01.01.003	Perolehan KDP - G&B	5 Unit	Rp	229.744.430		
7.01.01.01.002	Perolehan KDP - P&M	58 Unit	Rp	1.591.854.112		
7.01.01.01.003	Pengembangan KDP - G&B	21 Unit	Rp	2.157.680.595		
7.01.01.01.002	Pengembangan KDP - P&M	58 Unit	Rp	3.953.363.780		
7.01.01.01.003	Transfer Masuk KDP - G&B	1 Unit	Rp	125.515.000		
Mutasi kurang:	Mutasi kurang: -144 Unit			Rp	10.011.207.917	
7.01.01.01.002	Penghapusan/Penghentian KDP - P&M	1 Unit	Rp	1.953.050.000		
7.01.01.01.003	Transfer Keluar KDP - G&B	1 Unit	Rp	125.515.000		
7.01.01.01.003	Koreksi Pencatatan KDP - G&B	1 Unit	Rp	13.010.000		
7.01.01.01.003	KDP yang menjadi Aset Definitif - G&B	25 Unit	Rp	2.374.415.025		
7.01.01.01.002	KDP yang menjadi Aset Definitif - P&M	116 Unit	Rp	5.545.217.892		
Saldo per 31 Desember 2022 1 Unit					Rp	446.248.000
Akumulasi Penyu	skumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022					
Nilai Buku per 31	Desember 2022				Rp	446.248.000

Terdapat **mutasi tambah** Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp8.058.157.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Perolehan/Penambahan KDP senilai Rp1.821.598.542,00 yang terdapat pada:
  - a. ANRI Jakarta sebesar Rp1.716.134.112,00 dengan rincian:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	62	1.716.134.112
7.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	58	1.591.854.112
7.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4	124.280.000

- b. Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp105.464.430,00 berupa pembuatan studio pembelajaran yang merupakan alih fungsi kamar asrama menjadi studio pembelajaran.
- **Pengembangan KDP** senilai Rp6.111.044.375,00 yang terdapat pada:
  - a. ANRI Jakarta sebesar Rp5.837.024.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	77	5.837.024.380
7.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	58	3.953.363.780
7.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	19	1.883.660.600

- Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp274.019.995,00 merupakan pembuatan studio pembelajaran yang merupakan alih fungsi kamar asrama menjadi studio pembelajaran.
- Transfer Masuk KDP senilai Rp125.515.000,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta merupakan penambahan nilai gedung dan bangunan berupa *raise floor* pada ruang server Pusdiklat Kearsipan. Transfer masuk ini berdasarkan Berita Acara Nomor BA.26A/BU/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Terdapat **mutasi kurang** Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp10.011.207.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan/Penghentian KDP senilai Rp1.953.050.000,00 yang merupakan penghentian terhadap peralatan dan mesin dalam pengerjaan NUP 232 yang merupakan pembelian scanner LIPSNER SMITH CF9400HFE pada tahun 2021. Mekanisme pembayaran barang tersebut dilakukan menggunakan termin sehingga dicatat ke dalam KDP dan atas barang tersebut telah dilakukan pembayaran secara penuh pada tahun 2021 sedangkan pekerjaan barang baru dapat terselesaikan pada bulan Februari 2022 dengan BAST No. PL.01/473.17/2021 tanggal 08/02/2022. Atas dasar penyelesaian pekerjaan barang tersebut, dilakukan Penyelesaian KDP dan selanjutnya diakui sebagai saldo awal pos Peralatan dan Mesin.
- Transfer Keluar KDP senilai Rp125.515.000,00 berasal dari Pembangunan Raised Floor Gedung C2 Lantai 2 Pusdiklat ANRI, Bogor yang pelaksanaannya dilakukan secara Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Dikarenakan Gedung C2 Lantai 2 Pusdiklat ANRI adalah milik Satker ANRI Bogor maka setelah proses pekerjaannya selesai Satker ANRI Jakarta melakukan transfer keluar KDP untuk pembangunan tersebut, hal ini sesuai dengan BAST No. BA.26A/BU/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
- Koreksi Pencatatan KDP senilai Rp 13.010.000,00 berasal dari biaya pengelolaan kegiatan *fire suppression* (rapat *fullday*) Gedung O Lantai

- 2. Biaya pengelolaan kegiatan *fire suppression* ini seharusnya masuk ke dalam NUP KDP 36 hanya saja NUP KDP 36 tersebut sudah menjadi aset definitif dengan NUP 11. Dikarenakan keterlambatan berkas yang diterima oleh operator Aset maka biaya pengelolaan kegiatan itu menjadi Perolehan KDP dengan NUP KDP 39, dan NUP KDP 39 ini dilakukan koreksi pencatatan KDP guna menjadi koreksi perubahan nilai bertambah untuk Gedung O NUP 11. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Koreksi No.BA.40/BU/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Berita Acara Koreksi Kurang Catat KDP.
- KDP yang menjadi Aset Definitif senilai Rp7.919.632.917,00 yang terdapat pada satuan kerja:

2	ANRI Jakarta	conilai P	n7 /1/ 6	22 /02	00 dongs	n rincian:
a.	ANKI Jakarta	senilai K	D/.414.b	33.492.	uu denga	n rincian:

No Kegiatan		No. BAST	Nilai (Rp)
A	A Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan		5.545.217.892
1	Pengadaan Sarana Pengujian Arsip	PL.01/543.13/2022 Tgl. 15/12/2022	1.926.518.775
2	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip	PL.01/533.13/2022 Tgl. 04/11/2022	1.057.935.117
3	Pengadaan Smart Rack dan Switch Port	PL.01/756.11/2022 Tgl. 28/11/2022	376.290.000
4	Pengadaan Peralatan Restorasi	PL.01/845.12/2022 Tgl. 23/12/2022	2.184.474.000
В	Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan		1.869.415.600
1	Fire Suppression Gedung O Lt.2	Kuitansi No. 120-06 Tgl. 16/12/2022	1.115.464.600
2	Renovasi Interior Gedung F Lt.1	PL.01/825.14/2022 Tgl. 15/12/2022	753.951.000
	TOTAL	7.414.633.492	

 Pusdiklat Kearsipan senilai Rp504.999.425,00 yang merupakan pembuatan studio pembelajaran yang merupakan alih fungsi kamar asrama menjadi studio pembelajaran.

## Penjelasan Sisa KDP

Sisa KDP senilai Rp446.248.000,00 merupakan pembayaran belanja modal pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan perluasan Gedung B ANRI dengan NUP KDP 35 SPM No 830 tanggal 22/07/2021 SP2D No 211391303021403 tanggal 27/07/2021 senilai Rp557.810.000,00 dan Koreksi nilai KDP (koreksi Gedung B kodefikasi 7010101003 NUP 35) senilai Rp111.562.000,00 berupa pengembalian belanja Konsultan Perencana sebesar 20% dari total nilai Rp557.810.000,00 dengan NTPN No. C61952G4UUBEVI9Q Tanggal 03 Desember 2021. Pengembalian belanja dilakukan akibat Tender Konstruksi Gedung B dan Konsultan Pengawas belum terlaksana yang disebabkan adanya refocussing anggaran, sehingga nilai KDP Gedung B menjadi sebesar Rp446.248.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp338.122.973.305,00)

## C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp338.122.973.305,00) dan sebesar (Rp302.338.418.590,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022:

Tabel 82 Perbandingan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	281.121.046.237	(217.069.298.823)	(203.155.557.039)
2	Gedung dan Bangunan	369.395.018.369	(79.782.134.263)	(61.619.440.610)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.881.974.526	(41.211.057.119)	(37.502.937.841)
	Jalan dan Jembatan	52.918.334.000	(35.408.079.465)	(31.906.028.558)
	Irigasi	158.137.000	(31.883.038)	(26.086.122)
	Jaringan	9.805.503.526	(5.771.094.616)	(5.570.823.161)
4	Aset Tetap Lainnya	27.841.315.574	(60.483.100)	(60.483.100)
	Total	741.239.354.706	(338.122.973.305)	(302.338.418.590)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Penambahan penyusutan Aset Tetap dan Koreksi Nilai

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan (Rp)	Koreksi Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Peralatan & Mesin	203.155.557.039	13.913.741.784		217.069.298.823
2	Gedung & Bangunan	61.619.440.610	18.162.693.653		79.782.134.263
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.502.937.841	3.708.119.278	-	41.211.057.119
	Jalan & Jembatan	31.906.028.558	3.502.050.907	-	35.408.079.465
	Irigasi	26.086.122	5.796.916	-	31.883.038
	Jaringan	5.570.823.161	200.271.455	-	5.771.094.616
4	Aset Tetap Lainnya	60.483.100	-	-	60.483.100
	Jumlah	302.338.418.590	35.784.554.715	-	338.122.973.305

Aset Tak Berwujud Rp26.934.084.967,00

## **C.19 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp26.934.084.967,00 dan Rp22.227.611.637,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Rincian Perolehan Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai (Rp)			
1	Software Komputer	26.934.084.967			
2	ATB Lainnya	0			
Jumla	Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 26.934.084.				

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Selama Tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebanyak 39 unit atau senilai Rp6.246.518.280,00 dan mutasi kurang sebanyak 132 unit atau senilai Rp1.540.044.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	501 Unit	Rp	22.227.611.637,00
Mutasi tambah:	39 Unit	Rp	6.246.518.280,00
Saldo Awal (Koreksi BPK-RI)	1 Unit	Rp	605.000.000,00
Pembelian	37 Unit	Rp	1.159.632.600,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP		Rp	940.000.000,00
Pegembangan melalui KDP		Rp	3.027.766.980,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1 Unit	Rp	514.118.700,00
Mutasi kurang:	132 Unit	Rp	1.540.044.950,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	132 Unit	Rp	1.540.044.950,00
Saldo per 31 Desember 2022	408 Unit	Rp	26.934.084.967,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Saldo per 31 Desember 2022		Rp	20.937.213.857,00
Nilai Buku per Saldo per 31 Desember 2022		Rp	5.996.871.110,00

Terdapat mutasi tambah senilai Rp6.246.518.280,00 terdiri dari:

- Saldo Awal sebanyak satu unit atau senilai Rp605.000.000,00 merupakan koreksi BPK-RI atas pekerjaan gedung dan bangunan belanja tahun 2019 di satker BAST yang di antaranya memuat software building auto system dan belum diberikan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) per 31 Desember 2022 sehingga dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan (audited).
- Pembelian senilai Rp1.159.632.600,00 yang terdapat pada satuan kerja:
  - a. ANRI Jakarta senilai Rp1.116.282.600,00 dengan rincian:

No	Jenis ATB	Deskripsi	No. BAST	NUP	Nilai (Rp)			
1	Software Komputer	Aplikasi Akreditasi Kearsipan	PL.01/682.11/2022 Tgl. 13/12/2022	1073	180.902.250			
2	Software Komputer	Website Balai Arsip Statis Tsunami	BAST No. PL.01/694.11/2022 Tgl. 14/12/2022	1074	116.328.000			
3	Software Komputer	Aplikasi Website Pusdiklat Kearsipan	PL.01/831.10/2022 Tgl. 10/12/2022	1076	124.153.500			
4	Software Komputer	Portal Glam Indonesia	PL.01/831.10/2022 Tgl. 10/12/2022	1077	119.724.600			
5	Software Komputer	Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis (SIJFA)	PL.01/673.11/2022 Tgl. 07/12/2022	1078	231.962.250			
6	Software Komputer	Aplikasi Manajemen Kinerja Kelembagaan	PL.01/686.11/2022 Tgl. 12/12/2022	1079	183.483.000			
7	Software Komputer	Aplikasi Crowdsourcing Penyelamatan Arsip Covid 19	PL.01/901.14/2022 Tgl. 21/12/2022	1080	159.729.000			
	Total							

- b. Pusdiklat Kearsipan senilai Rp43.350.000,00 yang berasal dari pembelian *Microsoft Office Professional Plus* 2021 sebanyak satu paket.
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp940.000.000,00
   yang terdapat pada satker ANRI Jakarta dengan rincian:

<b>N</b> 1-	La di ATD	Deskripsi No BACT			NUP	AUL (D.)
No	Jenis ATB	Deskripsi	No. BAST	KDP	Definitif	Nilai (Rp)
1	Software Komputer	Software NOC	PL.01/315.16/2022 Tgl. 23/12/2022	1	1075	940.000.000

• **Pengembangan melalui KDP** senilai Rp3.027.766.980,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta dengan rincian:

No	Jenis ATB	Deskripsi	No. BAST	NUP		Nilai (Rp)	
NO	Jellis Alb	резктры	NO. DASI	KDP	Definitif	Iviiai (Kp)	
1	Software Komputer	Aplikasi SIKN dan ЛКN	PL.01/431.14/2022 Tgl. 18/12/2022	2	1032	2.380.081.980	
2	Software Komputer	Aplikasi Pengumpulan Data (SIDATA)	PL.01/425.18/2022 Tgl. 18/12/2022	3	897	647.685.000	
	Total					3.027.766.980	

 Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp514.118.700,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta dengan rincian:

No	Jenis ATB	Deskripsi	No. BAST	NUP	Nilai (Rp)	
1	Software Komputer	Website ANRI	PL.01/870.08/2022 Tgl. 3/10/2022	1025	49.950.000	
2	Software Komputer	Aplikasi Pengawasan Kearsipan	PL.01/694.11/2022 Tgl. 14/12/2022	981	128.227.200	
3	Software Komputer	Aplikasi Helpdesk SIKN JIKN	PL.01/746.11/2022 Tgl. 19/12/2022	1067	335.941.500	
	Total					

Terdapat **mutasi kurang** senilai Rp1.540.044.950,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta berasal dari penghentian aset dari penggunaan senilai Rp1.540.044.950,00 sesuai dengan Kepka ANRI Nomor 492 Tahun 2022.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Rp0,00

## C.19.a Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang belum selesai pengerjaannya. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut disajikan mutasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		0 Unit	Rp	-
Mutasi tambah:		9 Unit	Rp	3.967.766.980
Perolehan KDP	Rp	1.190.330.094		
Pengembangan KDP	Rp	2.777.436.886		
Mutasi kurang:		9 Unit	Rp	3.967.766.980
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	940.000.000		
Pengembangan melalui KDP	Rp	3.027.766.980		
Saldo per 31 Desember 2022		0 Unit	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022			Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022			Rp	-

Terdapat mutasi tambah senilai Rp3.967.766.980,00 terdiri dari:

 Perolehan KDP senilai Rp1.190.330.094,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta berupa perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) berasal dari belanja APBN tahun 2022 senilai Rp 1.190.330.094,00 berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan kodefikasi 8020101001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis ATB	Deskripsi	Kode Barang	No. BAST	NUP KDP	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	Software NOC	8020101001	PL.01/315.12/2022 Tgl. 31/08/2022	1	Pembayaran	282.000.000,00
	dalam pengerjaan					Termin I (30%)	
2	Aset Tak Berwujud	Aplikasi SIKN JIKN	8020101001	PL.01/431.10/2022 Tgl. 16/09/2022	2	Pembayaran	714.024.594,00
	dalam pengerjaan					Termin I (30%)	
3	Aset Tak Berwujud	Aplikasi SIDATA	8020101001	PL.01/425.14/2022 Tgl. 21/09/2022	3	Pembayaran	194.305.500,00
dalam pengerjaan				Termin I (30%)			
	Total						

 Pengembangan KDP senilai Rp2.777.436.886,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta berupa perolehan pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berasal dari belanja APBN tahun 2022 senilai Rp2.777.436.886,00 berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan kodefikasi 8020101001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis ATB	Deskripsi	Kode Barang	No. BAST	NUP KDP	Keterangan	Nilai (Rp)
1	ATB Dalam Pengerjaan	Perangkat Lunak NOC	8020101001	PL.01/315.14/2022 Tgl. 11/11/2022	1	Termin II Software NOC	470.000.000,00
2	ATB Dalam Pengerjaan	Aplikasi Pengumpulan Data (SIDATA)	8020101001	PL.01/425.16/2022 Tgl. 11/11/2022	3	Termin II SIDATA	323.842.500,00
3	ATB Dalam Pengerjaan	APLIKASI SIKN dan JIKN	8020101001	PL.01/431.12/2022 Tgl. 16/11/2022	2	Termin II Aplikasi SIKN dan JIKN	1.190.040.990,00
4	ATB Dalam Pengerjaan	Perangkat Lunak NOC	8020101001	PL.01/315.16/2022 Tgl. 23/12/2022	1	Termin III Software NOC	188.000.000,00
5	ATB Dalam Pengerjaan	APLIKASI SIKN dan JIKN	8020101001	PL.01/431.14/2022 Tgl. 18/12/2022	2	Termin III Aplikasi SIKN dan JIKN	476.016.396,00
6	ATB Dalam Pengerjaan	Aplikasi Pengumpulan Data (SIDATA)	8020101001	PL.01/425.18/2022 Tgl. 18/12/2022	3	Termin III SIDATA	129.537.000,00
	Total 2						

Terdapat mutasi kurang senilai Rp3.967.766.980,00 terdiri dari:

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp940.000.000,00
 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta berasal dari belanja APBN tahun
 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis ATB Deskripsi		No. BAST	Kodefikasi	NUP		Nilai (Rp)	
NU	Jenis ATD	Deskripsi	NU. DASI	KUUEIIKASI	KDP	Definitif	Milai (NP)	
1	Software Komputer	Software NOC	PL.01/315.16/2022 Tgl. 23/12/2022	8010101001	1	1075	940.000.000	
	Total						940.000.000	

 Pengembangan melalui KDP senilai Rp3.027.766.980,00 yang terdapat pada satker ANRI Jakarta berasal dari belanja APBN tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	o Jenis ATB	Deskripsi	N- DACT	Kodefikasi	NUP		Nilai (Rp)
NO		Deskripsi	No. BAST	кодетіказі	KDP	Definitif	Milai (KP)
1	Software Komputer	Aplikasi SIKN dan JIKN	PL.01/431.14/2022 Tgl. 18/12/2022	8010101001	2	1032	2.380.081.980
2	Nottware Komputer	Aplikasi Pengumpulan Data (SIDATA)	PL.01/425.18/2022 Tgl. 18/12/2022	8010101001	3	897	647.685.000
	Total					3.027.766.980	

Aset Lain-Lain Rp1.162.593.490,00

# C.20 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.162.593.490,00 dan Rp7.174.207.984,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang dengan rincian sebagai berikut:

aldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 247 Unit				7.174.207.984
Mutasi tambah:		772 Unit	Rp	8.756.587.044
Penghentian Aset dari Penggunaan - AT	Rp	7.216.542.094		
Penghentian Aset dari Penggunaan - ATB	Rp	1.540.044.950		
Mutasi kurang:		872 Unit	Rp	(14.768.201.538)
Penghapusan	Rp	(2.006.044.950)		
Pencatatan Barang akan dihapuskan (Terkoreksi)	Rp	(12.762.156.588)		
Saldo per 31 Desember 2022		147 Unit	Rp	1.162.593.490
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022			Rp	(1.162.593.490)
Nilai Buku per 31 Desember 2022			Rp	-

Terdapat **mutasi tambah** berupa Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 772 unit atau senilai Rp8.756.587.044,00 yang terdapat pada satker:

- a. ANRI Jakarta senilai Rp7.706.224.881,00 yang terdiri atas:
  - Koreksi perubahan kondisi BMN menjadi barang rusak berat sebesar Rp6.166.179.931,00 berdasarkan berita acara Nomor: BA-24/BU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, BA-28/BU/XI/2022 tanggal 11 November 2022, BA-34/BU/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022; dan
  - Penghentian aset (software) dari penggunaan sebesar Rp1.540.044.950,00 sesuai dengan Kepka ANRI Nomor 492 Tahun 2022.
- b. Pusdiklat Kearsipan senilai Rp671.885.823,00. Berdasarkan BA nomor PL.02.04/386/2022 tanggal 26 September 2022, terdapat tiga unit BMN yang merupakan hasil Normalisasi BMN (Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah) yaitu Alat Penghancur Kertas NUP 3, P.C Unit NUP 25, dan Decoder NUP 2 (berdasarkan Surat Keterangan Normalisasi BMN Nomor PL.02.04/423.A/2021 tanggal 31 Desember 2021). BMN yang sudah dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah tersebut telah diusulkan penghapusannya berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PL.02.03/4488/2022 tanggal 22 November 2022;

c. Balai Arsip Statis dan Tsunami senilai Rp378.476.340,00 merupakan koreksi perubahan kondisi BMN menjadi barang rusak berat berdasarkan Berita Acara Penetapan Barang Rusak Berat dan Penghentian Status Penggunaan No:PL.02.04/44/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp14.768.201.538,00 yang berasal dari:

 Penghapusan senilai Rp2.006.044.950,00 berasal dari satker ANRI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi		12	- 466.000.000		
3.02.01.01.001	Sedan	Unit	1	- 466.000.000		
3.02.01.02.003	2.01.02.003 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Unit			-		
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	4	-		
Keterangan:						
- Transaksi pen	ghapusan sebesar Rp 466.000.000 merupakan pengh	apusan i	mobil kendar	aan perorangan		
dinas dengan t	indak lanjut penjualan tanpa melalui lelang berdasa	arkan Ke	pka ANRI No	mor 298 Tahun		
2022 Tgl. 19/07/2022;						
- Transaksi pen	ghapusan minibus sejumlah 7 unit dan sepeda moto	r sejuml	ah 4 unit ber	dasarkan Kepka		

162151	Software Komputer	132	-1 540 044 950
ANKI NOITIOI 37	3 Talluli 2022 Tgl. 23/09/2022.		

162151	Software Komputer		132	-1.540.044.950
8.01.01.01.001	Software Komputer	Dummy	132	-1.540.044.950

#### Keterangan:

Penghapusan barang milik negara berupa aset tak berwujud dengan tindak lanjut pemusnahan berdasarkan Kepka ANRI Nomor 492 Tahun 2022

- 2. **Pencatatan barang yang akan dihapuskan** senilai Rp12.762.156.588,00 yang terdapat pada satker:
  - a. ANRI Jakarta sebesar Rp11.666.574.817,00 berdasarkan Berita Acara Nomor 16/BU/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 dengan rincian:

KODE	URAIAN	SAT	VOL	NILAI
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		552	-11.666.574.817
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	12	-743.929.700
3.05.01	Alat Kantor	Buah	4	-387.849.942
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	3	-29.502.391
3.06.01	Alat Studio	Buah	3	-639.862.500
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	Buah	2	-2.112.818.000
3.10.01	Komputer Unit	Buah	51	-604.302.500
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	11	-1.643.055.526
Total			86	-6.161.320.559
(Koreksi BPK-RI)				
3.05.01	Alat Kantor	Buah	156	-236.896.307
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	96	-291.640.733
3.06.01	Alat Studio	Buah	5	-77.489.500
3.06.02	Alat Komunikasi	Buah	10	-2.264.385

Total			466	-5.505.254.258
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Tanah	Unit	1	-122.353.000
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	Buah	4	-17.820.000
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	48	-317.248.394
3.10.01	Komputer Unit	Buah	115	-1.589.368.538
3.07.01	Alat Kedokteran Bu		3	-1.760.000
3.06.03	Peralatan Pemancar	Buah	28	-2.848.413.401

#### Keterangan:

- Berdasarkan pemeriksaan BPK-RI atas dokumen sumber administrasi usulan penghapusan satker ANRI Jakarta terdapat nilai Rp5.382.901.258,00 yang belum dilakukan penginputan pada aplikasi SAKTI sehingga nilai tersebut dilakukan koreksi dalam laporan keuangan (audited).
- Pada tahun 2021, ANRI Jakarta telah melakukan proses penghapusan atas BMN dengan menerbitkan administrasi
  penghapusan atas BMN dengan nilai sebesar Rp122.353.000,00, namun penginputan usulan penghapusan tersebut
  belum dilakukan pada aplikasi SAKTI sehingga masih termasuk ke dalam nilai Aset Lain-Lain tahun 2022 dan dilakukan
  koreksi dalam laporan keuangan (audited).

## b. Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp1.095.581.771,00 dengan rincian:

KODE	URAIAN	SAT	VOL	NILAI
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		308	-1.095.681.771
3.05.01	Alat Kantor	Buah	17	-190.764.779
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	269	-628.695.692
3.06.01	Alat Studio	Buah	1	-7.700.000
3.10.01	Komputer Unit	Buah	13	-175.074.200
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	1	-1.100.000
3.11.02	Decoder/DE 200	Buah	1	-35.300.000
3.19.01	Peralatan Permainan	Buah	6	-57.047.100
Total			308	-1.095.681.771

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp22.099.807.347,00)

## C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp22.099.807.347,00) dan (Rp23.262.058.451,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan/ Amortisasi 2022 (Rp)	Akm. Penyusutan/ Amortisasi 2021 (Rp)
Α	Aset Tak Berwujud			
	Software Komputer	26.934.084.967	(20.937.213.857)	(16.125.550.272)
	Jumlah	26.934.084.967	(20.937.213.857)	(16.125.550.272)
В	Aset Lain-lain	1.162.593.490	(1.162.593.490)	(7.136.508.179)
	Jumlah	1.162.593.490	(1.162.593.490)	(7.136.508.179)
	Total	28.096.678.457	(22.099.807.347)	(23.262.058.451)

Aset Tak Berwujud berupa *software* komputer memiliki akumulasi amortisasi sebesar Rp20.937.213.857,00 dan Aset Lain-Lain yakni aset

tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah memiliki akumulasi penyusutan sebesar Rp1.162.593.490,00. Mutasi perubahan akumulasi amortisasi dan penyusutan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 82 Mutasi Perubahan Akumulasi Penyusutan

No	Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Penghentian Aset dari Penggunaan	Pencatatan BMN yang mau dihapuskan	Penghapusan	Akumulasi Penyusutan Akhir
1	Software Komputer	(16.654.925.272)	(5.819.733.535)	1.537.444.950			(20.937.213.857)
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(7.136.508.179)	(34.847.461)	(7.070.637.594)	12.613.399.744	466.000.000	(1.162.593.490)
Jumlah		(23.791.433.451)	(5.854.580.996)	(5.533.192.644)	12.613.399.744	466.000.000	(22.099.807.347)

Utang kepada Pihak Ketiga Rp2.129.487.302,00

## C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp2.129.487.302,00 dan Rp1.976.132.042,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Utang kepada Pihak Ketiga ANRI dalam hal ini ialah sebagai berikut:

a. Pengakuan tagihan sebesar Rp885.108.241,00 atas pemakaian bebanbeban di bulan Desember 2022 pada masing-masing satuan kerja yang pembayarannya baru akan dilakukan di awal tahun 2023. Berikut rincian Utang kepada Pihak Ketiga atas tagihan per 31 Desember 2022:

Tabel 83 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga ANRI

No.	Kode Satker	Uraian	Tgl. Invoice	Nominal (Rp)
Tagil	nan PDAM Bula	n Desember 2022 522113		
1	450448	8.490.525		
2	681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	Jan-23	110.510
3	3 418929 Pusat Jasa Kearsipan		Jan-23	0
4	4 418934 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Jan-23		Jan-23	341.600
		8.942.635		
Tagil	nan Listrik Bulai	n Desember 2022 522111		
1	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Jan-23	755.919.850
2	681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	Jan-23	58.945.261
3	3 418929 Pusat Jasa Kearsipan Jan-23		Jan-23	28.202.144
4	4 418934 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Jan-23		Jan-23	13.495.751
		Jumlah		856.563.006
		Jumlah		856.56

Tagil	agihan Telepon Bulan Desember 2022 – 522112							
1	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Jan-23	1.878.870				
2	681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	Jan-23	1.079.688				
3	418929	Pusat Jasa Kearsipan	Jan-23	229.072				
4	418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Jan-23	135.442				
		3.323.072						
Tagil	Tagihan Keperluan Operasional Perkantoran Bulan Desember 2022 521111							
1	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Feb-23	15.946.278				
2	418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Jan-23	250.000				
		Jumlah		16.196.278				
Tagil	nan Pengiriman	Surat Dinas Pos Pusat Bulan Desember 2022 521114	l					
1	450448	83.250						
		83.250						
TO	TAL BELANJA BA	ARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PERIODE DESE	MBER 2022)	885.108.241				

- b. Pengakuan tagihan sebesar **Rp1.244.379.061,00** atas belanja pegawai yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:
  - Perhitungan (neto) antara kurang dan lebih bayar tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2022 sebesar Rp15.525.043,00. Setelah tahun anggaran 2022 berakhir telah diperoleh perhitungan secara penuh atas tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2022 yakni yang dihitung berdasarkan kehadiran pegawai tanggal 23 November 22 Desember 2022 dengan posisi kurang bayar tunjangan kinerja bulan Desember sebesar Rp27.928.493,00 dan lebih bayar tunjangan kinerja bulan Desember 2022 sebesar Rp12.403.450,00. Pengakuan dan pencatatan dilakukan melalui perhitungan secara neto antara kurang/lebih bayar tunjangan kinerja.

Adanya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-8/PB/2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2022 yang mengatur bahwa batas pengajuan SPM-LS pembayaran honorarium, **tunjangan**, vakasi, dan penghasilan PPNPN maksimal tanggal 12 Desember 2022 mengakibatkan perhitungan **tunjangan kinerja** bulan Desember 2022 di Arsip Nasional RI belum dapat dilakukan secara penuh sampai dengan tanggal 22 Desember 2022. Atas hal tersebut, **tunjangan kinerja** periode Desember 2022 (*tanggal kehadiran 23 November – 22* 

Desember) dibayarkan berdasarkan perhitungan tunjangan kinerja periode November 2022 (tanggal kehadiran 23 Oktober – 22 November). Adapun jika terdapat kurang bayar atau lebih bayar berdasarkan perhitungan riil kehadiran pegawai akan diperhitungkan kembali pada periode Januari tahun 2022 yang dibayarkan pada bulan Februari 2022;

- Kekurangan Gaji Pegawai ANRI atas Tunjangan Fungsional dan Tunjangan PAS Bulan Februari-Oktober 2022 Berdasarkan No. Daftar Gaji: 001093 dan 001094 sebesar Rp73.912.140,00;
- Pengakuan Beban Tunjangan Kinerja Pegawai dan Uang Makan Pegawai tanggal 23-31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.067.003.878,00 dan Rp87.938.000,00. Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Pasal 16 menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan kinerja didasarkan pada kehadiran tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berjalan. Berpedoman pada peraturan tersebut maka perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai ANRI bulan Desember dihitung berdasarkan pada kehadiran pegawai tanggal 23 November 2021 22 Desember 2021.

Utang yang Belum Ditagihkan Rp0,00

#### **C.23 Utang yang Belum Ditagihkan**

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan ini berasal dari utang yang belum diterima tagihannya yang berasal dari pencatatan Berita Acara Serah Terima (BAST) tetapi belum terbit SPM.

Hibah yang Belum Disahkan Rp0,00

#### C.24 Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh KL/SKPD

tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN/BUD). Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh K/L penerima kepada Kuasa BUN.

## Uang Muka dari KPPN Rp0,00

# C.25 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. Berikut rincian Uang Muka dari KPPN pada TA 2022 dan TA 2021:

Tabel 88 Rincian Uang Muka dari KPPN

KODE SATKER	NAMA SATKER	2022 (Rp)	2021 (Rp)
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	•	•
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	-	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)		
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)		
	JUMLAH		

# Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

#### **C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

## Ekuitas Rp1.216.188.351.332,00

## C.27 Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.216.188.351.332,00 dan Rp1.234.482.450.232,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) atau *due-to/due-from* merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp18.868.813.156,00) sedangkan DKEL sebesar Rp247.549.140.859,00.

Tabel 89 Rincian nilai DDEL/DKEL seluruh satker

Kode Satker	Nama Satker	DDEL	DKEL
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	(2.850.668.956)	225.199.893.901
087.01.681464			5.147.104.936
087.01.418929			6.611.576.853
087.01.418934			10.590.565.169
	JUMLAH	(18.868.813.156)	247.549.140.859

Catatan Penting Lainnya atas Neraca

#### **CATATAN PENTING LAINNYA ATAS NERACA**

#### I. Persediaan

Terdapat barang usang dan rusak pada tahun 2021 yang sudah dihapuskan dengan Persediaan Usang senilai Rp3.287.765,00 dan Persediaan Rusak senilai Rp53.685.000,00 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Barang Persediaan Tahun 2021 Nomor: BA.11/BU/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, Berita Acara Penghapusan Barang Persediaan Tahun 2021 Nomor: BA.20a/BU/XI/2021 tanggal 20 November 2021, Berita Acara Penghapusan Barang Persediaan Tahun 2021 Nomor: BA.21.a/BU/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021. Barang-barang tersebut sudah terhapus dari Aplikasi Persediaan (sebelum migrasi) namun keterangan/informasi atas data tersebut masih termuat dalam aplikasi SAKTI (setelah migrasi) yang mengakibatkan masih munculnya angkat tersebut pada bagian keterangan Laporan Persediaan 2022. Namun data tersebut tidak mempengaruhi nilai Neraca 2022.

# II. <u>Tanah</u>

Hibah Tanah seluas 417 m² pada satker Balai Arsip Statis dan Tsunami sebesar Rp669.737.445,00 merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Aceh di Jalan T. Nyak Arief, Lampineung dengan kodefikasi barang 2010104001 NUP 1 berdasarkan BAST Nomor: 166/BA/2021 dan PL.01.02/385/2021 tanggal 30 November 2021 serta Nomor Register 2T57EBFA.

# III. Utang kepada Pihak Ketiga (Pegawai)

Kurang bayar tunjangan kinerja bulan Desember sebesar Rp27.928.493,00 telah dibayarkan pada tanggal 9 Februari 2023 dengan nomor SP2D 231391302002577 dan 231391305000143 tanggal 9 Februari 2022.

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp18.051.904.844,00

# D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.051.904.844,00 dan Rp14.058.121.456,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.993.783.388,00 atau 28,41 persen dari periode sebelumnya. Pendapatan tersebut terdiri atas :

Tabel 90 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Akun

	Uraian -	Penda	apatan	Kenaikan/Penurunan	
	<u> </u>	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapat	an Negara Bukan Pajak Lainnya				
425119	Pendapatan Penjualan Hasil	9.540.000,00	3.660.000,00	5.880.000,00	160,66
	Produksi Non Litbang Lainnya				
425131	Pendapatan Sewa Tanah,	982.959.527,00	741.891.516,00	241.068.011,00	32,49
	Gedung, dan Bangunan				
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
	dan Prasarana sesuai dengan				
	Tusi				
425281	Pendapatan Akreditasi	307.000.000,00	245.600.000,00	61.400.000,00	25,00
425289	Pendapatan Pengujian,	525.300.000,00	62.900.000,00	462.400.000,00	735,14
	Sertifikasi, Kalibrasi, dan				
	Standardisasi Lainnya				
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan	9.018.500.000,00	5.221.340.000,00	3.797.160.000,00	72,72
	dan/atau Pelatihan				
425692	Pendapatan Jasa Tenaga,	7.102.698.117,00	7.707.446.860,00	(604.748.743,00)	(7,85)
	Pekerjaan, dan Informasi				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian	105.907.200,00	64.483.080,00	41.424.120,00	64,24
	Pekerjaan Pemerintah				
	Jumlah	18.051.904.844,00	14.058.121.456,00	3.993.783.388,00	28,41

Tabel 91 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	Penda	patan	Kenaikan/Penurunan		
Satuan Kerja	2022	2021	(Rp)	(%)	
ANRI Jakarta (KP)	2.261.473.544,00	1.364.702.214,00	896.771.330,00	65,71	
BAST Aceh (KD)	638.500,00	43.286.442,00	(42.647.942,00)	(98,52)	
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	6.771.292.800,00	7.417.992.800,00	(646.700.000,00)	(8,72)	
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	9.018.500.000,00	5.232.140.000,00	3.786.360.000,00	72,37	
Jumlah	18.051.904.844,00	14.058.121.456,00	3.993.783.388,00	28,41	

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari:

 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp9.540.000,00 berasal dari Direktorat Layanan & Pemanfaatan Satker ANRI Jakarta berupa Hasil Penerbitan Naskah Sumber Periode RI (1945 -Sekarang), Hasil Penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum RI (VOC -Belanda), dan Jasa Penggandaan, Reproduksi, dan Transkripsi;

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp982.959.927,00 berasal dari Biro Umum Satker ANRI Jakarta berupa pemanfaatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan ANRI khususnya Gedung Gajah Mada ANRI oleh masyarakat umum dan rumah dinas ANRI oleh pejabat Eselon I ANRI;
- Pendapatan Akreditasi sebesar Rp307.000.000,00 berasal dari Pusat Akreditasi Kearsipan Satker ANRI Jakarta berupa pelayanan Jasa Akreditasi kepada beberapa lembaga/badan hukum;
- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp525.300.000,00 berasal dari Direktorat SDM Kearsipan & Sertifikasi Satker ANRI Jakarta atas jasa sertifikasi yang dilakukan kepada SDM kearsipan;
- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp9.018.500.000,00 berasal dari Satker Pusdiklat Kearsipan ANRI berupa pendapatan layanan diklat teknis dan diklat lainnya;
- 7. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi sebesar Rp7.102.698.117,00 berasal dari:
  - a. Satuan kerja Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp6.771.292.800,00 yakni berupa pelayanan jasa penyimpanan arsip, jasa pembuatan pedoman kearsipan, jasa pemeliharaan dan perawatan arsip, jasa penataan arsip, dan jasa pembuatan sistem aplikasi kearsipan;

URAIAN	NILAI
Jasa Penyimpanan Arsip	4.251.579.800
Jasa Pemeliharaan & Perawatan Arsip	1.330.413.000
Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan	300.000.000
Jasa Pembenahan/Penataan Arsip	889.300.000
Jasa Pembuatan Sistem Aplikasi Kearsipan	0
JUMLAH	6.771.292.800

- b. Pendapatan sebesar Rp330.766.817,00 berasal dari Direktorat Layanan & Pemanfaatan satuan kerja ANRI Jakarta yang diperoleh dari pemberian layanan jasa penggandaan, reproduksi, dan transkripsi kepada masyarakat;
- c. Pendapatan sebesar Rp638.500,00 berasal dari satuan kerja BAST yang diperoleh dari layanan peminjaman dan penggandaan arsip pada Seksi Layanan dan Pemanfaatan BAST. Adapun pendapatan

tersebut merupakan PNBP Lainnya yakni pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2019;

8. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp105.907.200,00 berasal dari Satker ANRI Jakarta. Rincian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada satuan kerja ANRI Jakarta merupakan Pembayaran denda keterlambatan atas pengadaan peralatan restorasi arsip TA 2021 sesuai kontrak nomor PL.01/473.08/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional Tahun 2022 dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 memiliki rincian sebagai berikut :

Tabel 92 Selisih LO dan LRA PNBP

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	9.540.000,00	9.540.000,00	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	478.201.011,00	(478.201.011,00)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	0,00	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	982.959.527,00	982.959.527,00	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	0,00	-
425281	Pendapatan Akreditasi	307.000.000,00	307.000.000,00	-
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	525.300.000,00	525.300.000,00	
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	9.018.500.000,00	9.018.500.000,00	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	7.102.698.117,00	7.102.698.117,00	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	105.907.200,00	125.876.900,00	(19.969.700,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	4.768.000,00	(4.768.000,00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	256.059.403,00	(256.059.403,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	52.462.998,00	(52.462.998,00)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	5.447.200,00	(5.447.200,00)
Jui	nlah Pendapatan PNBP Lainnya	18.051.904.844,00	18.868.813.156,00	(816.908.312,00)

Terdapat perbedaan realisasi pendapatan menurut Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan menurut Laporan Operasional sebesar Rp18.051.904.844,00 sedangkan menurut Laporan Realisasi

Anggaran sebesar Rp18.868.813.156,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp816.908.312,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Selisih (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(478.201.011,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(4.768.000,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(256.059.403,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(52.462.998,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	(5.447.200,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	(19.969.700,00)
Total	(816.908.312,00)

- Perbedaan selisih pada akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang/Modal TAYL, dan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS merupakan klasifikasi pendapatan di luar fungsi dan program institusi dan bukan merupakan klasifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional;
- Perbedaan selisih pada Akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan
   Pemerintah disebabkan karena adanya jurnal penyesuaian khusus (jurnal balik) dengan rincian:

	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)						
4	ANRI JAKARTA (450448)						
•	006	006 Pengakuan pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan					
		berupa pengadaan peralatan restorasi arsip tanggal 24 s.d 31 Desember 2021 (Jurnal Balik pada 01/01/2022)					
		Jumlah	19.969.700				

Beban Pegawai Rp103.405.785.971,00

## **D.2** Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp103.405.785.971,00 dan Rp99.733.645.489,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.672.140.482,00 atau 3,68 persen dari periode sebelumnya. Beban Pegawai memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 93 Rincian Beban Pegawai

		Dahan D	:	Variables /Danses	
Uraian		Beban Po	egawai 	Kenaikan/Penurur	lan
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS		50.376.892.053,00	50.643.435.160,00	(266.543.107,00)	-0,53
511111	Beban Gaji Pokok PNS	30.676.247.980,00	30.797.476.260,00	(121.228.280,00)	-0,39
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	430.429,00	438.364,00	(7.935,00)	-1,81

	Jumlah Beban Pegawai	103.405.785.971,00	99.733.645.489,00	3.672.140.482,00	3,68
Pengemb	alian Beban	-	(1.428.580,00)	1.428.580,00	-100,00
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		52.881.424.918,00	48.913.420.909,00	3.968.004.009,00	8,11
512211	Beban Uang Lembur	147.469.000,00	178.218.000,00	(30.749.000,00)	-17,25
	norarium/Lembur/Tunjangan Beban Pegawai Transito	53.028.893.918,00	49.091.638.909,00	3.937.255.009,00	8,02
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	165.025.000,00	296.420.000,00	(131.395.000,00)	-44,33
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.527.280.000,00	3.437.540.000,00	89.740.000,00	2,61
511129	Beban Uang Makan PNS	4.705.883.450,00	5.467.128.550,00	(761.245.100,00)	-13,92
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.590.198.360,00	1.617.645.540,00	(27.447.180,00)	-1,70
511125	Beban Tunj. PPh PNS	391.737.720,00	354.010.014,00	37.727.706,00	10,66
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.195.765.000,00	4.103.260.000,00	1.092.505.000,00	26,63
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.579.638.320,00	2.004.520.000,00	(424.881.680,00)	-21,20
511122	Beban Tunj. Anak PNS	513.927.884,00	514.557.732,00	(629.848,00)	-0,12
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.030.757.910,00	2.050.438.700,00	(19.680.790,00)	-0,96

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai hanya berada pada ANRI Jakarta yang terdiri dari:

- Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp50.376.892.053,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp266.543.107,00) atau -0,53 persen dibanding 31 Desember 2021;
- Beban Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito sebesar Rp53.028.893.918,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.937.255.009,00 atau 8,02 persen dibanding 31 Desember 2021;

Beban Pegawai (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp103.405.785.971,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp103.461.190.132,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp55.404.161,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Selisih LRA dan LO Beban Pegawai

Kode Uraian Jenis Beban/Belanja Akun		Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dar	ı LRA (Rp)
Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		50.376.892.053,00	50.623.494.586,00	(246.602.533,00)	Ket. Selisih
511111	Beban Gaji Pokok PNS	30.676.247.980,00	30.676.247.980,00	-	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	430.429,00	434.732,00	(4.303,00)	(PB): 4.443,00
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.030.757.910,00	2.030.757.910,00	-	
511122	Beban Tunj. Anak PNS	513.927.884,00	513.927.884,00	-	
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.579.638.320,00	1.824.620.000,00	(244.981.680,00)	(PB)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.195.765.000,00	5.124.320.000,00	71.445.000,00	(PB): 555.000,00
511125	Beban Tunj. PPh PNS	391.737.720,00	389.825.720,00	1.912.000,00	
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.590.198.360,00	1.590.198.360,00	-	
511129	Beban Uang Makan PNS	4.705.883.450,00	4.768.707.000,00	(62.823.550,00)	
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.527.280.000,00	3.530.080.000,00	(2.800.000,00)	(PB)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	165.025.000,00	174.375.000,00	(9.350.000,00)	(PB)
	lanja Honorarium / Lembur/ n Khusus & Beban Pegawai Transito	53.028.893.918,00	53.095.386.669,00	(66.492.751,00)	
512211	Beban Uang Lembur	147.469.000,00	147.469.000,00	-	
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52.881.424.918,00	52.947.917.669,00	(66.492.751,00)	
Pengemb	alian Belanja	-	(257.691.123,00)	257.691.123,00	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	(4.443,00)	4.443,00	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	-	(244.981.680,00)	244.981.680,00	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	(555.000,00)	555.000,00	
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	-	(2.800.000,00)	2.800.000,00	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	-	(9.350.000,00)	9.350.000,00	
	Jumlah Beban/Belanja Neto	103.405.785.971,00	103.461.190.132,00	(55.404.161,00)	

\*) PB: Pengembalian Belanja

Sistem aplikasi SAKTI menerapkan prinsip *net value* pada beban atas setiap pengembalian belanja/beban dalam pencatatan berbasis akrual sehingga nilai beban yang tertera dalam laporan neraca percobaan akrual merupakan nilai neto yakni nilai bruto dikurangi dengan pengembalian beban tahun berjalan. Sementara itu, nilai belanja disajikan secara terpisah dengan nilai pengembalian belanja tahun berjalan dalam pencatatan berbasis kas pada laporan neraca percobaan kas.

Selisih pada pos Beban/Belanja Pegawai akun Gaji dan Tunjangan PNS dan Tunjangan Khusus/Kegiatan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) telah diuraikan sebelumnya pada segmen Laporan Realisasi Anggaran – 3.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan 3.3.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

#### D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.508.470.190,00 dan Rp4.759.308.978,00 mengalami kenaikan sebesar Rp749.161.212,00 atau 15,74 persen dari periode sebelumnya. Beban Persediaan berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Akun

	Urajan	Beban Pe	rsediaan	Kenaikan/Penurunan		
	Ol didil	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)	
Beban Pe	rsediaan	5.508.470.190,00	4.759.308.978,00	749.161.212,00	15,74	
593111	Beban Persediaan konsumsi	5.504.515.691,00	4.754.723.386,00	749.792.305,00	15,77	
593131	Beban Persediaan bahan baku	2.515.000,00	288.000,00	2.227.000,00	773,26	
593149	Beban Persediaan Lainnya	1.439.499,00	4.297.592,00	-2.858.093,00	-66,50	
Pengemb	palian Beban	-	-	0,00	0,00	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	0,00	0,00	
	Jumlah Beban Persediaan	5.508.470.190,00	4.759.308.978,00	749.161.212,00	15,74	

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan berdasarkan satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja

Sahuan Kasia	Beban Per	rsediaan	Kenaikan/Penurunan		
Satuan Kerja	2022	2021	(Rp)	(%)	
ANRI Jakarta (KP)	4.794.307.790,00	4.222.571.503,00	571.736.287,00	13,54	
BAST Aceh (KD)	190.875.500,00	175.537.775,00	15.337.725,00	8,74	
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	276.226.900,00	290.266.700,00	-14.039.800,00	-4,84	
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	247.060.000,00	70.933.000,00	176.127.000,00	248,30	
Jumlah	5.508.470.190,00	4.759.308.978,00	749.161.212,00	15,74	

Beban Persediaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp5.508.470.190,00 sedangkan realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp5.670.147.041,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp161.676.851,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97 Selisih LO dan LRA Beban/Belanja Persediaan

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Beban/B	elanja Persediaan	5.508.470.190,00	5.670.147.041,00	(161.676.851,00)
593111	Beban Persediaan konsumsi	5.504.515.691,00	000	5.504.515.691,00
593131	Beban Persediaan bahan baku	2.515.000,00	000	2.515.000,00
593149	Beban Persediaan Lainnya	1.439.499,00	000	1.439.499,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	000	5.439.437.041,00	(5.439.437.041,00)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	000	230.710.000,00	(230.710.000,00)
Pengemb	alian Beban/Belanja	-	- '	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
1	Jumlah Beban/Belanja Neto	5.508.470.190,00	5.670.147.041,00	(161.676.851,00)

Selisih Beban/Belanja Persediaan sebesar (Rp161.676.851,00) antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya perbedaan pengakuan mengenai belanja pada LRA dan beban pada LO. Terdapat perubahan nilai pada pos akun Beban Persediaan yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited	
Ordidii	Ollaudited	Debit	Kredit	Addited
Beban Persediaan	5.509.282.070	824.000	1.635.880	5.508.470.190
ANRI Jakarta	4.794.776.270	610.000	1.078.480	4.794.307.790
Pusat Jasa Kearsipan	276.784.300	0	557.400	276.226.900
Pusdiklat Kearsipan	247.060.000	0	0	247.060.000
BAST Aceh	190.661.500	214.000	0	190.875.500

Beban Barang dan Jasa Rp66.607.786.782,00

## D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.607.786.782,00 dan Rp49.743.450.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.864.336.350,00 atau 33,90 persen dari periode sebelumnya. Beban Barang dan Jasa berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Akun

	Uraian	Beban Baran	g dan Jasa	Kenaikan/Penurunan		
	- Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)	
Beban Barang		34.915.799.364,00	31.323.468.993,00	3.592.330.371,00	11,47	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	17.820.214.542,00	15.199.448.705,00	2.620.765.837,00	17,24	
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	874.932.000,00	877.517.719,00	(2.585.719,00)	-0,29	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159.999.908,00	146.292.895,00	13.707.013,00	9,37	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	799.795.000,00	1.051.840.000,00	(252.045.000,00)	-23,96	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.132.692.077,00	669.754.054,00	462.938.023,00	69,12	

521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	281.118.000,00	1.821.768.901,00	(1.540.650.901,00)	-84,57
521211	Beban Bahan	8.623.375.560,00	5.803.943.188,00	2.819.432.372,00	48,58
521213	Beban Honor Output Kegiatan	3.406.032.500,00	3.060.658.250,00	345.374.250,00	11,28
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.723.671.862,00	1.911.455.746,00	(187.783.884,00)	-9,82
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	123.000.000,00	(123.000.000,00)	-100,00
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	657.789.535,00	(657.789.535,00)	-100,00
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	93.967.915,00	<u>-</u>	93.967.915,00	0,00
Beban Jas	sa <sup>*</sup>	31.671.690.218,00	18.546.933.365,00	13.124.756.853,00	70,77
522111	Beban Langganan Listrik	9.244.622.825,00	7.319.380.493,00	1.925.242.332,00	26,30
522112	Beban Langganan Telepon	40.469.944,00	39.221.213,00	1.248.731,00	3,18
522113	Beban Langganan Air	103.540.540,00	121.188.565,00	(17.648.025,00)	-14,56
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.177.642,00	2.942.626,00	235.016,00	7,99
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	22.122.600,00	55.067.200,00	(32.944.600,00)	-59,83
522131	Beban Jasa Konsultan	1.075.623.800,00	313.159.000,00	762.464.800,00	243,48
522141	Beban Sewa	4.342.100.632,00	1.919.756.350,00	2.422.344.282,00	126,18
522151	Beban Jasa Profesi	4.190.945.000,00	3.177.550.000,00	1.013.395.000,00	31,89
522191	Beban Jasa Lainnya	12.018.329.871,00	4.173.123.101,00	7.845.206.770,00	187,99
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	630.757.364,00	1.425.544.817,00	(794.787.453,00)	-55,75
Beban Re	klasifikasi Aset	20.297.200,00	53.920.572,00	(33.623.372,00)	-62,36
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20.297.200,00	53.920.572,00	(33.623.372,00)	-62,36
Pengemb	palian Beban	-	(180.872.498,00)	180.872.498,00	100,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	(4.446.000,00)	4.446.000,00	-100,00
521213	Beban Honor Output Kegiatan	-	(27.837.500,00)	27.837.500,00	-100,00
522151	Beban Jasa Profesi	-	(12.685.000,00)	12.685.000,00	-100,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	(135.903.998,00)	135.903.998,00	-100,00
J	umlah Beban Barang dan Jasa	66.607.786.782,00	49.743.450.432,00	16.864.336.350,00	33,90

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa terdiri atas:

- Beban Barang sebesar Rp34.915.799.364,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.592.330.371,00 atau 11,47 persen dibanding 31 Desember 2021;
- Beban Jasa sebesar Rp31.671.690.218,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp13.124.756.853,00 atau 70,77 persen dibanding 31 Desember 2021;
- Beban Reklasifikasi Aset sebesar Rp20.297.200,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp33.623.372,00) atau -62,36 persen dibanding 31 Desember 2021;

Tabel 99 Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	Beban Bara	ng dan Jasa	Kenaikan/Penurunan		
Satuan Kerja	2022	2021	(Rp)	(%)	
ANRI Jakarta (KP)	53.436.068.211,00	38.675.456.611,00	14.760.611.600,00	38,17	
BAST Aceh (KD)	2.384.187.935,00	2.326.212.535,00	57.975.400,00	2,49	
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	4.358.653.103,00	4.145.706.264,00	212.946.839,00	5,14	
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	6.428.877.533,00	4.596.075.022,00	1.832.802.511,00	39,88	
Jumlah	66.607.786.782,00	49.743.450.432,00	16.864.336.350,00	33,90	

Beban Barang dan Jasa (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp66.607.786.782,00 sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp66.382.424.101,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp225.362.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100 Selisih LO dan LRA Beban/Belanja Barang dan Jasa

Kode Akun Uraian Jenis Beban/Belanja Beban/Belanja Barang		Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LR	A (Rp)
		34.915.799.364,00 34.918.581.27		(2.781.912,00)	Ket. Selisih
521111	Beban Keperluan Perkantoran	17.820.214.542,00	17.804.243.264,00	15.971.278,00	
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	874.932.000,00	874.932.000,00	-	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159.999.908,00	159.916.658,00	83.250,00	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	799.795.000,00	801.220.000,00	(1.425.000,00)	(PB)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.132.692.077,00	1.132.692.077,00	-	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	281.118.000,00	281.118.000,00	-	
521211	Beban Bahan	8.623.375.560,00	8.623.375.560,00	-	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	3.406.032.500,00	3.419.750.000,00	(13.717.500,00)	(PB)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.723.671.862,00	1.722.080.602,00	1.591.260,00	
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-	
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0,00	-	
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	93.967.915,00	99.253.115,00	(5.285.200,00)	
Beban/Be	lanja Jasa	31.671.690.218,00	31.523.013.989,00	148.676.229,00	
522111	Beban Langganan Listrik	9.244.622.825,00	9.055.084.015,00	189.538.810,00	
522112	Beban Langganan Telepon	40.469.944,00	40.357.931,00	112.013,00	
522113	Beban Langganan Air	103.540.540,00	100.186.470,00	3.354.070,00	
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.177.642,00	3.177.642,00	-	
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	22.122.600,00	22.122.600,00	-	
522131	Beban Jasa Konsultan	1.075.623.800,00	1.075.623.800,00	-	
522141	Beban Sewa	4.342.100.632,00	4.342.100.632,00	-	
522151	Beban Jasa Profesi	4.190.945.000,00	4.211.800.000,00	(20.855.000,00)	(PB)
522191	Beban Jasa Lainnya	12.018.329.871,00	12.018.629.871,00	(300.000,00)	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	630.757.364,00	653.931.028,00	(23.173.664,00)	(PB)

Beban/Be	lanja Reklasifikasi Aset	20.297.200,00	- "	20.297.200,00	
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20.297.200,00	000	20.297.200,00	
Pengembalian Belanja		-	(59.171.164,00)	59.171.164,00	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	(1.425.000,00)	1.425.000,00	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	(13.717.500,00)	13.717.500,00	
522151	Belanja Jasa Profesi	-	(20.855.000,00)	20.855.000,00	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	(23.173.664,00)	23.173.664,00	
	Jumlah Beban/Belanja Neto	66.607.786.782,00	66.382.424.101,00	225.362.681,00	

\*) PB: Pengembalian Belanja

Selisih pos Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional disebabkan karena pembentukan jurnal atas belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset dengan nilai rincian sebagai berikut:

NO.	KODE	NAMA SATKER	NO. SPM	NO. DOKUMEN	TANGGAL	URAIAN	PERU	BAHAN		NILAI
	SATKER	TOTAL STATE	NO. DONOME		DOKUMEN	OTHER IT	SEMULA	MENJADI	, Triba	
1	418929	Pusat Jasa	00100A	221391302032882	16/08/2022	Pengadaan Peralatan dan Mesin [Exhaust Fan]	532111	521252 -	Rp	19.447.200,00
		Kearsipan						595112		
2	418934	Pusdiklat Kearsipan	00317A	220231302014044	20/09/2022	Pengadaan Peralatan dan Keperluan Perkantoran	532111	595112	Rp	850.000,00
	Selisih Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin								Rp	20.297.200,00

Sementara itu, selisih pada pos Beban/Belanja Barang lainnya antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) telah diuraikan sebelumnya pada segmen Laporan Realisasi Anggaran — B.4.1 Belanja Barang Operasional; B.4.2 Belanja Barang Non Operasional; B.4.4 Belanja Jasa.

Beban Pemeliharaan Rp11.956.165.236,00

# **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.956.165.236,00 dan Rp10.209.936.810,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.746.228.426,00 atau 17,10 persen dari periode sebelumnya. Beban Pemeliharaan berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 101 Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Akun

	Urajan —	Beban Peme	Beban Pemeliharaan		
Ulalali		2022 (Rp) 2021 (Rp)		(Rp)	(%)
Beban Pemeliharaan		11.956.165.236,00	10.209.936.810,00	1.746.228.426,00	17,10
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.268.217.847,00	4.075.100.122,00	1.193.117.725,00	29,28
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	253.081.890,00	607.396.535,00	(354.314.645,00)	-58,33
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87.036.377,00	192.348.860,00	(105.312.483,00)	-54,75

Seban Pemeliharaan Peralatan dan   1.063.214.155,00   1.850.743.880,00   (787.529.725,0   1.850.743.880,00   (787.529.725,0   1.850.743.880,00   (787.529.725,0   1.850.743.880,00   (787.529.725,0   1.850.743.880,00   (787.529.725,0   1.850.743.880,00   1.850.743.880,00   (787.529.725,0   1.850.743.880,00   (787.529	17,10
523129         Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya         1.063.214.155,00         1.850.743.880,00         (787.529.725,00)           523199         Beban Pemeliharaan Lainnya         733.742.120,00         191.675.000,00         542.067.120,00           593113         Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan         932.328.633,00         1.356.839.020,00         (424.510.387,00)           593114         Beban Persediaan suku cadang         -         -         0,0           595113         Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan         -         18.966.000,00         (18.966.000,00)	0,00
523129         Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya         1.063.214.155,00         1.850.743.880,00         (787.529.725,0           523199         Beban Pemeliharaan Lainnya         733.742.120,00         191.675.000,00         542.067.120,0           593113         Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan         932.328.633,00         1.356.839.020,00         (424.510.387,0           593114         Beban Persediaan suku cadang         -         -         0,0           595113         Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung         -         18.966.000.00         (18.966.000.00	0,00
523129         Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya         1.063.214.155,00         1.850.743.880,00         (787.529.725,0           523199         Beban Pemeliharaan Lainnya         733.742.120,00         191.675.000,00         542.067.120,0           593113         Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan         932.328.633,00         1.356.839.020,00         (424.510.387,0)	) -100,00
523129         Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya         1.063.214.155,00         1.850.743.880,00         (787.529.725,0           523199         Beban Pemeliharaan Lainnya         733.742.120,00         191.675.000,00         542.067.120,0           593113         Beban Persediaan bahan untuk         932.328.633.00         1.356.839.020.00         (424.510.387.0	0,00
523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan 1.063.214.155,00 1.850.743.880,00 (787.529.725,0 Mesin Lainnya	) -31,29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan 1.063.214.155.00 1.850.743.880.00 (787.529.725.0	282,81
IVICSIII	) -42,55
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan 3.618.544.214,00 1.916.867.393,00 1.701.676.821,0	88,77

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Pemeliharaan Lainnya, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang. Beban Pemeliharaan berdasarkan satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja

Cabusan Vania	Beban Pem	eliharaan	Kenaikan/Penurunan		
Satuan Kerja	2022	2021	(Rp)	(%)	
ANRI Jakarta (KP)	9.619.842.241,00	9.143.853.884,00	475.988.357,00	5,21	
BAST Aceh (KD)	1.138.939.281,00	281.504.020,00	857.435.261,00	304,59	
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	548.306.055,00	430.897.400,00	117.408.655,00	27,25	
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	649.077.659,00	353.681.506,00	295.396.153,00	83,52	
Jumlah	11.956.165.236,00	10.209.936.810,00	1.746.228.426,00	17,10	

Beban Pemeliharaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp11.956.165.236,00 sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp12.725.090.679,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp768.925.443,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Selisih LO dan LRA Beban Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan		11.956.165.236,00	12.728.061.679,00	(771.896.443,00) Ket. Selisih
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.268.217.847,00	5.878.956.575,00	(610.738.728,00) (PB): 980.000
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	000	482.526.048,00	(482.526.048,00)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	253.081.890,00	253.081.890,00	-
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87.036.377,00	87.036.377,00	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.618.544.214,00	3.742.554.514,00	(124.010.300,00) (PB): 1.991.000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	000	486.950.000,00	(486.950.000,00)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.063.214.155,00	1.063.214.155,00	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	733.742.120,00	733.742.120,00	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	932.328.633,00	000	932.328.633,00
Pengemb	alian Belanja		(2.971.000,00)	2.971.000,00
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(980.000,00)	980.000,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	(1.991.000,00)	1.991.000,00
	Jumlah Beban/Belanja Neto	11.956.165.236,00	12.725.090.679,00	(768.925.443,00)

\*) PB: Pengembalian Belanja

Bagian selisih Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; Peralatan dan Mesin sebesar Rp731.778.028,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional telah diuraikan sebelumnya pada segmen Laporan Realisasi Anggaran – B.4.5 Belanja Pemeliharaan.

Sementara itu, bagian selisih Belanja/Beban Pemeliharaan sebesar Rp37.147.415,00 merupakan selisih Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp482.526.048,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp486.950.000,00, dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar (Rp932.328.633,00) yang telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Beban Pemeliharaan yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK RI		Audited
Ordidii	Onaudited	Debit	Kredit	Audited
Beban Pemeliharaan	12.223.990.764	-	267.825.528	11.956.165.236
ANRI Jakarta	9.655.917.241	-	36.075.000	9.619.842.241
Pusat Jasa Kearsipan	1.138.939.281	-	69.402.528	1.069.536.753
Pusdiklat Kearsipan	617.708.583	-	162.348.000	455.360.583
BAST Aceh	811.425.659	-	-	811.425.659

Beban Perjalanan Dinas Rp29.780.456.329,00

# **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.780.456.329,00 dan Rp13.103.236.740,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.677.219.589,00 atau 127,28 persen dari periode sebelumnya. Beban Perjalanan Dinas berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Akun

	Uraian -	Beban Perjal	anan Dinas	Kenaikan/Pen	urunan
	Ordidii	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Per	jalanan Dinas Dalam Negeri	28.859.204.725,00	14.091.003.229,00	14.768.201.496,00	104,81
524111	Beban Perjalanan Biasa	12.665.237.232,00	5.352.921.317,00	7.312.315.915,00	136,60
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	727.248.000,00	534.313.000,00	192.935.000,00	36,11
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.228.440.000,00	4.706.607.000,00	3.521.833.000,00	74,83
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00	0,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.238.279.493,00	3.497.161.912,00	3.741.117.581,00	106,98
Beban Per	jalanan Dinas Luar Negeri	921.251.604,00	-	921.251.604,00	0,00
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	570.541.123,00	-	570.541.123,00	0,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	350.710.481,00	-	350.710.481,00	0,00
Pengemba	alian Beban	-	(987.766.489,00)	(987.766.489,00)	-100,00
524111	Beban Perjalanan Biasa	-	(687.963.398,00)	687.963.398,00	-100,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	(6.500.000,00)	6.500.000,00	-100,00
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	(45.396.000,00)	45.396.000,00	-100,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	(247.907.091,00)	247.907.091,00	-100,00
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	0,00	0,00	0,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	0,00	0,00	0,00
J	umlah Beban Perjalanan Dinas	29.780.456.329,00	13.103.236.740,00	16.677.219.589,00	127,28

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas:

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp28.859.204.725,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp14.768.201.496,00 atau 104,81 persen dibanding 31 Desember 2021;
- Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp921.251.604,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp921.251.604,00 atau 0,00 persen dibanding 31 Desember 2021.

Tabel 105 Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	Beban Perja	lanan Dinas	Kenaikan/Penur	unan
Satuan Kerja	2022	2021	(Rp)	(%)
ANRI Jakarta (KP)	27.205.379.621,00	11.539.528.284,00	15.665.851.337,00	135,76
BAST Aceh (KD)	179.041.513,00	158.380.361,00	20.661.152,00	13,05
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	1.054.139.774,00	1.184.780.776,00	(130.641.002,00)	(11,03)
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	1.341.895.421,00	220.547.319,00	1.121.348.102,00	508,44
Jumlah	29.780.456.329,00	13.103.236.740,00	16.677.219.589,00	127,28

Beban Perjalanan Dinas (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp29.780.456.329,00 sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp29.783.234.329,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp2.778.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Selisih LRA dan LO Beban/Belanja Perjalanan Dinas

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA	A (Rp)
anja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.859.204.725,00	30.461.991.937,00	(1.602.787.212,00) k	Ket. Selisih
Beban Perjalanan Biasa	12.665.237.232,00	13.912.831.918,00	(1.247.594.686,00)	(PB)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	727.248.000,00	729.948.000,00	(2.700.000,00)	(PB)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.228.440.000,00	8.284.690.000,00	(56.250.000,00)	(PB)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.238.279.493,00	7.534.522.019,00	(296.242.526,00)	(PB)
anja Perjalanan Dinas Luar Negeri	921.251.604,00	939.954.117,00	(18.702.513,00)	
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	570.541.123,00	584.632.470,00	(14.091.347,00)	(PB)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	350.710.481,00	355.321.647,00	(4.611.166,00)	(PB)
lian Belanja	-	(1.618.711.725,00)	1.618.711.725,00	
Belanja Perjalanan Biasa	-	(1.244.816.686,00)	1.244.816.686,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	(2.700.000,00)	2.700.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	(56.250.000,00)	56.250.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	(296.242.526,00)	296.242.526,00	
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	(14.091.347,00)	14.091.347,00	
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	(4.611.166,00)	4.611.166,00	
ımlah Beban Perjalanan Dinas	29.780.456.329,00	29.783.234.329,00	(2.778.000,00)	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri Ilian Belanja Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	Uraian Jenis Beban/Belanja  Operasional (Rp)  anja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  Beban Perjalanan Biasa  12.665.237.232,00  Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota  Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri  Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri  Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri  Belanja Perjalanan Biasa  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri  Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	Uraian Jenis Beban/Belanja         Operasional (Rp)         Anggaran (Rp)           anja Perjalanan Dinas Dalam Negeri         28.859.204.725,00         30.461.991.937,00           Beban Perjalanan Biasa         12.665.237.232,00         13.912.831.918,00           Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota         727.248.000,00         729.948.000,00           Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota         8.228.440.000,00         8.284.690.000,00           Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         7.238.279.493,00         7.534.522.019,00           Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri         921.251.604,00         939.954.117,00           Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri         570.541.123,00         584.632.470,00           Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri         350.710.481,00         355.321.647,00           Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota         -         (1.618.711.725,00)           Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota         -         (2.700.000,00)           Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota         -         (56.250.000,00)           Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         -         (296.242.526,00)           Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri         -         (14.091.347,00)           Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri         -         (14.611.166,00)	Draian Jenis Beban/Belanja

\*) PB: Pengembalian Belanja

Selisih Beban/Belanja Perjalanan Dinas (524111) sebesar (Rp2.778.000,00) antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran telah diuraikan sebelumnya pada segmen Laporan Realisasi Anggaran — B.4.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Rp9.644.450,00

# D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.644.450,00 dan Rp3.306.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.337.456,00 atau 191,64 persen dari periode sebelumnya. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Berdasarkan Akun

Uraian		Beban Barang untuk d Masyarakat,		Kenaikan/Penu	runan
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
	rang untuk diserahkan kepada at/Pemda	9.644.450,00	3.306.994,00	6.337.456,00	191,64
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0,00	0,0
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	0,00	0,0
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9.644.450,00	3.306.994,00	6.337.456,00	191,6
Pengemb	alian Beban	-	-	0,00	0,0
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0,00	0,0
	h Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	9.644.450,00	3.306.994,00	6.337.456,00	191,6

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada satker ANRI Jakarta merupakan buku-buku koleksi layanan arsip pada satker ANRI Jakarta.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp9.644.450,00 sedangkan realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto)

pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.644.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108 Selisih LRA dan LO Beban/Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Beban/Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		9.644.450,00	-	9.644.450,00
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	0,00	-
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	0,00	-
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9.644.450,00	0,00	9.644.450,00
Pengemb	alian Beban/Belanja		- "	
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
	Jumlah Beban/Belanja Neto	9.644.450,00		9.644.450,00

Selisih Beban/Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp9.644.450,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan oleh pembentukan jurnal penyerahan barang kepada masyarakat/pemda yang timbul akibat pemilihan/perekaman kode persediaan pada saat pendetailan persediaan dalam aplikasi SAKTI. Pembebanan Persediaan diatur dalam *mapping* kode barang dengan kode akun bebannya. Penjelasan mengenai Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unavelitad	Koreksi	Koreksi BPK RI		
Oralan	Unaudited Debit		Kredit	Audited	
Beban Barang Untuk Diserahkan	9.151.285	637.665	144.500	9.644.450	
Kepada Masyarakat					
ANRI Jakarta	9.151.285	637.665	144.500	9.644.450	

Beban Bantuan Sosial Rp0,00

## **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp48.653.639.758,00

# D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.653.639.758,00 dan Rp38.937.865.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.715.774.008,00 atau 24,95 persen dari periode sebelumnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Akun

	Urajan —	Beban Penyusutan	dan Amortisasi	Kenaikan/Penuru	ınan
	Urdidii	2022 (Rp)	2021 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Pe	nyusutan dan Amortisasi	48.653.639.758,00	38.937.865.750,00	9.715.774.008,00	24,95
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.734.126.982,00	15.632.791.125,00	5.101.335.857,00	32,63
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.205.562.502,00	16.647.853.192,00	1.557.709.310,00	9,36
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.502.050.907,00	3.502.050.907,00	0,00	0,00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	5.796.916,00	5.796.916,00	0,00	0,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	200.271.455,00	201.570.185,00	(1.298.730,00)	-0,64
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	34.847.461,00	7.539.961,00	27.307.500,00	362,17
	Jumlah Penyusutan	42.682.656.223,00	35.997.602.286,00	6.685.053.937,00	18,57
592115	Beban Amortisasi Software	5.970.983.535,00	2.940.263.464,00	3.030.720.071,00	103,08
	Jumlah Amortisasi	5.970.983.535,00	2.940.263.464,00	3.030.720.071,00	103,08
Jumla	h Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.653.639.758,00	38.937.865.750,00	9.715.774.008,00	24,95

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	Beban Penyusuta	n dan Amortisasi	Kenaikan/Penurunan		
Satual Kerja	2022	2021	(Rp)	(%)	
ANRI Jakarta (KP)	42.469.815.088,00	34.255.333.822,00	8.214.481.266,00	23,98	
BAST Aceh (KD)	4.033.599.240,00	2.978.139.454,00	1.055.459.786,00	35,44	
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	1.472.537.981,00	1.202.565.092,00	269.972.889,00	22,45	
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	677.687.449,00	501.827.382,00	175.860.067,00	35,04	
Jumlah	48.653.639.758,00	38.937.865.750,00	9.715.774.008,00	24,95	

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Beban Penyusutan dan Amortisasi yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreks	i BPK RI	Audited
Oralan	Onaudited	Debit	Kredit	Auditeu
Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.425.391.587	250.978.997	22.730.826	48.653.639.758
ANRI Jakarta	42.469.147.032	668.056	-	42.469.815.088
Pusat Jasa Kearsipan	1.470.381.562	2.156.419	-	1.472.537.981
Pusdiklat Kearsipan	675.150.761	2.536.688	-	677.687.449
BAST Aceh	3.810.712.232	245.617.834	22.730.826	4.033.599.240

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp27.236,00)

## D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar (Rp27.236,00) dan Rp27.236,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung dengan mempertimbangkan kualitas piutang yang ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak penagihan pertama. Berdasarkan Rekapitulasi Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Piutang Nomor: 00001/SKTL/450448/2022 atas Nomor Piutang: 00001/AR/450448/2022 telah dilakukan pelunasan pada tanggal 9 November 2022.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp1.331.882.775,00)

# **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.331.882.775,00) dan Rp138.082.342,00 mengalami penurunan sebesar

(Rp1.469.965.117,00) atau -1.064,56 persen dari periode sebelumnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional memiliki rincian sebagai berikut :

Tabel 111 Rincian Surplus dari Kegiatan Operasional

United	2022	2024	Kenaikan/Penu	runan
Uraian	2022	2021	(Rp)	(%)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	478.201.011,00	132.750.888,00	345.450.123,00	260,22
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	478.201.011,00	132.750.888,00	345.450.123,00	260,22
BAST Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2.074.247.000,00	4.020.000,00	2.070.227.000,00	51.498,18
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	2.044.257.500,00	4.020.000,00	2.040.237.500,00	50.752,18
BAST Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	29.989.500,00	0,00	29.989.500,00	0,00
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(1.596.045.989,00)	128.730.888,00	(1.724.776.877,00)	(1.339,83
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	264.663.014,00	66.324.189,00	198.338.825,00	299,04
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	36.950.114,00	65.716.689,00	(28.766.575,00)	(43,77
BAST Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	226.174.600,00	0,00	226.174.600,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	1.538.300,00	607.500,00	930.800,00	153,22
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	499.800,00	56.972.735,00	(56.472.935,00)	(99,12
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	499.800,00	56.972.735,00	(56.472.935,00)	(99,12
BAST Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	264.163.214,00	9.351.454,00	254.811.760,00	2.724,84
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(1.331.882.775,00)	138.082.342,00	(1.469.965.117,00)	(1.064,56)

## D.11.1 Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp1.596.045.989,00) dan Rp128.730.888,00. Jumlah pada 31 Desember 2022 merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp478.201.011,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.074.247.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

## D.11.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp478.201.011,00 dan Rp132.750.888,00. Pendapatan terkait pada tahun 2022 berasal dari

Satker **ANRI Jakarta** yang merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dengan rincian terlampir sebagai berikut:

No.	Keterangan	NTPN	Nilai
1	Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas an	80CE76U8EC2L5NVV	33.288.000
	Sumrahyadi sesuai Surat Menteri Keuangan No. S.55/MK-		
	6/KNL.0705/2022 tgl 30 Juni 2022		
2	Hasil Bersih Lelang RL 520/29/2022 6 Lot Laku ANRI Pelelang	456DC7QLU6ONI8IU	286.666.012
	Aga Budiman		
3	Hasil Bersih Lelang RL 519/29/2022 3 Lot Laku ANRI Pelelang	36A1461QUHJULGDK	100.417.000
	Anice Kasim		
4	Hasil Bersih Lelang RL 483/29/2022 ANRI 2 Lot Laku Pelelang	013E961QUHJACRBM	57.829.999
	Anice Kasim		
	Total		478.201.011

## D.11.2.1 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.074.247.000,00 dan Rp4.020.000,00. Beban terkait pada tahun 2022 berasal dari satuan kerja:

- 1. **ANRI Jakarta** sebesar Rp2.044.257.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Penghentian KDP sebesar Rp1.953.050.000,00 yang merupakan penghentian terhadap peralatan dan mesin dalam pengerjaan NUP 232 yang merupakan pembelian *scanner* LIPSNER SMITH CF9400HFE pada tahun 2021. Adapun barang tersebut pembayarannya secara termin sehingga dicatat ke dalam KDP dan barang tersebut sudah dibayar penuh pada tahun 2021 sedangkan barang tiba pada bulan Februari 2022 dengan BAST No. PL.01/473.17/2021 tanggal 08/02/2022. Atas barang yang telah diterima maka KDP tersebut dihentikan dan diakui sebagai saldo awal peralatan dan mesin;
  - ii. Penghapusan software komputer kaspersky endpoint security for business NUP 926-935 berdasarkan Kepka ANRI Nomor 492 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp10.400.000,00, akumulasi amortisasi sebesar Rp7.800.000, dan sisa nilai buku tersisa sebesar Rp2.600.000,00.

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Kerugian Pelepasan Aset yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreks	i BPK RI	Audited
Uralan	Unaudited	Debit	Kredit	Audited
Kerugian Pelepasan Aset	1.985.639.500	5.382.901.258	5.294.293.758	2.074.247.000
ANRI Jakarta	1.955.650.000	5.382.901.258	5.294.293.758	2.044.257.500
Pusat Jasa Kearsipan	29.989.500	-	-	29.989.500
Pusdiklat Kearsipan	-	-	-	-
BAST Aceh	-	-	-	-

 Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp29.989.500,00 yang merupakan usulan penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Dok	Uraian Barang	NUP	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	J012213	LCD Projector/Infocus	3	17.650.000	15.885.000	1.765.000
2	J012214	LCD Projector/Infocus	4	17.572.500	14.058.000	3.514.500
3	J0122152	Decoder/DE 200	2	35.300.000	10.590.000	24.710.000
		Total		70.522.500	40.533.000	29.989.500

# D.11.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp264.163.214,00 dan Rp9.351.454,00. Jumlah pada 31 Desember 2022 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp264.663.014 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp499.800,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

#### D.11.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp264.663.014,00 dan Rp66.324.189,00. Pendapatan terkait pada tahun 2022 berasal dari satuan kerja:

- 1. **ANRI Jakarta** sebesar Rp36.950.114,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp4.768.000,00 (lihat LRA B.1.7 Pendapatan Lain-Lain);

- ii. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp28.346.503,00 (lihat LRA B.1.7 Pendapatan Lain-Lain);
- iii. Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp1.744.551,00 (lihat LRA B.1.7 Pendapatan Lain-Lain);
- iv. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) sebesar Rp1.641.060,00 (lihat LRA B.4.2 Belanja Barang Non Operasional);
- v. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) sebesar Rp450.000,00 yang merupakan Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian *Ondancentron* Injeksi. Munculnya pendapatan ini dapat dijelaskan secara kronologis sebagai berikut :.

	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Penginputan awal	2	25.000	50.000
Penginputan seharusnya	20	2.500	50.000

Upaya koreksi yang dilakukan operator persediaan dalam rangka normalisasi:				
Persediaan awal	2	25.000	50.000	
Koreksi Kuantitas	(491511)	18	25.000	450.000
Koreksi Nilai Kurang -1	(593311)			(45.000)
Koreksi Nilai Kurang -2	(593311)			(405.000)
Persediaan akhir		20	2.500	50.000

## 2. Pusat Jasa Kearsipan

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp226.174.600,00 (lihat LRA – B.1.7 Pendapatan Lain-Lain).

## 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.538.300,00 (lihat LRA – B.1.7 Pendapatan Lain-Lain).

#### D.11.2.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp499.800,00 dan Rp56.972.735,00. Beban terkait pada tahun 2022 berasal dari satker **ANRI Jakarta** dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) sebesar
   Rp49.800,00 (lihat LRA B.4.2 Belanja Barang Non Operasional);
- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) sebesar Rp450.000,00
   yang merupakan Koreksi Nilai Kurang atas Pembelian *Ondancentron*

Injeksi. Munculnya beban ini dapat dijelaskan secara kronologis sebagai berikut :

	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Penginputan awal	2	25.000	50.000
Penginputan seharusnya	20	2.500	50.000

Upaya koreksi yang dilak	Upaya koreksi yang dilakukan operator persediaan dalam rangka normalisasi:				
Persediaan awal 2			25.000	50.000	
Koreksi Kuantitas	(491511)	18	25.000	450.000	
Koreksi Nilai Kurang -1	(593311)			(45.000)	
Koreksi Nilai Kurang -2	(593311)			(405.000)	
Persediaan akhir		20 2.500 50.0			

Pos Luar Biasa Rp0,00

#### **D.12** Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Defisit LO (Rp249.201.899.411,00)

# **D.13 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa. Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai (Rp249.201.899.411,00) dan (Rp202.294.574.631,00).

#### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp1.234.482.450.232,00

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.234.482.450.232,00 dan Rp1.217.622.514.276,00.

Surplus (Defisit) LO (Rp249.201.899.411,00)

# E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp249.201.899.411,00) dan (Rp202.294.574.631,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional surplus/defisit kegiatan non operasional sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0,00

# E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Koreksi yang Menambah/Mengur angi Ekuitas Rp1.343.705.968,00

## E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas antara lain berasal dari koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO dan/atau beban periode sebelumnya serta dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.343.705.968,00 dan (Rp1.436.368.944,00).

# Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

## E.4.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai pada Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp1.126.830.968,00

## E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.126.830.968,00 dan (Rp478.596.189,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Berikut disajikan rekapan data koreksi nilai aset tetap non revaluasi:

#### Balai Arsip Statis dan Tsunami

No. Dok	Keterangan	Debit	Kredit
B04221	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	8.140.880	-
B04222	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.299.615	-
B04223	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	139.132.400
B04223	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	6.956.620	-
GLP-26	Tindak Lanjut atas Reklas Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	9.614.000
GLP-27	Tindak Lanjut atas Reklas Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148.746.000	-
B212210	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	781.135
B212211	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK-RI	1.136.541.300	-
B212211	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK-RI	-	56.827.065
A0122X	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK-RI	-	525.978.100
A0122X	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK-RI	235.919.585	-
	Total	1.538.604.000	732.332.700

## ANRI Jakarta

No. Dok	Keterangan	Debit	Kredit
A01221	Saldo Awal Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Film)	1	1.953.050.000
B21221	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	257.043.253	-
B04224	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	-	2.442.000
B042210	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	-	7.992.000
B042210	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1.598.400	-
B04227	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1	2.442.000
C05221	Koreksi Pencatatan Kursi Besi/Metal	ı	26.749.800
B042215	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.674.980	-
B04222	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1	2.442.000
B04225	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder		2.442.000
B04228	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1	7.992.000
B04228	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1.598.400	-
B04229	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1	7.992.000
B04229	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	1.598.400	-
B04223	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	ı	2.442.000
B04223	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Manual Film Rewinder	488.400	-

		(K)	1.126.830.968
	Total Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.229.178.408	3.356.009.376
	Total	162.348.000	162.348.000
GLP/19	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	33.153.000	-
B14222	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	-	33.153.000
GLP/18	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	129.195.000	-
B14221	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	-	129.195.000
No. Dok	Keterangan	Debit	Kredit
Pusat Pend	idikan dan Pelatihan Kearsipan		
	Total	53.818.128	53.818.128
B14221	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	-	53.818.128
929011			
202212418	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	53.818.128	-
No. Dok	Keterangan	Debit	Kredit
Pusat Jasa	Kearsipan		
	Total	474.408.280	2.407.510.548
GLP-045	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	36.075.000	-
B14221	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	-	36.075.000
J0122249	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	-	92.193.156
J0122249	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Koreksi BPK	122.353.000	_
	modul Aset Tetap		
GLP-044	Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di	-	50.718.447
01. 0.2	dan Mesin - Ekstrakomptabel		10.000.000
GLP-042	Koreksi Nilai atas Perubahan Aset Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan	-	10.656.000
B21228	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	260.000	
GLP-039	Koreksi Nilai atas Perubahan Aset Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin	-	196.289.401
B21226	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2.931.441
B21226	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	24.692.948	-
B21227	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Pos Jaga Permanen	-	364
B21227	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Pos Jaga Permanen	3.758	-
B21223	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2.143.747
B21223	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen	18.057.790	-
B21224	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.305.257	-
B21222	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Pos Jaga Permanen	-	257.192
B21222	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Pos Jaga Permanen	2.658.694	-
	Pengembalian Belanja Modal SPM No. 03303A		

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK RI		Audited	
Oralali		Debit	Kredit	Addited	
Koreksi Nilai Aset Tetap	1.946.646.532	1.747.055.013	927.239.449	1.126.830.968	
Non Revaluasi					
ANRI Jakarta	1.963.262.112	158.428.000	128.268.156	1.933.102.268	
Pusat Jasa Kearsipan	-	53.818.128	53.818.128	-	
Pusdiklat Kearsipan	-	162.348.000	162.348.000	-	
BAST Aceh	(16.615.580)	1.372.460.885	582.805.165	(806.271.300)	

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Rp226.875.000,00

## E.4.3 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp226.875.000,00 dan (Rp1.329.900.030,00). Berikut disajikan rekapan data koreksi nilai aset lainnya non revaluasi:

Balai Arsi	Balai Arsip Statis dan Tsunami				
No. Dok	Keterangan	Debit	Kredit		
A012211	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	605.000.000		
A012211	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	378.125.000	-		
	Total Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 378.125.000				
		(K)	226.875.000		

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK RI		Audited
Uraian	Onaudited	Debit	Kredit	Audited
Koreksi Nilai Lainnya Non	-	378.125.000	605.000.000	226.875.000
Revaluasi				
ANRI Jakarta	-	-	-	-
Pusat Jasa Kearsipan	-	-	-	-
Pusdiklat Kearsipan	-	-	-	-
BAST Aceh	-	378.125.000	605.000.000	226.875.000

Koreksi Lainnya Rp10.000.000,00

## E.4.4 Koreksi Lainnya

Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp0,00. Terdapat jurnal manual balik atas voucher BBM tahun 2021 pada satker pusdiklat kearsipan yang berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya direkomendasikan untuk diakui sebagai belanja dibayar dimuka. Pada tahun 2022, voucher BBM telah habis digunakan seluruhnya sehingga atas hal tersebut dilakukan eliminasi melalui jurnal balik.

Ekuitas Transaksi Lainnya Rp0,00

## E.4.5 Ekuitas Transaksi Lainnya

Ekuitas Transaksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Ekuitas Transaksi Lainnya adalah koreksi lain-lain

yang merupakan koreksi selain terkait dengan Barang Milik Negara antara lain yaitu koreksi atas pendapatan koreksi atas beban koreksi atas hibah piutang dan utang.

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Rp0,00

# E.4.6 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp372.127.275,00. Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan koreksi atas nilai reklasifikasi yang terjadi.

Transaksi Antar Entitas Rp229.564.094.543,00

### **E.5 Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp229.564.094.543,00 dan Rp220.590.879.531,00. Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL antar KL antara BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas Kode Akun 31 Desember 2022 31 Desember 2021 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 247.549.140.859,00 234.726.067.648,00 Diterima dari Entitas Lain 313121 (18.868.813.156,00) 14.135.188.117,00 Transfer Keluar 313211 (132.773.350,00) 22.855.691.275,00 Transfer Masuk 346.802.745,00 22.855.691.275,00 313221 391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL 669.737.445,00 Jumlah 229.564.094.543,00 220.590.879.531,00

Tabel 112 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

#### Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

# E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022 DDEL sebesar (Rp18.868.813.156,00) sedangkan DKEL sebesar Rp247.549.140.859,00.

Tabel 113 Rincian DDEL/DKEL seluruh Satker

Kode Satker	Uraian Satker	DDEL	DKEL
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	(2.850.668.956,00)	225.199.893.901,00
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	(638.500,00)	5.147.104.936,00
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	(6.997.467.400,00)	6.611.576.853,00
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	(9.020.038.300,00)	10.590.565.169,00
	Jumlah	-18.868.813.156,00	247.549.140.859,00

#### E.5.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp214.029.395,00 dan Rp0,00. Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan perpindahan aset antar entitas baik antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan maupun antar entitas akuntansi pada entitas pelaporan yang berbeda. Transfer Keluar dan Transfer Masuk Tahun 2022 berasal dari :

Tabel 114 Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Tahun 2022 & 2021

Kode Akun	Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
313211	Transfer Keluar	(132.773.350,00)	- 22.855.691.275,00
	Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	(125.515.000,00)	- 22.847.836.797,00
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	(7.258.350,00)	- 7.854.478,00
313221	Transfer Masuk	346.802.745,00	22.855.691.275,00
	Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	7.258.350,00	7.854.478,00
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	125.515.000,00	5.130.000,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-	22.842.706.797,00
	Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	214.029.395,00	-
	Jumlah	214.029.395,00	0,00

Terdapat perubahan nilai pada pos akun Transfer Masuk yang disebabkan adanya koreksi pada Laporan Keuangan *Unaudited* sebagai berikut:

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK RI		Audited
Urdidii	Onaudited	Debit	Kredit	Audited
Transfer Masuk	-	21.887.159	235.916.554	214.029.395
ANRI Jakarta	-	-	-	-
Pusat Jasa Kearsipan	-	-	-	-
Pusdiklat Kearsipan	-	-	-	-
BAST Aceh	-	21.887.159	235.916.554	214.029.395

#### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan pengesahan hibah langsung yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pada tahun 2022 satker Balai Arsip Statis dan Tsunami melakukan pengesahan hibah langsung sebesar Rp669.737.445,00 atas hibah Tanah seluas 417 m² yang diterima tahun 2021 berdasarkan BAST Nomor: 166/BA/2021 dan PL.01.02/385/2021 tanggal 30 November 2021 serta Nomor Register 2T57EBFA. Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi Aceh di Jalan T. Nyak Arief, Lampineung dengan kodefikasi barang 2010104001 NUP 1.

Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Rp18.294.098.900,00)

#### E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai penurunan ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp18.294.098.900,00) dan Rp16.859.935.956,00.

Ekuitas Akhir Rp1.216.188.351.332,00

#### E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.216.188.351.332,00 dan Rp1.234.482.450.232,00.

#### F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

# F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Proses Lelang Barang yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintahan

BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional Pemerintah pada satker Pusdiklat Kearsipan berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala ANRI No: B-PL.02.03/4488/2022 tanggal 22 November 2022 telah mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI melalui surat No: B-PL.02.03/4928/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal Persetujuan Penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Arsip Nasional RI.

Permohonan pelelangan BMN kepada KPKNL Bogor telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 2023 melalui surat No:B-PL.02.07/03/2023 tanggal 3 Januari 2023 dan diunggah pada laman https://lelang.go.id. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2023 telah terbit penetapan jadwal lelang dari KPKNL Bogor melalui Surat Nomor: S-371/KNL.0803/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Penetapan Jadwal Lelang. Atas hal tersebut, diterbitkan Surat Pengumuman Lelang Nomor: PL.02.07/06/2023 tanggal 26 Januari 2023 hal Pengumuman Lelang BMN di Lingkungan Pusdiklat Kearsipan untuk diunggah pada laman https://lelang.go.id. Hasil pelaksanaan lelang telah terbit pada tanggal 1 Februari 2023 dengan nama pemenang lelang Ika Prihatin Wulandari senilai Rp44.499.999,00. Pembayaran ke kas negara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023 dengan Nomor NTPN 7B78561QUQB8L0FM.

#### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### F.2.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA ANRI sampai 31 Desember 2022 telah mengalami beberapa kali revisi yang berdampak menyeluruh meliputi:

- a. Revisi DIPA ke-I dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan RI No. S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Terdapat pencadangan anggaran 5 % dari RM ANRI sebesar 13.379.646.000, terdiri dari 10.048.012.000 dari Program Dukungan Manajemen dan 3.331.634.000 dari Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional;
- b. Revisi DIPA ke-II dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022 terhadap blokir berdasarkan hasil *clearance* Kominfo terhadap belanja TIK ANRI yang mendapatkan Rekomendasi dapat ditindaklanjuti, serta usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan informasi. Buka blokir disetujui sebesar 19.669.729.000, dari semula 64.552.111.000 menjadi 44.882.282.000. Selain itu juga terdapat revisi pergeseran antar RO antar KRO, antar jenis belanja, dan penambahan volume RO;
- c. Revisi DIPA ke-IV pada tanggal 30 April 2022, merupakan revisi yang dilakukan terhadap blokir berdasarkan hasil clearance Kominfo terhadap belanja TIK ANRI yang mendapatkan Rekomendasi dapat ditindaklanjuti, serta usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan informasi. Buka blokir disetujui sebesar Rp21.616.629.000, dari semula Rp44.882.282.000 menjadi Rp23.265.653.000. Selain itu juga terdapat revisi pergeseran antar RO antar KRO, antar jenis belanja, Penurunan Volume RO, dan penambahan volume RO;
- d. Revisi DIPA ke-VI dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022, menindaklanjuti Surat Menkeu RI No. S-458/MK.02/2022 tanggal

- 23 Mei 2022 Hal Penambahan Automatic Adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, terdapat penambahan Automatic Adjustment sebesar Rp13.609.257.000,00. Selain itu juga terdapat usulan buka blokir;
- e. Revisi DIPA ke-VII dilakukan pada tanggal 27 Juni 2022, Revisi Pergeseran komponen 002 dari satker ANRI Jakarta ke satker Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp600.393.000, dan penyesuaian Halaman III DIPA;
- f. Revisi DIPA ke-IX dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022, Pengajuan revisi dilakukan terhadap usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan informasi. Buka blokir disetujui sebesar 36.389.605.000 2.337.993.000, dari semula menjadi 34.051.612.000. Selain itu juga terdapat revisi pergeseran antar kegiatan, antar RO antar KRO, antar jenis belanja, dan Penurunan Volume RO;
- g. Revisi DIPA ke-XI dilakukan pada tanggal 1 September 2022, Pengajuan revisi dilakukan terhadap usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan informasi. Buka blokir disetujui sebesar 6.591.087.000, dari semula 34.051.611.738 menjadi 27.460.524.738. Serta usulan kenaikan PNBP pada Pusdiklat dan SDM Kearsipan & Sertifikasi;
- h. Revisi DIPA ke-XII pada tanggal 3 Oktober 2022, merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan PPPK sesuai Keputusan MenPAN & RB Nomor 356 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 78 orang serta kebutuhan uji kompetensi JPT Pratama. Selain itu usulan revisi untuk pemutakhiran POK atas revisi POK kewenangan KPA sebelumnya;
- Revisi DIPA ke-XII pada tanggal 19 Oktober 2022, merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 sebesar Rp3.856.634.000 dan usulan revisi buka blokir untuk pemenuhan

- kebutuhan tukin jabatan fungsional di lingkungan ANRI sebesar Rp4.047.034.000;
- j. Revisi DIPA ke-XIV pada tanggal 2 November 2022, merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penominasian arsip pendirian ASEAN sebagai MOW Asia Pasifik yang diselenggarakan di Aceh serta pergeseran antar satker untuk memenuhi belanja operasional ke satker BAST. Selain itu terdapat usulan revisi penambahan volume RO dan revisi anggaran buka blokir;
- k. Revisi DIPA ke-XV pada tanggal 29 November 2022, merupakan pemutakhiran POK kewenangan KPA;
- Revisi DIPA ke-XVI pada tanggal 5 Desember 2022, merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 Hal Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- m. Revisi DIPA ke-XVII pada tanggal 27 Desember 2022, merupakan pemutakhiran POK kewenangan KPA.

## F.2.2 Pelaksana/Pengelola APBN ANRI

Pengelola APBN ANRI Tahun 2022 telah ditetapkan melalui:

- a. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2021 tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Rini Agustiani
  - 2. Pejabat Penguji Penandatanganan SPM: Sarip Hidayat
  - 3. Bendahara Pengeluaran : Gun Gun Mugia Raspati
  - 4. Bendahara Penerimaan : Shita Rouli Handayani
  - 5. PPK Sekretariat Utama: M. Fahrim
  - 6. PPK Kedeputian Pembinaan: Hendra Lastowo
  - 7. PPK Kedeputian Konservasi: Roby Syafurjaya

- 8. PPK Kedeputian IPSK: Lili Hudiyanto
- 9. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan: Ali Sugeng
- 10. BPP Sekretariat Utama: Lingga Dermawan
- 11. BPP Kedeputian Pembinaan: Wasito
- 12. BPP Kedeputian Konservasi : Ayunda Rizqiana
- 13. BPP Kedeputian IPSK: Ahmad Muslih
- 14. Staf PPK pada Sekretariat Utama: Oki Saputra
- 15. Staf PPK pada Kedeputian Pembinaan: Khalwa Khanania
- 16. Staf PPK pada Kedeputian Konservasi : Desna Aviola
- 17. Staf PPK pada Kedeputian IPSK: M. Rizal Taufan
- 18. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai : Lulu Aulia
- 19. Petugas Penerimaan PNBP pada Biro Umum : Suradi
- 20. Petugas Penerimaan PNBP pada Layanan Arsip : Zullaika Astuti
- 21. Petugas Penerimaan PNBP pada Pusat Akreditasi Kearsipan : Nia Pertiwi
- 22. Petugas Penerimaan PNBP pada Sertifikasi SDM Kearsipan : Widya Wahyuni.
- b. Keputusan Kepala ANRI No 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan Bogor Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - 1. Kuasa Pengguna Anggaran: Widarno
  - Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Achmad Sabiqun Nahar
  - 3. Pejabat Pembuat Komitmen: Noor Azizah
  - 4. Bendahara Pengeluaran: Henny Soraya
  - 5. Bendahara Penerimaan: Juwita Fitrasari
  - 6. Staf Pengelola Keuangan: Sifa Rakhmawati.

- c. Keputusan Kepala ANRI Nomor 470 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelaksana atau Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Jasa Kearsipan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - 1. Kuasa Pengguna Anggaran: Rini Agustiani
  - 2. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Wijiyanto
  - 3. Pejabat Pembuat Komitmen: Jumadi
  - 4. Bendahara Pengeluaran: Erma Sulistyoningsih
  - 5. Bendahara Penerimaan: Nurhayati
  - 6. Staf Pengelola Keuangan: Rizma Nikmatus Sholihah.
- d. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana/Pengelola Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - 1. Kuasa Pengguna Anggaran: Muhammad Ihwan
  - Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Renny Setyo Lestari
  - 3. Pejabat Pembuat Komitmen: Junaidin
  - 4. Bendahara Pengeluaran: Sri Wahyuni
  - 5. Staff Pengelola Keuangan: Irfan Adi Wijayanto.

#### F.2.3 Khazanah Arsip

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Khazanah Arsip Statis ANRI Nomor: KN.02.00/1/2023, bahwa Data Khazanah Arsip Statis Satker ANRI Jakarta (Pusat) adalah arsip yang diserahkan oleh Direktorat Akuisisi dengan Data Khazanah Arsip Statis pada Direktorat Preservasi Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### DATA KHAZANAH ARSIP STATIS ANRI

Khazanah Arsip Statis ANRI Jakarta (Pusat)

NO	URAIAN	URAIAN SATUAN SALDO AWAL		SALDO AKHIR	MUTASI
1	Kertas	Meter	30.327,30	30.332,20	4,90
2	Poster	Lembar	384,00	384,00	0,00
3	Kartografi/Peta	Lembar	131.802,00	131.802,00	0,00
4	Foto	Lembar	3.477.270,00	3.477.270,00	0,00
5	Film	Reel	59.055,00	59.055,00	0,00
6	Mikrofilm	Roll	14.502,00	14.502,00	0,00
7	Mikrofische	Fische	14.373,00	14.373,00	0,00
8	Rekaman Suara	Kaset	54.735,00	54.735,00	0,00
9	Reel to Reel Sound	Reel	946,00	946,00	0,00
10	Video	Kaset	27.480,00	27.480,00	0,00
11	Optical Disc	Keping	17.463,00	17.463,00	0,00
12	Piringan Hitam	Keping	101,00	101,00	0,00
13	Flashdisk	Buah	13	15	2,00
14	Arsip Elektronik	Terrabyte	390	632	242,00

Dan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Khazanah Arsip Statis Kantor Satker BAST Nomor: KN.03.00/17/2023, bahwa Data Khazanah Arsip Statis kantor BAST adalah arsip yang diserahkan oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh dengan Data Khazanah Arsip Statis Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

DATA KHAZANAH ARSIP STATIS ANRI

Khazanah Arsip Statis Satuan Kerja BAST

No	Uraian	Saldo Awal	Muta	Saldo Akhir				
INO	Uraidii	30 Juni 2022	Masuk	Keluar	31 Desember 2021			
1	Arsip Kertas	8.916,6 Meter Linier	2,6	-	8.919,2 Meter Linier			
2	Arsip Kearsitekturan	495 Meter Linier	-	-	495 Meter Linier			
3	Arsip Peta	5.536 Lembar	-	-	5.536 Lembar			
4	Arsip CD/DVD/VCD	1.229 Keping	1	-	1.230 Keping			
5	Arsip Kaset	52 Kaset	-	-	52 Kaset			
6	Arsip Foto	1.979 Lembar	-	-	1.979 Lembar			
7	Arsip Disket	43 Keping	-	-	43 Keping			

Terdapat penambahan jumlah khasanah arsip dari kegiatan akuisisi sebanyak 1,6 ML dari Komisi Independen Pemilihan Aceh, satu ML dari Balai Besar Pengawas dan Makanan Aceh serta satu Keping CD hasil wawancara sejarah lisan.

F.2.4 Data Rekening Milik Satuan Kerja ANRI

No.	KPPN	ВА	Es	Satker	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Tgl. Surat Izin	Kode Status
1	139	087	01	450448	ANRI Jakarta	8100124504481000	BPG 139 ARSIP NASIONAL RI	S-947/WPb.12/KP.05/2020	15/05/2020	10
	139	087	01	450448	ANRI Jakarta	1270004807689	BPN 139 ARSIP NASIONAL RI	S-1515/WPB.11/KP.05/2015	2015-05-26	10
	139	087	01	450448	ANRI Jakarta	1270010352514	RKK ARSIP NASIONAL RI OPS	S-604/WPB.12/KP.05/2020	2020-02-27	04
	139	087	01	450448	ANRI Jakarta	1270011566831	RPL 140 PDHL ANRI	WPB.12/KP00031308/2022	28/11/2022	04
2	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	8100124189291000	BPG 139 PUSAT JASA KEARSIPAN	S-947/WPB.12/KP.05/2020	15/05/2020	10
	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	1270007732868	BPN 139 PUSAT JASA KEARSIPAN	S-0051/WPB.12/KP.05/2017	2017-01-09	10
	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	042501001031309	RKK ARSIP NASIONAL RI OPS	000029	2020-10-19	10
3	023	087	01	418934	Pusdiklat Kearsipan	651204189341000	BPG 023 PUSDIKLAT KEARSIPAN	S-562/PB.3/2021	29/03/2021	10
	023	087	01	418934	Pusdiklat Kearsipan	122401000110301	BPN 023 PUSDIKLAT KEARSIPAN	S-201/WPB.13/KP.023/2017	2017-01-12	10
4	001	087	01	681464	Balai Arsip Statis dan	8100176814641000	BPG 001 BALAI ARSIP STATIS DAN	S-947/WPB.12/KP.05/2020	15/05/2020	10
					Tsunami		TSUNAMI			

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, maka dilakukan restrukturisasi rekening pengeluaran. Hal tersebut menyebabkan rekening bendahara pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk menampung uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran menjadi ditutup dan dipindahbukukan ke rekening virtual pengeluaran. Satuan kerja yang melakukan pemindahbukuan di antaranya:

Tabel 115 Daftar Rekening dipindahbukukan

No.	KPPN	DA	E.	Satker	Nama Satker	Nama Rekening	Nomor Rekening Sebelumnya	Nomor Rekening
INU.	KPPIN	DA	ES	Jacker	INdIIId Jalkei	Ivallia nekelillig	(Ditutup)	Virtual (Baru)
1	139	087	01	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	BPG 139 ARSIP NASIONAL RI	1270088006182	8100124504481000
2	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	BPG 139 PUSAT JASA KEARSIPAN	1270007732900	8100124189291000
3	139	087	01	681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	BPG 001 BALAI ARSIP STATIS DAN	7432009151	8100176814641000
						TSUNAMI		
4	139	087	01	418934	Pusdiklat Kearsipan	BPG 023 PUSDIKLAT KEARSIPAN	651204189341000	8100176814641000

Pada tanggal 28 November 2022 telah disetujui pembukaan Rekening Lainnya atas nama Arsip Nasional RI Jakarta oleh KPPN Khusus Pinjaman Hibah melalui surat nomor: WPB.12/KP00031308/2022 dengan nama rekening RPL 140 PDHL ANRI dan nomor register: 2U6JTQGA. Pembukaan rekening hibah luar negeri dilakukan sebagai respon atas *rencana* pemberian hibah langsung dalam bentuk uang tunai oleh UNESCO sebesar Rp109.189.237,00 dalam rangka pelaksanaan kegiatan "Celebration of The 30<sup>th</sup> Anniversary of The

Establishment of The Memory of The World Programme" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Hibah Nomor: KE.00.01/107/2022 tanggal 3 November 2022 dengan tanggal batas penarikan/closing date 30 Desember 2022. (Catatan: Pemberian hibah oleh pemberi hibah ditunda karena penundaan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan akan dilaksanakan pada tahun 2023).

# F.2.5 Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2021 yang Disetorkan ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2022

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (42591x) merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga di antaranya terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911); Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912); dan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425913). (lihat LRA – B.1.7 Pendapatan Lain-Lain).

# F.2.6 Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2022 yang Disetorkan ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2023 (*data cut-off* 5 Mei 2023)

## Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)

KODE SATKER	SATUAN KERJA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
450448	ANRI Jakarta		1.080.000,00
	F	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1.080.000,00

# Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)

KODE SATKER	SATUAN KERJA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)							
450448	ANRI Jakarta		136.379.510,00							
418929	Pusat Jasa Kearsipan		11.933.510,00							
	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 148.313.020,0									

#### Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)

KODE SATKER	SATUAN KERJA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)						
450448	ANRI Jakarta		136.379.510,00						
	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL 136.379.510,0								

# F.2.7 Kegiatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam rangka menghadapi ancaman COVID-19, ANRI berupaya meningkatkan pelaksanaan seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh ANRI dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

# A. Penanganan pegawai konfirmasi positif dan kontak erat

Pada saat ditemukan dan/atau mendapat informasi adanya pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19, beberapa langkah yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 dan Unit kerja terkait diantaranya:

- Penelusuran Kontak erat berdasarkan laporan dari Unit Kerja terkait melalui Nota Dinas yang disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas ANRI serta informasi yang disampaikan oleh pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 saat penelusuran. Apabila terdapat Pegawai yang berstatus kontak erat dengan pegawai terkonfirmasi COVID-19 maka tindaklanjut yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan swab Antigen di Klinik ANRI atau mandiri tanpa penggantian biaya.
- Pegawai Terkonfirmasi COVID-19 dilaporkan melalui Aplikas NAR (New All Record) oleh Klinik Pratama ANRI sebagai bentuk pendataan jumlah pegawai terkonfirmasi COVID-19 di ANRI;
- Pegawai Terkonfirmasi COVID-19 juga melaporkan kondisinya ke puskesmas domisili tinggal, supaya perkembangan kesehatannya dipantau dan apabila mengalami kedaruratan dapat segera ditangani. Selain oleh Puskesmas domisili tinggal, perkembangan kondisi Kesehatan pegawai juga akan dipantau oleh Tenaga Kesehatan ANRI;
- 4. Pegawai terkonfirmasi COVID-19 akan diberikan bantuan obatobatan sesuai gejala (kecuali Antivirus). Pemberian Antivirus dapat dilakukan oleh Puskesmas. yang tidak mendapat tindaklanjut

- pemberian Antivirus dari Puskesmas, diarahkan untuk melakukan *Telemedicine*.
- Pada Unit Kerja yang terdapat salah satu pegawainya terkonfirmasi
   COVID-19 akan dilakukan penutupan dan disinfeksi sepanjang area
   mobilitas pegawai tersebut selama 3x24 jam;
- Pegawai Terkonfirmasi COVID-19 juga wajib lapor kepada Puskesmas Domisili Kantor oleh Satgas COVID-19 ANRI sebagai bentuk koordinasi, pemantauan, dan pendataan jumlah pegawai terkonfirmasi COVID-19 di ANRI;
- 7. Menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kepada seluruh pegawai secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat, melalui pengumuman mingguan yang dipublikasikan ke seluruh unit kerja dan melalui telegram satu data ANRI.

Data Jumlah Pegawai Terkonfirmasi COVID-19 per 31/12/2022

Triwulan	Bulan	Jumlah pegawai							
	Januari	18							
I	Februari	79							
	Maret	25							
	April	3							
II	Mei	-							
	Juni	8							
	Juli	22							
III	Agustus	36							
	September	16							
IV	Oktober	7							
	November	33							
	Desember	10							
Jumlah	Jumlah Keseluruhan 257								

Data Jumlah Pegawai Kontak Erat dengan Keluarga Yang Terkonfirmasi COVID-19 per 31/12/2022

Triwulan	Bulan	Jumlah pegawai
	Januari	3
I	Februari	28
1	Maret	3
	April	2
II	Mei	-
	Juni	2
	Juli	2
III	Agustus	5
	September	1
	Oktober	2
IV	November	5
	Desember	2
Jumlah	Keseluruhan	55

## B. Pengadaan obat-obatan layanan Kesehatan

Salah satu bentuk dukungan ANRI bagi pegawai terkonfirmasi COVID-19 yaitu dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan dan multi-vitamin bagi pegawai yang sedang melakukan isolasi mandiri dirumah, sehingga pengadaan obat-obatan lebih difokuskan untuk jenis obat-obatan untuk meringankan gejala yang seringkali ditimbulkan oleh COVID-19.

#### C. Pelaksanaan Skrinning Test

Skrining COVID-19 berupa pemeriksaan Swab Antigen bagi pegawai ANRI yang memiliki gejala mengarah ke COVID-19 sesuai rekomendasi dokter Klinik Pratama ANRI. Pemeriksaan Swab antigen menggunakan Kit Biosensor yang disediakan oleh Biro Umum sebanyak 565 kit.

#### D. Pemberian Vitamin Daya Tahan Tubuh melalui rute injeksi

Vitamin C adalah nutrisi yang memiliki banyak peran penting untuk kekebalan tubuh kita seperti penyembuhan luka, mencegah kerusakan sel, merangsang kolagen, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memberikan efek cerah dan kenyal pada bagian kulit, terutama wajah.

Pemberian vitamin C melalui rute injeksi digunakan ketika kadar vitamin C dalamtubuh seseorang perlu ditingkatkan dengan cepat atau jika suplemen oral tidak dapat dikonsumsi karena penyerapan yang buruk

dalam diri seseorang. Vitamin C tidak hanya suatu antioksidan, tetapi juga mempunyai efek antivirus dengan membunuh virus dan mencegah replikasi virus. Para peneliti telah menunjukkan bahwa kadar vitamin C dapat menurun pada pasien dengan infeksi pernapasan akut, sehingga pemberian vitamin C dapat meningkatkan kadar vitamin C.

Pada pasien *coronavirus*, kadar vitamin C menurun secara drastis saat mereka mengalami sepsis, yaitu suatu respons inflamasi yang terjadi saat tubuh bereaksi berlebihan terhadap infeksi. Diharapkan pemberian vitamin C (injeksi) bagi pegawai sebagai upaya pencegahan karena imunitas tubuh telah ditingkatkan.

#### E. Seminar Kesehatan

Seminar Kesehatan bagi seluruh pegawai ANRI dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022 dengan topik "Pencegahan Berbagai Penyakit di Lingkungan Kerja dan Tips Posisi Ergonomis saat Bekerja". Narasumber dalam seminar tersebut yaitu, Dr. Edbert Wreksoatmodjo, SpKFR,MSc dan Tim Fisioterapi dariPhysio Medical Clinic, Seminar diikuti oleh 180 orang peserta.





Materi yang disampaikan diantaranya: Keluhan yang sering dirasakan oleh pegawai kantoran, tips mengatur meja kerja, tips tidur, beberapa *stretching* yang dapat dilakukan. Sesi selanjutnya dipimpin oleh Terapis dari PMC untuk peregangan ringan yang dapat dilakukan di sela-sela jam kerja pukul 14.00 – 16.00 WIB. Tujuan seminar kesehatan ini agar pegawai ANRI lebih sadar untuk menjaga posisi ergonomis saat

bekerja dan melakukan stretching tiap 2-3jam serta rutin dilakukan selama aktivitas bekerja.

## F. Vaksinasi Booster bagi Pegawai dan Pensiunan

Vaksinasi Booster bagi Pegawai dan Pensiunan Kantor Arsip Nasional RI Gedung C Lantai 1 & 2 pada tanggal 8 Februari 2022. Kegiatan Vaksinasi Booster bagi Pegawai, Pensiunan Pegawai dan Masyarakat Umum di ANRI, dibuka oleh Kepala ANRI, Drs. Imam Gunarto, M. Hum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan vaksin booster di Indonesia. Syarat bagi peserta untuk mendapatkan vaksin booster adalah sudah memiliki e-tiket dari Peduli Lindungi dengan jarak minimal dari vaksin kedua adalah 6 bulan.

Lokasi kegiatan berada di kantor ANRI, Jalan Ampera Raya No 17 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaksanaan vaksinasi berada di lantai 1 dan 2 Gedung C. Ruangan dibagi menjadi 3 lokasi utama yaitu ruang registrasi, ruang skrining & ruang vaksinasi, dan ruang observasi & mini-ICU. Selama pelaksanaan terdapat tenaga medis yang stand by di ruang mini-ICU serta terdapat ambulance untuk kondisi darurat. Jumlah peserta 507 + 16 (lansia) dengan logistic Vaksin *Astrazeneca* bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan petugas dari beberapa Rumah Sakit.

Jakarta, 9 Mei 2023 Pengguna Anggaran,



Imam Gunarto
NIP 19630728 199203 1 001



		Ke	wenangan R	evisi	Tanggal P	engesahan			
Dokumen	Nomor SP DIPA	DJA	KANWIL	КРА	DIPA	РОК	Unit Pengusul		Keterangan
DIPA AWAL	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 1 November 2021	7			17 November 2020				
DIPA REVISI 01 (Pencandangan Anggaran 5 %)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 1 Desember 2021	3 V			13 Desember 2021				Revisi dilakukan menindaklanjuti Surat Menkeu RI No.S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Terdapat pencadangan anggaran 5 % dari RM ANRI sebesar 13.379.646.000, terdiri dari 10.048.012.000 dari Program Dukungan Manajemen dan 3.331.634.000 dari Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.
POK Awal						20 Desember 2021			
POK I (Pergeseran antar akun belanja)				v		24 Maret 2022	2	Biro OKH Biro Perencanaan dan Humas Biro Umum	Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama
DIPA REVISI 02 (Buka Blokir dan pergeseran antar KRO)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 1 Maret 2022	2 V			12 Maret 2022				Pengajuan revisi dilakukan terhadap blokir berdasarkan hasil clearance Kominfo terhadap belanja TIK ANRI yang mendapatkan Rekomendasi apat ditindaklanjuti, serta usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan informasi. Buka blokir disetujui sebesar 19.669.729.000, dai semula 64.552.111.000 menjadi 44.882.282.000. Selain itu juga terdapat revisi pergeseran antar RO antar KRO, antar jenis belanj, dan penambahan volume RO.
POK II (Hasil Pengesahan DIPA II)  POK III (Pergeseran antar akun, antar komponen)				V		16 Maret 2022	2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Biro OKH Biro Perencanaan dan Humas Biro Umum Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi Dit. KP Dit. Akuisisi Dit. Preservasi Dit. Pengolahan Dit. Layanan dan Pemanfaatan Pusjibang Siskar Pusat SJIKN Pusdatin Inspektorat Pusat Akreditasi Kearsipan Biro Perencanaan dan Humas Dit. KP Dit. KD 1 Dit. KD 2 Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi Pusat Akreditasi Kearsipan	POK yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi DIPA 2  Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama atau antar komponen
POK IV (Pergeseran antar akun)				V		31 Maret 2022	2 3 4	Biro OKH Biro Perencanaan dan Humas Biro Umum Dit. Preservasi Dit. Pengolahan	Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama
DIPA REVISI 03 (Revisi Halaman III)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 1 April 2022	1	v		11 April 2022			2.5.2.2.3000000	Revisi Halaman III DIPA untuk penyesuaian RPD pada Satker ANRI Jakarta
POK V (Pergeseran antar akun, antar kompoen)	, , ,			v		13 April 2022	3	Biro OKH Biro Perencanaan dan Humas Biro Umum Dit. KD 1	Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama dan antar komponen

		Kev	venangan R	evisi	Tanggal P	engesahan			
Dokumen	Nomor SP DIPA	DJA	KANWIL	КРА	DIPA	РОК		Unit Pengusul	Keterangan
							5	Dit. Akuisisi	
								Dit. Preservasi	
								Dit. Pengolahan	
							8	Pusat SJIKN	
DIPA REVISI 04 (Buka Blokir II)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 30 April 2022	V			30 April 2022				Pengajuan revisi dilakukan terhadap blokir berdasarkan hasil clearance Kominfo terhadap belanja TIK ANRI yang mendapatkan Rekomendasi apat ditindaklanjuti, serta usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan informasi. Buka blokir disetujui sebesar 21.616.629.000, dari semula 44.882.282000 menjadi 23.265.653.000. Selain itu juga terdapat revisi pergeseran antar RO antar KRO, antar jenis belanja, Penurunan Volume RO, dan penambahan volume RO.
POK VI (Pengesahan				V		10 Mei 2022	1	Biro OKH	Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama dan antar
DIPA 4, Pergeseran							2	Biro Perencanaan dan Humas	komponen
antar akun, antar							3	Biro Umum	
kompoen)							4	Dit. KP	
							_	Dit. KD 1	
								Dit. KD 2	
								Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
								Dit. Akuisisi	
							_	Dit. Layanan dan Pemanfaatan	_
								Dit. Preservasi	-
								Dit. Pengolahan Pusdatin	-
							_	Pusat SJIKN	-
								Inspektorat	-
							_	Pusat Akreditasi Kearsipan	
DIPA REVISI 05 (Revisi Halaman III)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 30 Mei 2022		V		30 Mei 2022				Revisi Halaman III DIPA untuk penyesuaian RPD pada Satker ANRI Jakarta
DIPA REVISI 06 (Buka	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 6 Juni 2022	v			6 Juni 2022				Revisi dilakukan menindaklanjuti Surat Menkeu RI No.S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022
Blokir dan Automatic									Hal Penambahan Automatic Adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, terdapat
Adjustment II)									penambahan Automatic Adjustment sebesar Rp13.609.257.000. Selain itu juga terdapat usulan buka blokir.
POK VII (Pengesahan				v		8 Juni 2022	1	Biro OKH	Revisi POK yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi DIPA 6. Selain itu
DIPA 06, antar				•		0 34111 2022		Biro Perencanaan dan Humas	dalam rangka pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama dan antar
komponen)							_	Biro Umum	komponen.
								Dit. KP	
							5	Dit. KD 1	
							6	Dit. KD 2	
								Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
								Dit. Akuisisi	
								Dit. Layanan dan Pemanfaatan	_
								Dit. Preservasi	-
								Dit. Pengolahan Pusdatin	-
								Pusat SJIKN	-
								Pusjibang Siskar	-
							-	Inspektorat	-
								Pusat Akreditasi Kearsipan	-
POK VIII (Pergeseran				٧		14 Juni 2022	_	Biro OKH	Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama dan antar
antar akun, antar							_	Biro Umum	komponen
komponen)								Dit. KD 1	
								Dit. KD 2	
							5	Pusat SJIKN	

		Ke	wenangan R	evisi	Tanggal P	engesahan			
Dokumen	Nomor SP DIPA	DJA	KANWIL	КРА	DIPA	РОК		Unit Pengusul	Keterangan
POK IX (Pergeseran				V		23 Juni 2022	_	Biro Perencanaan dan Humas	Revisi dilakukan untuk pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama dan antar
antar akun, antar								Dit. KP	komponen
komponen)								Dit. KD 1	
							_	Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
								Dit. Layanan dan Pemanfaatan	
							6	Dit. Pengolahan	
DIPA REVISI 07 (Revisi Pergeseran antar satker dalam satu DJPB yang sama, Halaman III)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 27 Juni 2022		V		27 Juni 2022				Revisi Pergeseran komponen 002 dari satker ANRI Jakarta ke satker Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp600.393.000, dan penyesuaian Halaman III DIPA.
POK X (Pergeseran				v		30 Juni 2022	1	Biro Perencanaan dan Humas	Revisi POK yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi DIPA 7. Selain itu
antar akun, antar				•		30 30111 2022		Biro Umum	dalam rangka pergeseran antar akun belanja dalam komponen yang sama.
komponen)							_	Dit. KD 1	dalam rangka pergeseran antar akan belanja dalam komponen yang sama.
Komponeny							_	Inspektorat	
DIPA REVISI 08	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022			v		1 Juli 2022		Пэректогас	Pemutakhiran POK kewenangan KPA
(Pemutkhiran POK)	NOWOK.31 DII A- 007.01.1.430446/2022			"		1 3411 2022			T CHIULBINII BH T OK KEWEHBIIGBIT KI A
<u> </u>	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 19 Juli 2022	v			19 Juli 2022				Pengajuan revisi dilakukan terhadap usulan buka blokir terkait kebutuhan kelengkapan
Blokir)	1001001.51 DII A-007.01.1.450-440/2022, 13 Juli 2022				19 Juli 2022				informasi. Buka blokir disetujui sebesar 2.337.993.000, dari semula 36.389.605.000 menjadi 34.051.612.000. Selain itu juga terdapat revisi pergeseran antar kegiatan, antar RO antar KRO, antar jenis belanja, dan Penurunan Volume RO.
POK XI (Pengesahan				v		25 Juli 2022	1	Biro Perencanaan dan Humas	Revisi POK satker ANRI Jakarta yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi
DIPA 9 dan Pergeseran							2	Biro OKH	DIPA 9. Selain itu dalam rangka pergeseran dalam satu komponen yang sama.
dalam satu komponen)							3	Biro Umum	
							4	Pusat SJIKN	
							5	Inspektorat	
							6	Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
							7	Dit. Akuisisi	
							8	Dit. Preservasi	
							9	Dit. Layanan dan Pemanfaatan	
							10	Dit. Pengolahan	
POK XII (Pergeseran				V		8 Agustus 2022	1	Biro Perencanaan dan Humas	Revisi POK satker ANRI Jakarta dalam rangka pergeseran dalam satu komponen yang sama.
dalam satu komponen)							2	Biro OKH	
							3	Pusat SJIKN	
							4	Inspektorat	
							5	Dit. KD 2	
							6	Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
							7	Dit. Akuisisi	
							8	Dit. Preservasi	
							9	Dit. Pengolahan	
DIPA REVISI 10 (Pemutkhiran POK)	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022			V		12 Agustus 2022			Pemutakhiran POK kewenangan KPA
	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 1 September 2022	V			1 September 2022				Revisi dilakukan dalam rangka buka blokir anggaran sebesar Rp6.591.649.000 serta pergeseran anggaran antar kegiatan dan kenaikan target volume RO. Selain itu terdapat usulan kenaikan target dan pagu PNBP 2022.
POK XIII (Pengesahan				V		6 September	1	Biro Umum	Revisi POK satker ANRI Jakarta yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi
DIPA 11 dan						2022	2	Biro Perencanaan dan Humas	DIPA 11. Selain itu dalam rangka pergeseran dalam satu komponen yang sama.
Pergeseran dalam satu							3	Biro OKH	
komponen)							4	Inspektorat	
							5	Dit. Layanan dan Pemanfaatan	
							6	Dit. Preservasi	
ı	1	•	1			•			<u> </u>

		Kev	wenangan R	evisi	Tanggal P	engesahan			
Dokumen	Nomor SP DIPA	DJA	KANWIL	КРА	DIPA	РОК		Unit Pengusul	Keterangan
							7	Pusat SJIKN	
						ŀ		Pusjibang Siskar	-
								Pusdatin	-
								Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	-
						ŀ		Pusat Akreditasi Kearsipan	-
DIPA REVISI 12 (Pemenuhan Kebutuhan PPPK, ujikom JPT Pratama	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 3 Oktober 2022	V			3 Oktober 2022			- date in editor reasing	Revisi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan PPPK sesuai Keputusan Menpan Nomor 356 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 78 orang serta kebutuhan uji kompetensi JPT Pratama. Selain itu usulan revisi untuk pemutakhiran POK atas revisi POK kewenangan KPA sebelumnya
serta buka blokir)				V		5 Oktober 2022	- 1	Biro Umum	Revisi POK satker ANRI Jakarta yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi
POK XIV (Pengesahan				<b>'</b>		5 Oktober 2022		Biro Omum	DIPA 12
DIPA 12)								Pusdatin	
DIPA REVISI 13	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 19 Oktober	v			19 Oktober 2022		3	Pusuatin	Revisi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-800/MK.02/2022
(Pergeseran Belanja	2022	, v			19 Oktober 2022				tanggal 29 September 2022 sebesar Rp3.856.634.000 dan usulan revisi buka blokir untuk
pegawai ke BA BUN)									pemenuhan kebutuhan tukin jabatan fungsional di lingkungan ANRI sebesar Rp4.047.034.000
,									
POK XV (Pengesahan DIPA 13)				V		25 Oktober 2022	1	Biro Umum	Revisi POK satker ANRI Jakarta yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi DIPA 13
DIPA REVISI 14	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 2 November	v			2 November				Revisi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penominasian arsip pendirian ASEAN
(Pergeseran anggaran		-			2022				sebagai MOW Asia Pasifik yang diselenggarakan di Aceh serta pergeseran antar satker untuk
untuk Penominasian									memenuhi belanja operasional ke satker BAST. Selain itu terdapat usulan revisi penambahan
Arsip Pendirian ASEAN									volume RO dan revisi anggaran buka blokir.
sebagai MOW Asia									
Pasifik)									
POK XVI (Pengesahan				٧		7 November		Biro OKH	Revisi POK satker ANRI Jakarta yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi
DIPA 14)						2022		Biro Perencanaan dan Humas	DIPA 13
								Biro Umum	
								Inspektorat	
								Dit. KD 1	
								Dit. KD 2	
								Dit. KP	-
								Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi Dit. Pengolahan	-
								Dit. Preservasi	-
								Dit. Layanan dan Pemanfaatan	-
						ŀ		Pusat SJIKN	-
						ŀ		Pusat Akreditasi Kearsipan	1
POK XVII (Pergeseran				v		16 November		Biro Perencanaan dan Humas	Revisi POK yang disahkan dalam rangka pergeseran antar akun belanja dalam satu komponen
antar akun, antar				'		2022		Inspektorat	maupun antar komponen.
komponen)								Dit. KP	1 ' '
' '							4	Dit. KD 1	1
							5	Dit. KD 2	
						[	6	Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	_
						[	7	Dit. Pengolahan	
1						[		Dit. Preservasi	_
								Dit. Layanan dan Pemanfaatan	_
								Dit. Akuisisi	_
								Pusat SJIKN	
POK XVIII (Pergeseran				V		29 November		Biro Perencanaan dan Humas	Revisi POK yang disahkan dalam rangka pergeseran antar akun belanja dalam satu komponen
antar akun, antar	1		I	l	I	2022	2	Biro Umum	maupun antar komponen.

		Kev	wenangan R	evisi	Tanggal P	engesahan			
Dokumen	Nomor SP DIPA	DJA	KANWIL	КРА	DIPA	РОК		Unit Pengusul	Keterangan
komponen)							3	Biro OKH	
								Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
							5	Dit. Layanan dan Pemanfaatan	
							6	Pusdatin	
DIPA REVISI 15	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 29 November			v		29 November			Pemutakhiran POK kewenangan KPA
(Pemutakhiran POK)						2022			
DIPA REVISI 16	NOMOR:SP DIPA- 087.01.1.450448/2022, 5 Desember	V			5 Desember				Revisi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-958/MK.02/2022
(Pergeseran anggaran	2022				2022				tanggal 21 November 2022 Hal Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2022 yang
ke BA BUN)									Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
POK XIX (Pengesahan				V		9 Desember 2022		Biro OKH	Revisi POK satker ANRI Jakarta yang disahkan merupakan hasil pengesahan DIPA terkait revisi
DIPA 9 dan Pergeseran								Biro Perencanaan dan Humas	DIPA 16. Selain itu dalam rangka pergeseran dalam satu akun dan satu komponen serta antar
antar akun, antar							3	Biro Umum	akun dan antar komponen.
komponen)								Inspektorat	
								Dit. KP	
								Dit. KD 1	
								Dit. KD 2	
								Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
								Dit. Pengolahan	
								Dit. Preservasi	
								Pusat SJIKN	
								Pusjibang Siskar	
								Pusdatin	
								Pusat Akreditasi Kearsipan	
POK XX (Pergeseran				V		14 Desember		Biro OKH	Revisi POK yang disahkan dalam rangka pergeseran antar akun belanja dalam satu komponen
antar akun, antar						2022		Biro Perencanaan dan Humas	maupun antar komponen.
komponen)								Biro Umum	
								Dit. KD 2	
								Dit. Layanan dan Pemanfaatan	
							6	Dit. SDM Kearsipan dan Sertifikasi	
DIPA REVISI 17				V		27 Desember			Pemutakhiran final POK 2022 kewenangan KPA
(Pemutakhiran POK)						2022			





#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA KPPN JAKARTA V

# HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 450448 SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	233,338,806,000	233,338,806,000	0
2	Belanja	227,004,192,502	227,004,192,502	0
3	Pengembalian Belanja	-1,804,298,601	-1,804,298,601	0
4	Estimasi Pendapatan	1,133,401,000	1,133,401,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,850,668,956	2,850,668,956	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-23





#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA KPPN JAKARTA V

# HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 418929 SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,424,785,000	8,424,785,000	0
2	Belanja	6,687,683,079	6,687,683,079	0
3	Pengembalian Belanja	-76,106,226	-76,106,226	0
4	Estimasi Pendapatan	8,430,490,000	8,430,490,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	6,997,467,400	6,997,467,400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JAN-23





#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI JAWA BARAT KPPN BOGOR

# HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 418934 SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	11,365,646,000	11,365,646,000	0
2	Belanja	10,644,085,354	10,644,085,354	0
3	Pengembalian Belanja	-53,520,185	-53,520,185	0
4	Estimasi Pendapatan	8,842,630,000	8,842,630,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,020,038,300	9,020,038,300	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-23





#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM KPPN BANDA ACEH

# HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 681464 SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,172,710,000	5,172,710,000	0
2	Belanja	5,151,984,936	5,151,984,936	0
3	Pengembalian Belanja	-4,880,000	-4,880,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	638,500	638,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	669,737,445	669,737,445	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20-JAN-23



I	I APORAN KEHANGAN HTAMA
I.	LAPORAN KEUANGAN UTAMA
I.	LAPORAN KEUANGAN UTAMA
I.	LAPORAN KEUANGAN UTAMA

# I.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 087

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:13 PM

Halaman: 1

lap\_lra\_face\_kl\_komparatif

					_				
		<del></del>	2022				2021		
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	18,406,521,000	18,868,813,156	462,292,156	103	13,747,363,000	14,135,188,117	(387,825,117)	103
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	18,406,521,000	18,868,813,156	462,292,156	103	13,747,363,000	14,135,188,117	(387,825,117)	103
В	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	105,511,248,000	103,461,190,132	2,050,057,868	98	101,888,054,000	98,433,862,267	3,454,191,733	97
	BELANJA BARANG	122,035,836,000	114,560,896,150	7,474,939,850	94	83,207,209,000	78,305,118,644	4,902,090,356	94
	BELANJA MODAL	30,754,863,000	29,527,054,577	1,227,808,423	96	60,522,741,000	57,987,086,737	2,535,654,263	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 087

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:13 PM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_kl\_komparatif

			2022				2021		
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	258,301,947,000	247,549,140,859	10,752,806,141	96	245,618,004,000	234,726,067,648	10,891,936,352	96
С	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan:

FINAL

# I.2 NERACA

# **NERACA**

# TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl Data 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak 10/05/23 2:14 PM

Halaman 1

lan neraca ki komparati

			lap_nera	ca_kl_komparatif
	JUMI	_AH	Kenaikan (Penu	ırunan)
NAMA PERKIRAAN	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	10,000,000	(10,000,000)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	19,969,700	(19,969,700)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	0	5,447,200	(5,447,200)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(27,236)	27,236	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	5,419,964	(5,419,964)	(100.00)
Persediaan	2,532,257,217	2,346,583,401	185,673,816	7.91
JUMLAH ASET LANCAR	2,532,257,217	2,381,973,065	150,284,152	6.31
ASET TETAP				
Tanah	806,226,080,906	805,561,648,718	664,432,188	0.08
Peralatan dan Mesin	281,121,046,237	265,069,905,094	16,051,141,143	6.06
Gedung dan Bangunan	369,395,018,369	367,489,805,847	1,905,212,522	0.52
Jalan, Irigasi dan Jaringan	62,881,974,526	62,881,974,526	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,841,315,574	26,872,634,444	968,681,130	3.60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	446,248,000	2,399,298,000	(1,953,050,000)	(81.40)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(338,122,973,305)	(302,338,418,590)	(35,784,554,715)	11.84
JUMLAH ASET TETAP	1,209,788,710,307	1,227,936,848,039	(18,148,137,732)	(1.48)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	26,934,084,967	22,227,611,637	4,706,473,330	21.17
Aset Lain-lain	1,162,593,490	7,174,207,984	(6,011,614,494)	(83.79)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(22,099,807,347)	(23,262,058,451)	1,162,251,104	(5.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	5,996,871,110	6,139,761,170	(142,890,060)	(2.33)
JUMLAH ASET	1,218,317,838,634	1,236,458,582,274	(18,140,743,640)	(1.47)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,129,487,302	1,976,132,042	153,355,260	7.76
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,129,487,302	1,976,132,042	153,355,260	7.76
JUMLAH KEWAJIBAN	2,129,487,302	1,976,132,042	153,355,260	7.76
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,216,188,351,332	1,234,482,450,232	(18,294,098,900)	(1.48)
JUMLAH EKUITAS	1,216,188,351,332	1,234,482,450,232	(18,294,098,900)	(1.48)
JUMLAH EKUITAS	1,216,188,351,332	1,234,482,450,232	(18,294,098,900)	(1.48)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,218,317,838,634	1,236,458,582,274	(18,140,743,640)	(1.47)

# **NERACA**

# **TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak 10/05/23 2:14 PM

Halaman

lap\_neraca\_kl\_komparatif

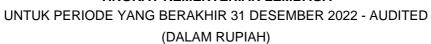
Keterangan:

FINAL

# I.3 LAPORAN OPERASIONAL

# LAPORAN OPERASIONAL

# **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**





KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: ( 087 ) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

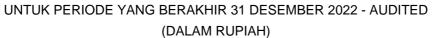
Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:10 PM

Halaman : 1 lap\_lo\_kl

		lap_lo_	KI	
URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,051,904,844	14,058,121,456	3,993,783,388	28.409
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,051,904,844	14,058,121,456	3,993,783,388	28.409
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,051,904,844	14,058,121,456	3,993,783,388	28.409
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	103,405,785,971	99,733,645,489	3,672,140,482	3.682
Beban Persediaan	5,508,470,190	4,759,308,978	749,161,212	15.741
Beban Barang dan Jasa	66,607,786,782	49,743,450,432	16,864,336,350	33.903
Beban Pemeliharaan	11,956,165,236	10,209,936,810	1,746,228,426	17.103
Beban Perjalanan Dinas	29,780,456,329	13,103,236,740	16,677,219,589	127.276
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	9,644,450	3,306,994	6,337,456	191.638
Beban Bunga	0	0	0	
				1

# LAPORAN OPERASIONAL

# **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**





KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: ( 087 ) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:10 PM

Halaman : 2

		lap_lo_	kl	
URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	48,653,639,758	38,937,865,750	9,715,774,008	24.952
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(27,236)	27,236	(54,472)	(200)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	265,921,921,480	216,490,778,429	49,431,143,051	22.833
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(247,870,016,636)	(202,432,656,973)	(45,437,359,663)	22.446
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,596,045,989)	128,730,888	(1,724,776,877)	(1,339.8
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	478,201,011	132,750,888	345,450,123	- /
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,074,247,000	4,020,000	2,070,227,000	51,498. 184
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	104
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	264,163,214	9,351,454	254,811,760	2,724.8 36
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	264,663,014	66,324,189	198,338,825	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	499,800	56,972,735	(56,472,935)	(99.123)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,331,882,775)	138,082,342	(1,469,965,117)	(1,064.5 57)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(249,201,899,411)	(202,294,574,631)	(46,907,324,780)	23.188
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(249,201,899,411)	(202,294,574,631)	(46,907,324,780)	23.188

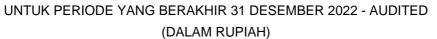
Keterangan:

**FINAL** 

# I.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**





KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: ( 087 ) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:13 PM

Halaman : 1 lap\_lpe\_kl

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,234,482,450,232	1,217,622,514,276	16,859,935,956	1.385
SURPLUS/DEFISIT-LO	(249,201,899,411)	(202,294,574,631)	(46,907,324,780)	23.188
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,343,705,968	(1,436,368,944)	2,780,074,912	(193.54 9)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	o,
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	372,127,275	(372,127,275)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	1,353,705,968	(1,808,496,219)	3,162,202,187	(174.85 3)
LAIN-LAIN	(10,000,000)	0	(10,000,000)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	229,564,094,543	220,590,879,531	8,973,215,012	4.068
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,294,098,900)	16,859,935,956	(35,154,034,856)	(208.50 6)
EKUITAS AKHIR	1,216,188,351,332	1,234,482,450,232	(18,294,098,900)	(1.482)

Keterangan:

**FINAL** 

## II LAPORAN KEUANGAN TAMBAHAN

### II.1 LRA BELANJA MENURUT AKUN

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kode Lap : LRA.B.KL.1

Tanggal : 10/05/23 2:20 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl --rekon17

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** 

: 087

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** 

KODE	LIDAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI BELANJA		%	SISA ANGGARAN
KODE	URAIAN	SEMULA	SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA		REALISASI SISA ANGGAR ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	32,702,068,000	31,375,595,000	30,676,247,980	0	30,676,247,980	97.77	699,347,020
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	700,000	444,000	434,732	4,443	430,289	97.91	13,711
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,020,074,000	2,035,668,000	2,030,757,910	0	2,030,757,910	99.76	4,910,090
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	528,150,000	515,475,000	513,927,884	0	513,927,884	99.7	1,547,116
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,162,720,000	1,870,919,000	1,824,620,000	244,981,680	1,579,638,320	97.53	291,280,680
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,384,372,000	5,487,777,000	5,124,320,000	555,000	5,123,765,000	93.38	364,012,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	207,956,000	417,631,000	389,825,720	0	389,825,720	93.34	27,805,280
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,494,090,000	1,595,220,000	1,590,198,360	0	1,590,198,360	99.69	5,021,640
511129	Belanja Uang Makan PNS	6,868,752,000	5,226,408,000	4,768,707,000	0	4,768,707,000	91.24	457,701,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,444,984,000	3,634,680,000	3,530,080,000	2,800,000	3,527,280,000	97.12	107,400,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	595,490,000	174,931,000	174,375,000	9,350,000	165,025,000	99.68	9,906,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	53,409,356,000	52,334,748,000	50,623,494,586	257,691,123	50,365,803,463	96.73	1,968,944,537
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	228,576,000	228,576,000	147,469,000	0	147,469,000	64.52	81,107,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	228,576,000	228,576,000	147,469,000	0	147,469,000	64.52	81,107,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	57,922,400,000	52,947,924,000	52,947,917,669	0	52,947,917,669	100	6,331
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	57,922,400,000	52,947,924,000	52,947,917,669	0	52,947,917,669	100	6,331
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	111,560,332,000	105,511,248,000	103,718,881,255	257,691,123	103,461,190,132	98.3	2,050,057,868
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17,897,904,000	17,953,807,000	17,804,243,264	0	17,804,243,264	99.17	149,563,736
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,086,660,000	990,124,000	874,932,000	0	874,932,000	88.37	115,192,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	330,390,000	224,006,000	159,916,658	0	159,916,658	71.39	64,089,342
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	824,640,000	883,034,000	801,220,000	1,425,000	799,795,000	90.73	83,239,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,308,685,000	1,177,579,000	1,132,692,077	0	1,132,692,077	96.19	44,886,923
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	158,600,000	281,515,000	281,118,000	0	281,118,000		397,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	21,606,879,000	21,510,065,000	21,054,121,999	1,425,000	21,052,696,999	97.88	457,368,001
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	8,810,942,000	9,140,127,000	8,623,375,560	0	8,623,375,560	94.35	516,751,440
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,652,350,000	3,836,018,000	3,419,750,000	13,717,500	l ' ' '		429,985,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,039,830,000	1,824,735,000	1,722,080,602	0	1,722,080,602		102,654,398
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	150,000,000	0	0	0	0		0

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.KL.1

Tanggal : 10/05/23 2:20 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

		ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI BELANJA		%	
KODE	URAIAN	SEMULA	SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	102,078,000	99,253,115	0	99,253,115	97.23	2,824,885
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15,653,122,000	14,902,958,000	13,864,459,277	13,717,500	13,850,741,777	93.03	1,052,216,223
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,471,833,000	5,547,676,000	5,439,437,041	0	5,439,437,041	98.05	108,238,959
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	144,274,000	237,392,000	230,710,000	0	230,710,000	97.19	6,682,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,616,107,000	5,785,068,000	5,670,147,041	0	5,670,147,041	98.01	114,920,959
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	8,808,000,000	9,210,217,000	9,055,084,015	0	9,055,084,015	98.32	155,132,985
522112	Belanja Langganan Telepon	147,006,000	60,951,000	40,357,931	0	40,357,931	66.21	20,593,069
522113	Belanja Langganan Air	157,800,000	106,008,000	100,186,470	0	100,186,470	94.51	5,821,530
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,000,000	6,000,000	3,177,642	0	3,177,642		2,822,358
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	21,500,000	22,988,000	22,122,600	0	22,122,600	96.24	865,400
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,458,080,000	1,153,180,000	1,075,623,800	0	1,075,623,800	93.27	77,556,200
522141	Belanja Sewa	2,721,782,000	4,465,337,000	4,342,100,632	0	4,342,100,632	97.24	123,236,368
522151	Belanja Jasa Profesi	4,317,768,000	4,697,063,000	4,211,800,000	20,855,000	4,190,945,000	89.67	506,118,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,074,642,000	13,080,557,000	12,018,629,871	0	12,018,629,871	91.88	1,061,927,129
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,638,783,000	799,908,000	653,931,028	23,173,664	630,757,364	81.75	169,150,636
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	25,351,361,000	33,602,209,000	31,523,013,989	44,028,664	31,478,985,325	93.81	2,123,223,675
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,206,060,000	6,219,284,000	5,878,956,575	980,000	5,877,976,575	94.53	341,307,425
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	288,031,000	482,669,000	482,526,048	0	482,526,048	99.97	142,952
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	608,738,000	255,107,000	253,081,890	0	253,081,890	99.21	2,025,110
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	99,450,000	99,450,000	87,036,377	0	87,036,377	87.52	12,413,623
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,619,756,000	3,946,706,000	3,742,554,514	1,991,000	3,740,563,514	94.83	206,142,486
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	935,040,000	486,950,000	486,950,000	0	486,950,000	100	0
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,316,383,000	1,097,122,000	1,063,214,155	0	1,063,214,155	96.91	33,907,845
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	170,000,000	0	0	0	0	)	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	208,430,000	818,716,000	733,742,120	0	733,742,120	89.62	84,973,880
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	15,451,888,000	13,406,004,000	12,728,061,679	2,971,000	12,725,090,679	94.94	680,913,321
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,897,092,000	14,675,601,000	13,912,831,918	1,244,816,686	12,668,015,232	94.8	2,007,585,768
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	970,510,000	769,850,000	729,948,000	2,700,000	727,248,000	94.82	42,602,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,440,331,000	8,709,836,000	8,284,690,000	56,250,000	8,228,440,000	95.12	481,396,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,652,120,000	7,731,217,000	7,534,522,019	296,242,526	7,238,279,493	97.46	492,937,507
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	29,960,053,000	31,886,504,000	30,461,991,937	1,600,009,212	28,861,982,725	95.53	3,024,521,275

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kode Lap : LRA.B.KL.1

Tanggal : 10/05/23 2:20 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 087

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** 

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN ANGGARAN		REALISASI BELANJA			SISA ANGGARAN
KODE	URAIAN	SEMULA	SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	405,636,000	586,401,000	584,632,470	14,091,347	570,541,123	99.7	15,859,877
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	241,248,000	356,627,000	355,321,647	4,611,166	350,710,481	99.63	5,916,519
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	646,884,000	943,028,000	939,954,117	18,702,513	921,251,604	99.67	21,776,396
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	114,286,294,000	122,035,836,000	116,241,750,039	1,680,853,889	114,560,896,150	95.25	7,474,939,850
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		İ					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,087,356,000	20,619,394,000	20,252,401,310	0	20,252,401,310	98.22	366,992,690
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	36,087,356,000	20,619,394,000	20,252,401,310	0	20,252,401,310	98.22	366,992,690
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,429,084,000	3,017,234,000	2,706,409,937	260,000	2,706,149,937	89.7	311,084,063
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,429,084,000	3,017,234,000	2,706,409,937	260,000	2,706,149,937	89.7	311,084,063
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	10,127,625,000	3,421,595,000	3,026,617,650	0	3,026,617,650	88.46	394,977,350
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6,555,138,000	3,696,640,000	3,541,885,680	0	3,541,885,680	95.81	154,754,320
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	16,682,763,000	7,118,235,000	6,568,503,330	0	6,568,503,330	92.28	549,731,670
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	55,199,203,000	30,754,863,000	29,527,314,577	260,000	29,527,054,577	96.01	1,227,808,423
	JUMLAH BELANJA	281,045,829,000	258,301,947,000	249,487,945,871	1,938,805,012	247,549,140,859	96.59	10,752,806,141

### II.2 LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Kode Lap: LRA.P.KL.1

Tanggal : 10/05/23 2:20 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

				REALISASI PENDAPATAN	, , , ,	% REALISASI
KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	PENDAPATAN
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	9,540,000	0	9,540,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	478,201,011	0	478,201,011	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	982,959,527	0	982,959,527	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,470,700,538	0	1,470,700,538	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425281	Pendapatan Akreditasi	307,000,000	307,000,000	0	307,000,000	100
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	481,100,000	525,300,000	0	525,300,000	109.19
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	788,100,000	832,300,000	0	832,300,000	105.61
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	8,842,630,000	9,018,500,000	0	9,018,500,000	101.99
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	8,842,630,000	9,018,500,000	0	9,018,500,000	101.99
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8,775,791,000	7,102,698,117	0	7,102,698,117	80.94
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	8,775,791,000	7,102,698,117	0	7,102,698,117	80.94
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	125,876,900	0	125,876,900	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	125,876,900	0	125,876,900	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,768,000	0	4,768,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	256,059,403	0	256,059,403	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	52,462,998	0	52,462,998	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	5,447,200	0	5,447,200	0

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Kode Lap: LRA.P.KL.1

Tanggal : 10/05/23 2:20 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	LIDAIAN	FOTIMA CL DENIDA DA TANI		REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI
KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	PENDAPATAN
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	318,737,601	0	318,737,601	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	18,406,521,000	18,868,813,156	0	18,868,813,156	102.51
	JUMLAH PENDAPATAN	18,406,521,000	18,868,813,156	0	18,868,813,156	102.51

## II.3 NERACA PERCOBAN KAS

#### NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:16 PM

Halaman: 1

lap neraca percobaan kas kl

			lap_neraca_perco	baan_kas_kl
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	247,549,140,859
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,868,813,156	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	9,540,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	478,201,011
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	982,959,527
3.0	425281	Pendapatan Akreditasi	0	307,000,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	525,300,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	9,018,500,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	7,102,698,117
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	125,876,900
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	4,768,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	256,059,403
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	52,462,998
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	5,447,200
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30,676,247,980	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	434,732	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,443
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,030,757,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	513,927,884	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,824,620,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	244,981,680
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	555,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,124,320,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	389,825,720	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,590,198,360	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,768,707,000	0
3.0	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,530,080,000	0
3.1	511134	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	2,800,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	9,350,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	174,375,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	147,469,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52,947,917,669	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17,804,243,264	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	874,932,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159,916,658	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,425,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	801,220,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,132,692,077	0

#### NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:16 PM

Halaman : 2

			lap_neraca_perco	baan_kas_kl
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	281,118,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	8,623,375,560	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	13,717,500
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,419,750,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,722,080,602	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	99,253,115	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,439,437,041	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	230,710,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	9,055,084,015	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	40,357,931	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	100,186,470	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,177,642	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	22,122,600	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,075,623,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,342,100,632	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,211,800,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	20,855,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	12,018,629,871	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	653,931,028	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	0	23,173,664
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	980,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,878,956,575	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	482,526,048	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	253,081,890	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87,036,377	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,991,000
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,742,554,514	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	486,950,000	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,063,214,155	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	733,742,120	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,244,816,686
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,912,831,918	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,700,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	729,948,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,284,690,000	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	56,250,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,534,522,019	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	296,242,526

#### NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:16 PM

Halaman: 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	584,632,470	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	14,091,347
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	355,321,647	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	4,611,166
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,252,401,310	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	260,000
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,706,409,937	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	3,026,617,650	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	3,541,885,680	0
		JUMLAH	268,356,759,027	268,356,759,027

Keterangan:

FINAL

# II.4 NERACA PERCOBAN AKRUAL

#### NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:15 PM

Halaman : 1

lap neraca percobaan akrual kl

			lap_neraca_perco	baan_akrual_kl
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,897,800,409	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	171,045,750	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	461,289,919	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	2,121,139	0
0.0	131111	Tanah	806,226,080,906	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	281,121,046,237	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	369,395,018,369	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	52,918,334,000	0
0.0	134112	Irigasi	158,137,000	0
0.0	134113	Jaringan	9,805,503,526	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	27,841,315,574	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	446,248,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	217,069,298,823
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	79,782,134,263
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	35,408,079,465
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	31,883,038
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,771,094,616
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	60,483,100
0.0	162151	Software	26,934,084,967	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,162,593,490	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	1,162,593,490
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	20,937,213,857
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	1,244,379,061
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	885,108,241
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	247,549,140,859
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,868,813,156	0
0.0	313211	Transfer Keluar	132,773,350	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	346,802,745
0.0	391111	Ekuitas	0	1,234,482,450,232
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	1,126,830,968
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	226,875,000
0.0	391119	Koreksi Lainnya	10,000,000	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	669,737,445
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	9,540,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	478,201,011
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	982,959,527
3.0	425281	Pendapatan Akreditasi	0	307,000,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	525,300,000

#### NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:15 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl

			lap_neraca_percol	baan_akrual_kl
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	9,018,500,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	7,102,698,117
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	105,907,200
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	4,768,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	256,059,403
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,744,551
3.0	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	1,641,060
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	450,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	30,676,247,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	430,429	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,030,757,910	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	513,927,884	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,579,638,320	O
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5,195,765,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	391,737,720	(
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,590,198,360	C
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,705,883,450	C
3.0	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,527,280,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	165,025,000	C
3.0	512211	Beban Uang Lembur	147,469,000	C
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52,881,424,918	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,820,214,542	C
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	874,932,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159,999,908	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	799,795,000	C
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,132,692,077	C
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	281,118,000	C
3.0	521211	Beban Bahan	8,623,375,560	(
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,406,032,500	(
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,723,671,862	(
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	93,967,915	C
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	9,244,622,825	(
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	40,469,944	C
3.0	522113	Beban Langganan Air	103,540,540	C
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,177,642	C
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	22,122,600	C
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,075,623,800	C
3.0	522141	Beban Sewa	4,342,100,632	0

#### NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

#### **TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (087) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM Tgl Cetak : 10/05/23 2:15 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl

	lap_neraca_percoba					
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT		
1	2	3	4	5		
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,190,945,000	C		
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	12,018,329,871	(		
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	630,757,364	(		
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,268,217,847	(		
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	253,081,890	(		
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87,036,377	(		
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,618,544,214	(		
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,063,214,155	(		
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	733,742,120	(		
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	12,665,237,232	(		
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	727,248,000	(		
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,228,440,000	(		
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,238,279,493	(		
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	570,541,123	(		
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	350,710,481	(		
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20,734,126,982	(		
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18,205,562,502	(		
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,502,050,907			
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,796,916	(		
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	200,271,455	(		
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	5,970,983,535	(		
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	34,847,461	(		
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,504,515,691	(		
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	932,328,633	(		
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	9,644,450	(		
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,515,000	(		
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,439,499	(		
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	450,000	(		
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	27,236		
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20,297,200	(		
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	2,074,247,000	(		
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	49,800	(		
		JUMLAH	1,865,548,901,308	1,865,548,901,308		

Keterangan:

FINAL

### II.5 LRA BELANJA DALAM RANGKA COVID

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19 TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kode Lap : LRA.B.KL.1

Tanggal : 10/05/23 2:19 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 087 **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** 

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI BELANJA	% REALISASI	SISA ANGGARAN	
	UNAIAN	SEMULA	SETELAH REVISI	BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA		BELANJA NETTO	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	158,600,000	281,515,000	281,118,000	0	281,118,000	99.86	397,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	158,600,000	281,515,000	281,118,000	0	281,118,000	99.86	397,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	144,274,000	237,392,000	230,710,000	0	230,710,000	97.19	6,682,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	144,274,000	237,392,000	230,710,000	0	230,710,000	97.19	6,682,000
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,638,783,000	799,908,000	653,931,028	23,173,664	630,757,364	81.75	169,150,636
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,638,783,000	799,908,000	653,931,028	23,173,664	630,757,364	81.75	169,150,636
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,941,657,000	1,318,815,000	1,165,759,028	23,173,664	1,142,585,364	88.39	176,229,636
	JUMLAH BELANJA	1,941,657,000	1,318,815,000	1,165,759,028	23,173,664	1,142,585,364	88.39	176,229,636

### III BAR INTERNAL BMN TINGKAT K/L



### ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

#### Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara

#### Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

#### Tahun Anggaran 2022

(audited)

Nomor: BA.10/BU/IV/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. Ampera Raya No.7 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: Furqon Imamsyah Ahda

NIP

: 19780204 200501 1 001

Jabatan

: Kepala Bagian Perlengkapan, Tata Usaha, Kearsipan dan Protokol

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Arsip

Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama:

II. Nama

: Ali Sugeng

NIP

: 19700830 199803 1 001

Jabatan

: Ketua Tim Pengelola Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia (087) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Keuangan Pengguna (LKP) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode *audited* Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut:

#### I. Hasil Rekonsiliasi Data:

		Nilai BMN Periode Tahun 2022							
No.	Akun Neraca	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir					
I.	POSISI BMN DI NERACA	1.236.423.192.610	(18.105.353.976)	1.218.317.838.634					
A.	ASET LANCAR	2.346.583.401	185.673.816	2.532.257.217					
_1	Persediaan	2.346.583.401	185.673.816	2.532.257,217					
В.	ASET TETAP	1.227.936.848.039	(16.195,087,732)	1.209.788.710.307					
1	Tanah	805.561.648.718	664.432.188	806.226.080.906					
2	Peralatan dan Mesin	265.069.905.094	16.051.141.143	281.121.046.237					
3	Gedung dan Bangunan	367.489.805.847	1.905.212.522	369.395.018.369					
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.881.974.526		62.881.974.526					
5	Aset Tetap Lainnya	26.872.634,444	968,681,130	27.841.315.574					
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.399.298.000	_	446.248.000					
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	(302.338.418.590)	(35.784.554.715)	(338.122.973.305,)					

c.	ASET LAINNYA	6.139,761.170	(747.890.060)	5.996.871.110
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud	22.227.611.637	4.101.473.330	26.934.084.967
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	_		_
4	Aset Lain-lain 2)	7.174.207.984	(6.011.614.494)	1.162.593.490
5	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(23.262.058.451)	1.162.251.104	(22.099.807.347,)
П.	BMN NON NERACA	226,519,502	37.876.119	264.395.621
A.	EKSTRAKOMPTABEL	226,519,502	37.876.119	264,395,621
1	BMN Ekstrakomptabel	580.242.307	106.172.141	686.414.448
2	Akum. Peny. Ekstrakomptabel	(353.722.805)	(68.296.022)	(422.018.827)
B.	BPYBDS			
C.	BARANG HILANG			
D.	BARANG RUSAK BERAT			
E.	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
	TOTAL (I + II)	1.236.649.712.112	(18.067.477.857)	1.218.582.234.255

#### Rincian terlampir.

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP dan LKP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKP periode *audited* Tahun Anggaran 2022, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 April 2023

Kepala Bagian PTUKP

Furqon Imams vah Ahda, S.Sos, M.A.P

NIP 19780204 200501 1 001

Ketua Tim Pengelola Keuangan

Ali Sugeng, SE.M.Si NIP 19700830 199803 1 001

Mengetahui Kepala BiroUmum

Sarib Hidavat, S.Kom, M.Si NIP 19650403 198603 1 001

## IV BAR DATA KHAZANAH ANRI



### ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

#### BERITA ACARA DATA KHAZANAH ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KN.02.00/ 1/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2023, bertempat di Arsip Nasional RI Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama

: Drs. Agus Santoso, M. Hum

NIP

: 196607231994031001

Jabatan

: Direktur Preservasi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Preservasi Arsip pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

ii.

Nama

: Sarip Hidayat, S.Kom, M.Si

NIP

: 196504031986031001

Jabatan

: Kepala Biro Umum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Biro Umum, Sekretariat Utama pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan berita acara serah terima arsip hasil kinerja Direktorat Preservasi ke Biro Umum Sekretariat Utama setelah melalui verifikasi oleh Koordinator Kelompok Fungsi Penyimpanan Arsip Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip:

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH KHASANAH ARSIP TAHUN 2022						
NO	UKAIAN	SATUAN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR				
1	Kertas	Meter	30.327,30	4,90	30.332,20				
2	Poster	Lembar	384,00	0,00	384,00				
3	Kartografi/Peta	Lembar	131.802,00	0,00	131.802,00				
4	Foto	Lembar	3.477.270,00	0,00	3.477.270,00				
5	Film	Reel	59.055,00	0,00	59.055,00				
6	Mikrofilm	Roll	14.502,00	0,00	14.502,00				
7	Mikrofische	Fische	14.373,00	0,00	14.373,00				
8	Rekaman Suara	Kaset	54.735,00	0,00	54.735,00				
	Reel to Reel								
9	Sound Reel		946,00	0,00	946,00				
10	Video Kaset		27.480,00	0,00	27.480,00				
11	Optical Disc	Keping	17.463,00	0,00	17.463,00				
12	Piringan Hitam Keping		101,00	0,00	101,00				
13	Flashdisk	Buah	13,00	2,00	15,00				
	Arsip Elektronik/								
14	Arsip Statis Digital	Terabyte	390,00	242,00	632,00				

Acip

I. Hal-hal penting lainnya mengenai data khasanah arsip terkait penyusunan LBP/KP dan LKKL disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKKL periode Triwulan IV Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Direktur Preservasi

Drs. Agus Santoso, M. Hum NIP. 196607231994031001

k∤epala Biro Umum

Sařib Hidayat, S.Kom, M.Si NIP. 196504031986031001

Mengetahui, Deputi Bidang Konservasi Arsip

Dr. Kandar/MAP NIP. 196602091993031001

### BERITA ACARA DATA KHAZANAH ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KN.03.00/ 17 /2023

Pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, bertempat di Arsip Nasional RI Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama

: Muhamad Ihwan, S.Sos, M.Si

NIP

: 19710817 199803 1 001

Jabatan

: Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

ii. Nama

: Sarip Hidayat, S.Kom, M.Si

NIP

: 19650403 198603 1 001

Jabatan

: Kepala Biro Umum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Biro Umum Sekretariat Utama pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan berita acara serah terima arsip hasil kinerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh setelah melalui verifikasi oleh Koordinator Kelompok Fungsi Penyimpanan Arsip Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

#### Hasil Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip:

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH KHASANAH ARSIP TAHUN 2022						
		SALDO AWAL		MUTASI	SALDO AKHIR				
1	Arsip Kertas	Meter Linier	8.916,6	2,6	8.919,2				
2	Arsip Kearsitekturan	Meter Linier	495	-	495				
3	Arsip Peta	Lembar	5.536		5.536				

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH KHASANAH ARSIP TAHUN 2022						
		071107111	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR				
4	Arsip	1/			1230				
	CD/DVD/VCD	Keping	1.229	1					
5	Arsip Kaset	Kaset	52		52				
6	Arsip Foto	Lembar	1.979	ep	1.979				
7	Arsip Disket	Keping	43	-	43				

- II. Terdapat penambahan jumlah khasanah arsip dari kegiatan akuisisi sebanyak 1,6 ML dari Komisi Independen Pemilihan Aceh, 1 ML dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh; Serta 1 Keping CD Hasil Wawancara Sejarah Lisan.
- III. Hal-hal penting lainnya mengenai data khasanah arsip terkait penyusunan LBP/KP dan LKKL disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKKL periode tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami

Muhamad Inwan, S.Sos, M.Si NIP 19710817 199803 1 001 Kepala Biro Umum

Sarip Hidayat, S.Kom, M.Si NIP

19650403 198603 1 001

Mengetahui,

Deputi Bidang Konservasi Arsip

Dr. Kandar, M.AP

NIP 19660209 199303 1 001

# VI DAFTAR TAGIHAN OVERBOOKING PT. TASPEN (PERSERO)

### Daftar Piutang Negara Kepada Penerima Pensiun Yang Timbul Semasa Pegawai Aktif ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA **Bulan November 2022**

NTPN 930C455DEN9N3RBN **JUMLAH SETORAN 447.200** 

NO	NOTAS	NIP	NAMA PENSIUNAN	NAMA PENERIMA PENSIUN	KD SATKER	KD AKUN	NAMA SATKER	KAB/KOTA/PROV	JML PIUTANG AWAL	ANGSURAN BULAN INI	JML DIBAYARKAN SAAT KLIM	JML ANGSURAN S.D SAAT INI (POT DAPEM)	SISA PIUTANG
1	36000052800	196910121993032001	NURHAWARY	NURHAWARY	450448	425931	ARSIP NASIONAL	DKI JAKARTA	12.947.200	447.200	0	12.947.200	0
										447.200			

Catatan:

Sisa Piutang = Jumlah Piutang Awal - Jml Dibayarkan Saat Klim- Jml Angsuran s.d Saat Ini (Pot Dapem)

Jakarta, 15 November 2022

Pension Expenditure Management & Responsibillity Dept Head

ZUL AKBAR YULIANTO NIK. 3142



#### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220107961926

 Tanggal Billing
 : 07-01-2022 16:59:32

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 14-01-2022 16:59:32

 Tanggal Bayar
 : 10-01-2022 12:12:34

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : Arsip Nasional

Satuan Kerja : ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220110438122

NTPN : F71A761QUGUD6DI6

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI JANUARI 2022





#### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan :

 Kode Billing
 : 820220209006451

 Tanggal Billing
 : 09-02-2022 15:45:52

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 16-02-2022 15:45:52

 Tanggal Bayar
 : 10-02-2022 14:48:16

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220210433016

NTPN : B5A301JNFC5FH1RJ

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI FEBRUARI 2022





#### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan :

 Kode Billing
 : 820220906747362

 Tanggal Billing
 : 06-09-2022 14:59:41

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 13-09-2022 14:59:41

 Tanggal Bayar
 : 08-09-2022 13:36:44

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220908298443

NTPN : 019C52G4V7CLBDF2

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN SEPTEMBER 2022





#### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220804238868

 Tanggal Billing
 : 04-08-2022 10:09:50

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 11-08-2022 10:09:50

 Tanggal Bayar
 : 10-08-2022 11:06:03

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220810005275

NTPN : D8F3D7QLU6NU13GK

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN AGUSTUS 2022





#### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220707272218

 Tanggal Billing
 : 07-07-2022 10:34:06

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 14-07-2022 10:34:06

 Tanggal Bayar
 : 08-07-2022 15:40:50

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220708562500

NTPN : E88667QLU6L1HTGQ

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN JULI 2022





#### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220607993871

 Tanggal Billing
 : 07-06-2022 13:22:44

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 14-06-2022 13:22:44

 Tanggal Bayar
 : 08-06-2022 12:13:30

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

 Status
 : Sudah Dibayar

 NTB
 : 220608764895

NTPN : 8D9331JNFCHC160F

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN JUNI 2022





### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220512503846

 Tanggal Billing
 : 12-05-2022 19:52:43

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 19-05-2022 19:52:43

 Tanggal Bayar
 : 13-05-2022 13:00:49

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220513886598

NTPN : E31BA61QUHAF0216

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN MEI 2022





### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220407538655

 Tanggal Billing
 : 07-04-2022 16:09:01

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 14-04-2022 16:09:01

 Tanggal Bayar
 : 11-04-2022 11:36:29

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : **087** - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220411740789

NTPN : 2FE8855DEMKUFOUV

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN APRIL 2022





### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820220308440239

 Tanggal Billing
 : 08-03-2022 14:24:06

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 15-03-2022 14:24:06

 Tanggal Bayar
 : 10-03-2022 12:51:19

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 220310396234

NTPN : 464D38N3E0RHJH5F

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN MARET 2022





### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan :

 Kode Billing
 : 820221006122996

 Tanggal Billing
 : 06-10-2022 11:34:03

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 13-10-2022 11:34:03

 Tanggal Bayar
 : 10-10-2022 14:49:41

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 500.000 (IDR)

Terbilang : Lima Ratus Ribu (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 221010077036

NTPN : 164AC61QUHP5O3VK

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 500.000 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN OKTOBER 2022





### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan:

 Kode Billing
 : 820221104450935

 Tanggal Billing
 : 04-11-2022 15:26:39

 Tanggal Kedaluwarsa
 : 11-11-2022 15:26:39

 Tanggal Bayar
 : 09-11-2022 11:55:33

Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA

Channel Bayar : Overbooking

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT TASPEN PERSERO

Kementerian/Lembaga : **087** - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Eselon I : **01** - Arsip Nasional

Satuan Kerja : **450448** - ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Total Disetor : 447.200 (IDR)

Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus (IDR)

Status : Sudah Dibayar NTB : 221109031067

NTPN : 930C455DEN9N3RBN

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Setoran : Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Kode Akun : 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Jumlah Setoran : 447.200 (IDR)

Keterangan : SETORAN KAS NEGARA NON KAI BULAN NOVEMBER 2022

### VII SK PENGELOLA APBN



### NOMOR 416 TAHUN 2021

### **TENTANG**

### PELAKSANA/PENGELOLA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia agar efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta Tahun Anggaran 2022;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta Tahun Anggaran 2022;

### Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

- Presiden Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 322);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 15. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan;
- 16. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Dalam Jabatan Pengawas Ke Fungsional Mekanisme Penyetaraan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Mengangkat Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.

KEDUA

 Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana di maksud pada diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Bendahara Pengeluaran (BP) ;
- e. Bendahara Penerimaan (BPn);
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- g. Petugas Penerimaan PNBP;
- h. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- i. Staf Pengelola Keuangan;

KETIGA

: Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



**IMAM GUNARTO** 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
- 3. Inspektur Arsip Nasional R.I;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

### PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rini Agustiani, SH, MAP NIP. 19660818 199203 2 001	IV	Sekretaris Utama	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Sarip Hidayat, S.Kom,M.Si NIP. 19650403 198603 1 001	IV	Kepala Biro Umum	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPPSPM)
3	M. Fahrim NIP. 19860703 200501 1 001	III	Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Utama
4	Hendra Lastowo, SE NIP.19800715 200501 1 001	III	Analis Pengelola Keuangan APBN Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan
5	Roby Syafurjaya NIP. 19791219 200201 1 001	IV	Analis Pengelola Keuangan APBN Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Konservasi Arsip
6	Lili Hudiyanto, ST NIP.19760411 20031 1 001	III	Analis Pengelola Keuangan APBN Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
7.	Ali Sugeng, SE, MSi NIP. 1970 0830 199803 1 001	III	Analis Pengelola Keuangan APBN Madya	Atasan Langsung Bendahara Penerimaan (BPn)
8.	Kurniawan Widjojo, SE NIP.19781203 200801 1 009	III	Analis Pengelola Keuangan APBN Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Pegawai
9.	Shita Rouli Hadyani, A.Md	П	Pranata	Bendahara Penerimaan

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	NIP.19870927 201503 2 002		Keuangan APBN Terampil	(BPn)
10	Gun Gun Mugia Raspati, SE NIP.19820502 201001 1 037	III	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Bendahara Pengeluaran (BP)
11	Lingga Dermawan, A.Md NIP.19841231 200801 1 006	III	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Sekretariat Utama
12	Wasito, S.Sos NIP. 19720415 199303 1 001	III	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan
13	Ayunda Rizqiana, SE NIP. 19880530 201012 2 005	III	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kedeputian Bidang Konservasi Arsip
14	Ahmad Muslih, A.Md NIP. 19811209 200801 1 007	III	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
15	Oki Saputra NIP.199810222019121002	II	Verifikator	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Utama
16	Khalwa Khanania NIP. 200010242019122003	II	Pengadministras i Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan
17	Desna Aviola NIP. 199812262019122001	II	Pengadministras i Keuangan	Staf Pengelola Keuangan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip
18	Muhamad Rizal Taufan NIP. 199612262019121001	II	Verifikator	Staf Pengelola Keuangan Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Kearsipan
19	Lulu Aulia NIP. 199909252019122001	II	Pengadministras i Keuangan	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
20	Suradi, ST NIP.19801214 201012 1 001	III	Analis Pengelola Barang dan Jasa	Petugas Penerimaan PNBP Pada Biro Umum
21	Zullaika Astuti, S.AP NIP. 19840101 200912 2 002	III	Arsiparis Penyelia	Petugas Penerimaan PNBP Pada Layanan Arsip
22	Nia Pertiwi, S.Hum	III	Kepala	Petugas Penerimaan

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	NIP. 19841119 200801 2 001		Subbagian Tata Usaha Pusat Akreditasi Kearsipan	PNBP Pada Pusat Akreditasi Kearsipan
23	Widya Wahyuni Setianingrum, ST NIP. 19800320 200112 2 001	III	Arsiparis Muda	Petugas Penerimaan PNBP Pada Sertifikasi SDM Kearsipan

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



**IMAM GUNARTO** 



### KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2022

#### TENTANG

# TIM PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia agar efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Balai Arsip Statis dan Tsunami Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia Balai Arsip Statis dan Tsunami Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 322);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 165/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.05/2013 Nomor tentang Kedudukan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 15. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 16. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan;
- 17. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan;
- 18. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 415 Tahun 2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;
- 19. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2021 tentang Pemberian Kuasa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Kepada Sekretaris Utama Dalam Penandatangan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Tim/Panitia yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Biaya Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebagaimana di maksud pada diktum KESATU terdiri atas:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - d. Bendahara Pengeluaran (BP);
  - e. Bendahara Penerimaan (BPn);
  - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
  - g. Petugas Penerimaan PNBP;
  - h. Staf Pengelola Keuangan;

KETIGA

: Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Arsip Statis dan Tsunami Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** 

: Kepada Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia diberikan honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2022

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS UTAMA,



RINI AGUSTIANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Arsip Nasional R.I;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
- 4. Inspektur Arsip Nasional R.I;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2022
TANGGAL 2 FEBRUARI 2022

## TIM PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI TAHUN ANGGARAN 2022

N	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN	HONOR
О		•		DALAM TIM	
1.	Muhamad	IV	Kepala Balai	Kuasa Pengguna	Rp2.280.000,-
	Ihwan, S SOS,		Arsip Statis	Anggaran (KPA)	/orang/bulan
	M.Si		dan		
			Tsunami		
2.	Renny Setyo	III	Kepala	Pejabat Penguji	Rp880.000,-
	Lestari, S.Sos		Subbagian	dan Penanda	/orang/bulan
			Tata Usaha	Tangan SPM	
			dan Umum	(PPPSPM)	
			Balai Arsip		
			Statis dan		
			Tsunami		
3.	Junaidin, SE	III	Arsiparis	Pejabat	Rp2.210.000,-
			Muda	Pembuat	/orang/bulan
				Komitmen	
				(PPK)/ Atasan	
				Langsung	
				Bendahara	
				Penerimaan	
				(BPn)	
4.	Sri Wahyuni,	III	Pranata	Bendahara	Rp308.000,-
	SE		Keuangan	Pengeluaran	/orang/bulan
			APBN Mahir	(BP)	
5.	Irfan Adi	II	Arsiparis	Staf Pengelola	Rp570.000,-/

Wijayanto,	Terampil	Keuangan	orang/bulan	
A.Md.		Bendahara		
		Penerimaan		
		(BPn)		



### KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS

### KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022

### TENTANG

### TIM PELAKSANA/PENGELOLA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN BOGOR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana/Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada

Menimbang

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor Arsip
- Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;

: a. bahwa dengan adanya mutasi di lingkungan Arsip

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor Arsip

Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 4 (empat) kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 322);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

- 13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 14. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2021 tentang Pemberian Kuasa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Kepada Sekretaris Utama Dalam Penandatangan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Tim/Panitia yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Biaya Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022:

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL **REPUBLIK** INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2022 TENTANG PELAKSANA/PENGELOLA TAHUN TIM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN BOGOR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 diubah pada susunan keanggotaan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022

a.n KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS UTAMA,



### RINI AGUSTIANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
- 2. Kepala Arsip Nasional R.I.;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
- 4. Inspektur Arsip Nasional R.I;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2022
TANGGAL 10 MARET 2022

# SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT) KEARSIPAN BOGOR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Widarno, SH, M.H NIP. 19640417 199403 1 001	IV	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 2.590.000,- Orang/Bulan
2.	Achmad Sabiqun Nahar, S.AP NIP. 19850212 200912 1 002	III	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPSPM)/Atasan Langsung Bendahara Penerimaan (BPn)	Rp. 990.000,- Orang/Bulan
3.	Noor Azizah, SE NIP. 19830320 200912 2 002	III	Analis Pengelola Keuangan APBN Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 2.520.000,- Orang/Bulan
4.	Henny Soraya, A Md NIP. 19861107 200912 2 003	III	Arsiparis Mahir	Bendahara Pengeluaran (BP)	Rp. 860.000,- Orang/Bulan
5.	Juwita Fitrasari, M.Sc NIP. 19890527 201902 2 003	III	Widyaiswara Pertama	Bendahara Penerimaan (BPn)	Rp. 730.000,- Orang/Bulan
6.	Sifa Rakhmawati, A.P.Kb.N. NIP. 20000505 201912 2 001	II	Pengadministrasi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 570.000,- Orang/Bulan



### KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415 TAHUN 2021 TENTANG

### KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan dan penatausahaan barang barang milik negara pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjwabnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden dengan Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Fungsi, Kewenangan, Kedudukan, Tugas, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 18. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Mengangkat pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Melimpahkan wewenang kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk:
  - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di www.anri.go.id;
  - c. mengusulkan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;
  - d. mengusulkan Pejabat Pengadaan;
  - e. mengusulkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - g. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. menyelesaikan perselisihan antar PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA

- : Melimpahkan wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang untuk:
  - a. menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Arsip Nasional Republik Indonesia:

- b. melakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah;
- c. menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Penghapusan; dan
- d. melaksanakan wewenang Kuasa Pengguna Barang dan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



**IMAM GUNARTO** 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
- 3. Inspektur Arsip Nasional R.I;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

**LAMPIRAN** 

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 415 TAHUN 2021

TANGGAL 31 DESEMBER 2021

## NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rini Agustiani, SH, MAP	IV	Sekretaris Utama	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa Pengguna Barang (KPB) ANRI Jakarta
2	Dra. Desi Pratiwi, MIMS	IV	Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
3	Drs. Bambang Surowo, M.Hum	IV	Kepala Pusat Jasa Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pusat Jasa Kearsipan
4	Muhammad Ihwan, S.Sos, MSi	IV	Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang (KPB) Balai Arsip Statis dan Tsunami

### VIII TELAAH LAPORAN KEUANGAN

### KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) TAHUNAN TA 2022 - PERIODE 14 (*AUDITED*)

Kode dan Nama K/L : (087) Arsip Nasional Republik Indonesia

	KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE			Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual			Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun			Ada
	KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MON	NSAKTI		
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI			Sama
	ran Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang ti ah dan penyebabnya.	idak sama,	uraikan da	alam Lampiran
	KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTA	NSI		
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	$\checkmark$		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	$\checkmark$		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	$\checkmark$		Sama
	PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	✓		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)			Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		V	
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			Tidak
_			$\checkmark$	Tidak Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		<ul><li>✓</li></ul>	
6				Tidak
	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		<u> </u>	Tidak Tidak
6	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			Tidak Tidak Tidak
6	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)  Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan  Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan  Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan  Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	V	\texts{\sqrt{2}}	Tidak Tidak Tidak Tidak
6 7 8	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)  Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan  Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan  Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan  Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,	<b>V</b>	\texts{\sqrt{2}}	Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
6 7 8 9	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan	V	\texts{\texts}	Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
6 7 8 9 10 11 12	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	<b>V</b>		Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
6 7 8 9 10 11 12	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	✓		Tidak
6 7 8 9 10 11 12	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan m hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			Tidak
6 7 8 9 10 11 12	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan m hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah  Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	✓	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Tidak
6 7 8 9 10 11 12 Dala	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan m hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah  Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi) Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Tidak
6 7 8 9 10 11 12 Dala	sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan m hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah  Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Tidak

	a. Pagu/DIPA		<b>V</b>	Tidak
	b. Estimasi PNBP		<u>√</u>	Tidak
	c. Belanja		<u> </u>	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		<u> </u>	Tidak
	e. Pendapatan		<b>V</b>	Tidak
	f. Pengembangan Belanja			Tidak
	g. Kas BLU		<b>V</b>	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		$\checkmark$	Tidak
	i. Kas Hibah		$\checkmark$	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRU	JAL		
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	<b>V</b>		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	☑		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)			Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)			Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	<b>V</b>		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo	<b>V</b>		Ya
7	(K) pada kasus tertentu)	<u>_</u>		
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	Į.		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		<u> </u>	Tidak
3	1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN) Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		<b>V</b>	Tidak
4	(prepaid) Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		<u> </u>	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		<u>v</u>	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		<b>V</b>	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		<b>V</b>	Tidak
			<b>V</b>	Tidak
8	ITerdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpaiakan/ Hibah)			
9	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah) Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			
9	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)  Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN  Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		<ul><li>✓</li></ul>	Tidak Tidak

	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
	7,7			
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		<b>I</b>	Ya
3	atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)?  Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
5	Hibah TAYL yang belum disahkan?  Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil		V	Ya
3	Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)  Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat		<u> </u>	Ya
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)  Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-		<b>I</b>	Ada/Tidak Ya
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		$\square$	Ada/Tidak
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	<b>V</b>		Ada/Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		<b></b>	Tidak
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		<b>V</b>	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		$\square$	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		<b>V</b>	Ada/Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		<b>I</b>	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		<b>V</b>	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak

3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	<b>V</b>		Ya
	GEP URLUK MENGHAPUS 425913 OFNE AKTUAL!			
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	$\checkmark$		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun salat menjurnal?	<b>V</b>		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	<b>V</b>		Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	<b>V</b>		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	$\checkmark$		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	$\checkmark$		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	<b>V</b>		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	$\checkmark$		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		<b>V</b>	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		<b>V</b>	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban		<b>V</b>	Tidak
3	subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		<b>V</b>	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	$\checkmark$		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	<b>V</b>		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	$\checkmark$		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Pengecekan Pos-pos LPE "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	$\checkmark$	Tidak	Ya
2	Pengecekan Pos-pos LPE "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			Ya Ya/Tidak
3	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek  apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP	$\checkmark$	✓	Ya Ya/Tidak Tidak
2	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek	$\checkmark$		Ya Ya/Tidak
3 4	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	✓	Ya Ya/Tidak Tidak
3	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	<u> </u>	<b>V</b>	Ya Ya/Tidak Tidak Tidak
3 4	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?  Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal	Ya	<b>V</b>	Ya Ya/Tidak Tidak Tidak Seharusnya
3 4	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya	<b>V</b>	Ya Ya/Tidak Tidak Tidak Seharusnya
2 3 4	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?  Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	Ya ✓	✓ ✓ ✓ Tidak	Ya Ya/Tidak Tidak Tidak  Seharusnya Ya  Ya
2 3 4	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?  Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)  PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PEND	Ya ✓	✓ ✓ Tidak	Ya Ya/Tidak Tidak Tidak Seharusnya Ya Ya
2 3 4	Pengecekan Pos-pos LPE  "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya  Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP  Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?  Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal  Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	Ya ✓	✓ ✓ ✓ Tidak	Ya Ya/Tidak Tidak Tidak  Seharusnya Ya  Ya

2	T			<b>-</b>
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		<b>V</b>	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	$\checkmark$		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah			
	belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	$\checkmark$		Ya
	(Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	$\checkmark$		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	$\checkmark$		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	$\overline{\checkmark}$		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		<b>V</b>	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		<b>V</b>	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	<b>V</b>		Ya/Tidak
<u> </u>	- Beban Persediaan (di LO)	<u> </u>		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	<u> </u>		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	<u> </u>		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	<u> </u>		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	<u> </u>		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	<u> </u>		Ya
	ona rida, apakari filiar totalifya sama dengan i endapatari i depasari risot fion Landar di Eo:			- ια
	Donas also Delan Discoulter V. Marrisolat ( Dalan Donas	Vo	Tidak	Cohoruanya
1	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos  Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	Ya ☑	Tidak	Seharusnya
'		V		Ya/Tidak Ya
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	-
2	Apakah ada Beban Bansos ?		<u> </u>	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		<b>V</b>	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	ı a	✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	<b>V</b>		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		<b>V</b>	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		<u> </u>	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	<b>V</b>		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	<u> </u>		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	<u>√</u>		Ya/Tidak
<del>ٽ</del>	7 da akan Belanja Tang Masin Haras Bibayar (2121704) pada Nerada Ferobadan Mikadi			Ta/Tluak
	TELAAH LK BLU			
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			
	dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213			Ya
2	pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?  Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
3				·
3 4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			٧a
				Ya Ya

6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		Ya

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

- 1 Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan pada satuan kerja Pusdiklat Kearsipan (418934) sebesar Rp850.000 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111). Aplikasi SAKTI mengidentifikasi item peralatan dan mesin senilai Rp850.000 sebagai Peralatan dan Mesin (Ekstrakomtabel) dan mengklasifikasikan secara otomatis (by system) ke dalam akun 595112 (Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin).
- 2 Timbulnya akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Pengin putan awal	2	25.000	50.000
Penginputan seharusnya	20	2.500	50.000

Upaya koreksi yang dilakukan operator persediaan dalam rangka normalisasi:							
Persediaan awal		2	25.000	50.000			
Koreksi Kuantitas	(491511)	18	25.000	450.000			
Koreksi Nilai Kurang -1	(593311)	l		(45.000)			
Koreksi Nilai Kurang -2	(593311)			(405.000)			
Persediaan akhir		20	2.500	50.000			

Terdapat akun Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat namun tidak terdapat realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas. Hal ini disebabkan karena belum adanya tagging akun belanja 526XXX pada satker ANRI Jakarta selama tahun anggaran 2022 atas jenis Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat.

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

Jakarta, 9 Mei 2023 Penelaah,

( Ali Sugeng )

NIP 197008301998031001

( Oki Saputra )

NIP 199810222019121002

## IX NOTA KESEPAKATAN FINAL

# NOTA KESEPAKATAN FINAL ANGKA ASERSI FINAL LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA\_(BA 087) TAHUN 2022 YANG DIMASUKKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022 (AUDITED)

Nomor: NKF-013/087/PB.6/2023

Pada hari ini, <u>Selasa</u> tanggal <u>11 April 2023</u>, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan <u>Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online</u> untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam <u>Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia</u> (BA <u>087</u>) Tahun 2022, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Final ini, sebagai bentuk asersi final atas <u>Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia</u> (BA <u>087</u>) Tahun 2022 dan untuk dikonsolidasikan dalam <u>LKPP Tahun 2022</u> (*Audited*).

Nota Kesepakatan Final ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Neg). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka kami menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) paling lambat tanggal 10 Mei 2023.

### PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kepala Bagian Perlengkapan, Tata Usaha, Kearsipan, dan Protokol Arsip Nasional Republik Indonesia

Furqon Imamsyah Ahda

Kementerian Keuangan RI, Ditjen Kekayaan Negara Selaku Tim Penyusun LBMN

Bambang Sulistyono

MENGETAHUI Tim Auditor BPK

Agustina Widyasari

Kementerian Keuangan RI, Ditjen Perbendaharaan Selaku Tim Penyusun LKPP

Nun Alagui Haris

ENDERAL PERBEN

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Bagian Anggaran

: 087

Uralan Bagian Anggaran

: Arsip Nasional Republik Indonesia

URAIAN	REALISASI	KOR	EKSI	REALISASI	
OTTAIN	UNAUDITED	DEBIT	KREDIT	AUDITED	
1	2	3	4	5	
Pendapatan Perpajakan					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	18.868.813.156			18.868.813.156	
Pendapatan Sumber Daya Alam					
Pendapatan dari KND					
Pendapatan PNBP Lainnya	18.868.813.156			18.868.813.156	
Pendapatan BLU					
Pendapatan Hibah					
TOTAL PENDAPATAN	18.868.813.156			18.868.813.156	
Belanja Pegawai	103.461.190.132			103.461.190.132	
Belanja Barang	114.560.896.150			114.560.896.150	
Belanja Modal	29.527.054.577			29.527.054.577	
Belanja Pembayaran Bunga Utang					
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	-		To the second		
Belanja Bantuan Sosial					
Belanja Belanja Lain-lain					
TOTAL BELANJA	247.549.140.859		:	247.549.140.859	
Dana Perimbangan					
Dana Insentif Daerah					
Dana DIY			and the same of th		
Dana Otonomi Khusus			www.		
Dana Desa			4		
TOTAL TKDD					
Pembiayaan Dalam Negeri					
Pembiayaan Luar Negeri					
TOTAL PEMBIAYAAN					

Kementerian/Lembaga

Furqon Imamsyah Ahda

Kementerian Keuangan

Nur Abdul Haris

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

ENDERAL PERSE

Badan Pemeriksa Keuangan

Agustina Widyasari

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : NKF-013/087/PB.6/2023 Tanggal : 11 April 2023

## LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

K/L: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BA: 087

	· IMAIDITED	KOREKSI BPK DA	N MANDIRI	ACTOR CINIAL
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	ASERSI FINAL
KEGIATAN OPERASIONAL				*** * <del>********************************</del>
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	- [	-	Ī	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-		ļ	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	- 1			
Pendapatan Cukai	_			
Pendapatan Pajak Lainnya	-			
Pendapatan Bea Masuk	- 1		· [	
Pendapatan Bea Keluar		1		
Jumlah Pendapatan Perpajakan	_]	_	_ 1	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Sumber Daya Alam	-	ļ	1	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	_	1.	İ	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18.051,904.844		1	18.051.904.8
Pendapatan Badan Layanan Umum		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,051,904,844	_ 1	_	18.051,904,8
PENDAPATAN HIBAH			1	
Pendapatan Hibah	_	į	1	
Jumlah Pendapatan Hibah		_1		
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	18.051.904.844			18.051.904.8
BEBAN OPERASIONAL	15155 115 115 11	*	-	10.001.004.0
Beban Pegawai	103,405,785,971			103.405.785.9
Beban Persediaan	5,509,282,070	824,000	1.635.880	5.508.470.1
Beban Barang dan Jasa	66,607,786,782	921.000		66,607,786,7
Beban Pemeliharaan	12.223.990.764		267.825.528	11.956.165.2
Beban Perjalanan Dinas	29.780.456.329		50,.525.525	29.780.456.3
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	9.151.285	637.665	144,500	9.644.4
Beban Bunga		30, 355	117.000	0.077.
Beban Subsidi	_			
Beban Hibah			-	
Beban Bantuan Sosial			1	
Beban Transfer	_			

Beban Lain-lain	1 -1	1		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.425.391.587	250.978.997	22.730.826	48.653.639.758
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	27.236			27.236
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	265.961.817.552	252,440,662	292.336.734	265,921,921,480
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 247.909.912.708 -	252.440.662 -	292.336.734 -	247.870.016.636
KEGIATAN NON OPERASIONAL				-
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	478,201,011	15.584.400	15.584.400	478.201.011
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.985.639.500	5.382.901.258	5.294.293.758	2.074.247.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1.507.438.489	5.367.316.858	5.278.709.358 -	1.596.045.989
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0.000	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Beban Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Keglatan Non Operasional Lainnya	264.663.014			264.663.014
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	499.800			499.800
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	264.163.214			264,163,214
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.243.275.275	5.367.316.858 -	5.278,709,358 -	1,331,882,775
POS LUAR BIASA		0.0071070000	0.270.700.000	1.001.002.770
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS/(DEFISIT) LO	- 249.153.187.983 -	5.619.757.520 -	5.571.046.092	249,201,899,411

Jakarta, April 2023 Kementerian/Lembaga

Furqon Imamsyah Ahda

Ditjen Kekayaan Negara

Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan

DIRE NUT Abdul Hade & PELAPORAN KEUM

Agustina Widyasari

. Badan Pemeriksa Keuangan

## LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2022 PER 31 DESEMBER 2022

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN Nomor : NKF-013/087/PB.6/2023

Tanggal: 11 April 2023

K/L : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BA: 087

		KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL	
AKUN	UNAUDITED	DEBET	KREDIT		
EKUITAS AWAL	1.234.482.450.232			1.234.482.450.232	
				(0.10.001.000.144)	
SURPLUS/DEFISIT LO	(249.153.187.983)	(5.619.757.520)	(5.571.046.092)	(249.201.899.411)	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS					
Penyesuaian Nilai Aset	-				
Koreksi Nilai Persediaan	-				
Selisih Revaluasi Aset	-		4 500 000 440	1,353,705,968	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	1.946.646.532	2.125.180.013	1.532.239.449	1,333,703,300	
Koreksi Atas Reklasifikasi	-			(10.000.000	
Koreksi Lain-lain	(10.000.000)			(10.000.000	
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	1.936.646.532	2.125.180.013	1.532.239.449	1.343.705.968	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	247.549.140.859			247.549.140.859	
Ditagihkan ke Entitas Lain				(18.868.813.156	
Diterima dari Entitas Lain	(18.868.813.156)			(132.773.350	
Transfer Keluar	(132.773.350)	21.007.450	235.916.554	346.802.745	
Transfer Masuk	132.773.350	21.887.159	235.910.334		
Pengesahan Hibah Langsung					
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung				669.737.445	
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	669.737.445			008.131.440	
Setoran Surplus BLU	-			·	
Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	-			000 504 004 54	
JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	229.350.065.148	21.887.159	235.916.554	229.564.094.543	

KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(17.866.476.303)	7.766.824.692	7.339.202.095	(18.294.098.900)
EKUITAS AKHIR	1.216.615.973.929	7.766.824.692	7.339.202.095	1.216.188.351.332

Jakarta, ii April 2023 Kementerian/Lembaga,

Furqon Imamsyah Ahda

Ditjen Kekayaan Negara,

Bambang Sulistyono

Badan Pemeriksa Keuangan,

Agustina Widyasari

Ditjen Perbendaharaan,

Nur Abdul Haris

## NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2022 PER 31 DESEMBER 2022

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN Nomor: NKF-013/087/PB.6/2023 Tanggal: 11 April 2023

K/L : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BA : 087

	INTERPRET	KOREKSI DARI	BPK DAN KL	ASERSI FINAL
AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AULIUITINAL
SET				
SET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas Lainnya dan Setara kas	-			
Kas pada BLU	-			
Investasi Jangka Pendek BLU				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-			
Uang Muka Belanja (prepayment)	-			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			
Piutang Perpajakan				
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-			
Piutang Perpajakan (Netto)		-	<b>-</b> .	
Piutang Bukan Pajak	-			
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak				
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	
Bagian Lancar TPA	-			
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA				
Bagian Lancar TPA (Netto)	-1	-	-	
Bagian Lancar TP/TGR				
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-			
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	- 1	
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-			
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	
Piutang dari Kegiatan BLU	- 1			
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-			
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	
Persediaan	2.531.938.502	1.780.380	1.461.665	2,532,257,2
Jumlah Aset Lancar	2.531.938.502	1.780.380	1.461.665	2.532.257.2
ASET TETAP				
Tanah	806.226.080.906			806.226.080.90
Peralatan dan Mesin	280.385.263.263	735.782.974		281,121.046.2
Gedung dan Bangunan	370.279.318.541	252.241.128	1.136.541.300	369.395.018.30
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.881.974.526			62.881.974.5
Aset Tetap Lainnya	27.799.619.494	41.696.080		27.841.315.5
Konstruksi Dalam Pengerjaan	446.248.000			446.248.0

Aset Konsesi Jasa				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(216.715.565.805)		353,733.018	(217.069.298.823)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(79.857.889.431)	79.557.891	3.802.723	(79.782.134.263)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(41.211.057.119)			(41.211.057.119)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(60.483.100)			(60.483.100)
Akumulasi Peyusutan Aset Konsesi Jasa	-			
Jumlah Aset Tetap	1.210.173.509.275	1.109.278.073	1.494.077.041	1.209.788.710.307
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	-			
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			
Jumlah Properti Investasi	<u>.</u>	-		
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	<u>-  </u>			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	•	-		-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-			_
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	- [		* :
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-			
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-		
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-			+
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			26.934.084.967
Aset Tak Berwujud	26.329.084.967	605.000.000		20.934.064.907
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	+ .			
Dana yg Dibatasi Penggunaannya				
Dana Penjaminan	-			
Dana Kelolaan BLU	-		5 505 054 050	1,162.593.490
Aset Lain-lain	6.667.847.748		5.505.254.258	1,102,393,490
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ketiga	-			·
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			(1.162.593.490)
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(6.549.080.404)	5.386.486.914	F00 075 000	(20.937.213.857)
Akum, Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.407.838.857)		529.375.000	(20.937.213.637)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan			0.004.000.050	5.996.871.110
Jumlah Aset Lainnya	6.040.013.454	5.991.486.914	6.034.629.258	1.218.317.838.634
JUMLAH ASET	1.218.745.461.231	7.102.545.367	7.530.167.964	1.210.311.030.034
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				2.129.487.302
Utang kepada Pihak Ketiga	2.129.487.302			2.123.701.302
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				<u> </u>
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan				
Pendapatan Diterima Dimuka				-
Hibah Yang Belum Disahkan	-			
Uang Muka dari KPPN				······································
Utang Jangka Pendek Lainnya		LL		

	2.129.487.302		-	2.129.487.302
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.129.467.302	-		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			
Kewajiban Konsesi Jasa	-			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	•			
JUMLAH KEWAJIBAN	2.129.487.302		•	2.129.487.302
EKUITAS	1.216.615.973.929	7.766.824.692	7.339.202.095	1.216.188.351.332
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.218.745.461.231	7.766.824.692	7.339.202.095	1.218.317.838.634

Jakarta, | April 2023 Kementerian/Lembaga,

Furqon Imamsyah Ahda

Ditjen Kekayaan Negara,

Bambang Sulistyono

Badan Pemeriksa Keuangan,

Agustina Widyasari

Ditten Perbendaharaan,

Nur Abdel Haris

PERBENDAHARI

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN Nomor : NKF-013/087/PB.6/2023

Tanggal: 11 April 2023

## LAMPIRAN BELANJA PENANGANAN COVID KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI PADA LKKL

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**BAGIAN ANGGARAN** : 087

	BELANJA BARANG					BELANJA M			BELANJA	BANTUAN			
PAGU KEMENTERIAN/LEMBAGA	AKUN KHUSUS		AKUN REGULER			AKUN KHUSUS	AKI	JN REGULER	AKU	N KHUSUS	AKUN REGULER		KETERANGAN
	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	
Pagu Belanja Barang-	521131	281.118.000			532119	0			574114	(	)		(-) Pengadaan Covid Kit Kegiatan
Penanganan Pandemi COVID-19	521241	0			533119	0			575114	(	)		Penanganan Covid-19 di ANRI;
sebesar Rp1.318.815.000	521841	230.710.000			536118	0							(-) Pengadaan Barang Persediaan
	522192	653.931.028			537122	0							dalam rangka Vaksinisasi Booster;
	523114	0			537123	0							(-) Pengadaan Alat Swab Antigen;
	524115	0			537125	0							(-) Penyemprotan cairan disinfektan
	525152	0											di lingkungan
	525153	0											ANRI dan kebutuhan rapid test/swab
	525154	0											antigen/swab PCR/skrining pegawai
	525155	0											dalam rangka pemeriksaan kesehatan
	525156	0											dan keperluan perjalanan dinas
	526131	0											
	526132	0											
	526321	0											
	526322	0											
SUB TOTAL		1.165.759.028		0		0		C		(	)	0	
TOTAL PER JENIS BELANJA			-	1.165.759.028				C				0	]
TOTAL BELANJA							1	.165.759.028					

Kd BA	Nm BA Kd PN	Nm PN Kd Prog	Kd Keg	Kd KRO	Kd RO	Nm RO	Pagu Anggaran	Konfirmasi Pagu Anggaran (diisi angka Pagu Anggaran yang benar)	Realisasi Relania	Konfirmasi Realisasi Belanja (diisi angka realisasi belanja yang benar)	Target Volume RO K/L ang	nfirmasi Target lume RO K/L (diisi gka Target volume tput yang benar)	Realisasi Volume RO K/L	Konfirmasi Realisasi Volume RO K/L (diisi angka realisasi volume output yang benar)	The second secon
087	ARSIP NAS 04	Revolusi MCN	3620	UAA	001	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diselamatkan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.463.541.150	1.463.541.150	10.000	10.000	8.432	8.432	Dokumen
087	ARSIP NAS 04	Revolusi MCN	3623	UAA	001	Arsip penanganan pandemi covid-19 di Indonesia yang didokumenta	1.550.000.000	1.550.000.000	1.285.070.350	1.285.070.350	4	4	4	4	Dokumen
087	ARSIP NAS 07	Memperkı CN	6660	UBA	001	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplika:	3.294.420.000	3.294.420.000	3.216.058.500	3.216.058.500	80	80	0 80	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)
087	ARSIP NAS 07	Memperkı CN	6660	UBA	002	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikas	2.850.250.000	2.850.250.000	2.582.133.656	2.582.133.656	85	85	85	85	Daerah (Prov/Kab/Kota)
087	ARSIP NAS 07	Memperkı CN	6660	QDB	001	Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Be	1.019.085.000	1.019.085.000	997.602.934	997.602.934	53	53	53	53	Lembaga
087	ARSIP NAS 04	Revolusi MCN	3624	UAA	001	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah	480.000.000	480.000.000	461.150.500	461.150.500	10.000	10.000	8.432	8.432	Arsip

# X USULAN JURNAL KOREKSI

#### USULAN KOREKSI ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

	n de la companya de l	KOREK	(SI								
No	Uraian	Debet	Kredit	Setuju/Tidak Setuju	Keterangar						
atkei	r: Pusat Jasa Kearsipan (418929)										
1	117111 Persediaan - Barang Konsumsi	396.000		Catulu							
	593111 Beban Persediaan - Barang Konsumsi	1	396.000	Setuju	De 10						
	Koreksi kurang catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada Satker Pusat Jasa Kearsij	pan									
2	117111 Persediaan - Barang Konsumsi										
	593111 Beban Persediaan - Barang Konsumsi		161.400	Setuju							
	Koreksi kurang catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada Satker Pusat Jasa Kearsig	pan									
3	132111 Peralatan dan Mesin	15.584.400		1							
	491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		15.584.400		=						
	591111 Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.558,440									
	137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.558.440	Setuju							
	491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	15.584.400									
	523111 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan		15.584.400		× ,						
	Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan - Pekerjaan Partisi Ruang Alih Media (pembuatan meja kerja)										
4	133111 Gedung dan Bangunan	53.818.128									
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		53.818.128		* * *						
	591211 Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	597.979	00101120								
	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		597.979	Setuju							
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	53.818.128	337,075								
	523111 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan		53.818.128								
	Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan - Pekerjaan Partisi Ruang Alih Media	×	00101120								
ker	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (418934)										
5	133111 Gedung dan Bangunan	129.195.000									
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	+	129.195.000								
	591211 Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.018.672									
	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.018.672	Setuju							
1	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	129.195.000									
	523111 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan		129,195,000								
1	The state of the Company of the state of the	foreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan - Restorasi Ruang Makan di Pusdiklat Kearsipan									
5	133111 Gedung dan Bangunan	33.153.000									
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	540.010	33.153.000								
	591211 Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	518.016	518.016	Setuju							
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	33.153.000	510.010	s							
- 1	523111 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan		33.153.000	2							

No	Urajan	KORE	KSI	Setuju/Tidak Setuju	Kotorongon					
NO	Uraian	Debet	Kredit	Setuju/Tidak Setuju	Keterangan					
atke	r: Arsip Nasional RI Jakarta (450448)									
7	596111 Kerugian Pelepasan Aset	5.382.901.258			-					
	166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		5.382.901.258	Catalia						
	169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.294.293.758		Setuju						
	596111 Kerugian Pelepasan Aset		5.294.293.758							
	(Koreksi kurang atas Aset Lain-Lain yang telah diusulkan penghapusannya pada tahun 2022 masih me	emiliki sisa nilai buku di Sa	tker ANRI Jakarta)							
8	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122.353.000								
	166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		122.353.000							
	169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	92.193.156		Setuju						
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		92.193.156							
	(Koreksi kurang atas Aset Lain-Lain (Sumur Artesis) yang telah diusulkan penghapusannya pada tahu.	n 2021 masih memiliki sisa	nilai buku di Satker A	NRI Jakarta)						
9	593111 Belanja Barang Persediaan - Barang Konsumsi	610.000								
	117111 Persediaan - Barang Konsumsi	11	610.000	Setuju						
	Koreksi lebih catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada ANRI Pusat			2						
10	117111 Persediaan - Barang Konsumsi	1.078.480								
	593111 Belanja Barang Persediaan - Barang Konsumsi		1.078.480	Setuju						
	Koreksi kurang catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada ANRI Pusat									
11	593128 Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	637.665								
	117128 Persediaan - Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		637.665	Setuju						
	Koreksi lebih catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada ANRI Pusat				*					
12	117128 Persediaan - Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	144.500								
	593128 Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		144.500	Setuju						
	Koreksi kurang catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada ANRI Pusat									
13	133111 Gedung dan Bangunan	36.075.000								
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		36.075.000							
	591211 Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	668.056		y 1						
	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		668.056	Setuju						
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	36,075,000								
	523111 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan		36.075.000							
	Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan - Pembuatan Sekat di Gedung C Lantai 3 AN	RI Pusat								
atker	: Balai Arsip Statis dan Tsunami (681464)									
14	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.136.541.300								
	133111 Gedung dan Bangunan		1.136.541.300							
	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.827.065								
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		56.827.065							
	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.730.826								
	591211 Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan		22.730.826							

No	Uraian	KORE	KSI	Saturiu/Tidak Saturiu	V-4
NO	Oraian	Debet	Kredit	Setuju/Tidak Setuju	Keterangan
	132111 Peralatan dan Mesin	525.978.100			
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		525.978.100		
	391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	235.919.585		0-1-1-	
	137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		235.919.585	Setuju	
	591111 Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.367.834	10		
	137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		94.367.834		
	162151 Software	605,000,000			
	391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	605.000.000	605.000.000		
	391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	378.125.000			
	169315 Akumulasi Amortisasi Software		378.125.000		
	592115 Belanja Amortisasi Software	151.250.000			
	169315 Akumulasi Amortisasi Software		151.250.000		
	(Reklasifikasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Software	belum memiliki NUP) pa	ada BAST Aceh)		27 0
5	593111 Beban Persediaan - Barang Konsumsi	214.000		Cotviu	
	117111 Persediaan - Barang Konsumsi		214.000	Setuju	
	Koreksi lebih catat Persediaan berdasarkan hasil stock opname pada Satker BAST Aceh				
6	132111 Peralatan dan Mesin	194.220.474			
	135121 Aset Tetap Lainnya	41.696.080			
	391116 Transfer Masuk		235.916.554	Setuju	
	391116 Transfer Masuk	21.887.159			
	137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		21.887.159		

Kepala Bagian Perlengkapan, Tata Usaha, dan Protokol Arsip Nasional Republik Indonesia

Furqon Imamsyah Ahda

Tim Auditor BPK RI

Agustina Widyasari

